



LAPORAN 20 TAHUNAN 23

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2023, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta sasaran program dan kegiatan yang diemban Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Secara umum laporan ini menyajikan rangkuman kegiatan sepanjang tahun 2023 pada masing – masing unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dalam seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023.

Jakarta, 13 Februari 2024
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal line and a small checkmark-like flourish.

Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PROFIL UNIT KERJA	1
I. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	1
II. Struktur Organisasi	2
1. Sekretariat Direktorat Jenderal	2
2. Direktorat Lalu Lintas Jalan	4
3. Direktorat Angkutan Jalan	5
4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	7
5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;	8
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9
7. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)	11
8. Balai Pengelola Transportasi Darat	12
9. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Penyeberangan	14
III. Komposisi Pegawai Tahun 2023	15
IV. Visi dan Misi	17
1. Visi	17
2. Misi	17
V. Sejarah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan	17
BAB II KILAS KINERJA	23
I. UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DALAM ANGKA	23
1. Infrastruktur Konektivitas	23
2. Pelayanan	26
3. Keselamatan dan Keamanan	26
II. PERISTIWA PENTING	29
1. Kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik;	30
2. Semiloka Pengusaha Angkutan Orang Tahun 2023;	30
3. Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023;	30
4. Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang Terbaik Tahun 2023;	30
5. Pemilihan Abdiyasa Teladan Angkutan Orang Tingkat Nasional Tahun	

2023;	30
6. Dukungan pelaksanaan F1H20 Danau Toba (Sumatera Utara);	30
7. Dukungan pelaksanaan KTT Asean Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur);	30
8. Dukungan Pelaksanaan KTT ASEAN Summit (Jakarta);	30
9. Dukungan pelaksanaan STQH Provinsi Jambi (Jambi);	30
10. Dukungan pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Biak (Papua);	30
11. Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;	30
12. Dukungan Bus Pelaksanaan Kegiatan KTT AIS BALI;	30
13. Dukungan Pelaksanaan Aquabike World Championship;	30
14. Peresmian Terminal Penumpang Tipe A;	30
15. Peresmian KMP. Bahtera Nusantara 03;	30
16. Peresmian Pelabuhan Peresmian Pelabuhan 16 Ilir dan 7 Ulu;	30
17. Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023. 30	
III. PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	30
1. Daftar Penerima Penghargaan	30
2. Gambar Sertifikat Penerima Penghargaan	33
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	38
I. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA	38
II. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	42
1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin:	42
2. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	43
3. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	44
4. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	44
5. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Usia (18-25, 26-58, 59-65) dan Jenis Kelamin	45
6. Manajemen Kepegawaian	45
III. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	49
1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan keikutsertaan dalam Diklat	

Teknis/ Administrasi/ Penjenjangan dan Jenis Kelamin.....	49
2. Jumlah Perekrutan Sumber Daya Manusia pada 3 (Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	50
3. Jumlah Perekrutan Sumber Daya Manusia pada 3 (Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan Unit Kerja, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin	51
4. Pangkat dan Jabatan.....	53
5. Pengembangan Karir.....	55
IV. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN UNIT KERJA.....	60
1. Promosi	60
2. Mutasi.....	60
3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.....	61
4. Penggajian dan Tunjangan.....	64
5. Penghargaan.....	66
6. Disiplin.....	67
7. Pemberhentian	69
8. Jaminan Pensiun dan Hari Tua	69
9. Perlindungan	70
10. Update Sistem Informasi Kepegawaian (SIK).....	70
BAB IV KEGIATAN STRATEGIS.....	79
I. Peristiwa Penting dan Kegiatan yang Melibatkan Menteri/ Direktur Jenderal Perhubungan Darat	79
1. Kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik	79
2. Semiloka Pengusaha Angkutan Orang Tahun 2023.....	94
3. Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023	97
4. Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang Terbaik Tahun 2023	98
5. Pemilihan Abdiyasa Teladan Angkutan Orang Tingkat Nasional Tahun 2023	101
6. Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan.....	102
7. Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan.....	104
8. Dukungan pelaksanaan F1H20 Danau Toba (Sumatera Utara)	106
9. Dukungan pelaksanaan KTT Asean Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur)	108
10. Dukungan Pelaksanaan KTT ASEAN Summit (Jakarta).....	111
11. Dukungan pelaksanaan STQH Provinsi Jambi (Jambi)	116

12. Dukungan pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Biak (Papua)	118
13. Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	121
14. Dukungan Bus Pelaksanaan Kegiatan KTT AIS BALI	129
15. Dukungan Pelaksanaan Aquabike World Championship	131
16. Peresmian Terminal Penumpang Tipe A	133
17. Peresmian KMP. Bahtera Nusantara 03	135
18. Peresmian Pelabuhan Peresmian Pelabuhan 16 Ilir dan 7 Ulu	136
19. Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023	137
II. Kegiatan Penunjang Program Kerja Presiden	141
1. Capaian <i>Major Project</i> Pantauan Kemenko Marves	141
2. Capaian Janji Presiden	141
3. Capaian Program Sustainable Development Goals (SDGs)	141
4. Capaian Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) – Perpres 34 Tahun 2022	145
5. Capaian Food Estate – Arahkan Presiden Tahun 2021	145
6. Capaian Kebijakan Satu Peta – Perpres 23 Tahun 2021	146
7. Capaian Program Pendukung PEN (Padat Karya) – Perpres 108 Tahun 2020	146
8. Capaian 15 Danau Prioritas – Perpres 2021	146
9. Capaian 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) – Perpres 49 Tahun 2016	147
BAB V PENYEDIAAN SARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	155
I. ANGKUTAN JALAN	155
1. Izin penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ...	155
2. Izin penyelenggaraan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)	155
3. Keperintisan Angkutan Jalan	156
4. Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	157
5. Kegiatan Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Mendukung Tol Laut	158
6. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan Dengan Skema Buy the Service (BTS)	161
II. SARANA TRANSPORTASI JALAN	169
1. Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Non-Statik (baba 2)	

.....	169
2. Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).....	170
3. Akreditasi UPUBKB	170
4. Penerbitan SUT dan SRUT	171
III. SARANA TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.....	172
1. Pembangunan Kapal Penyeberangan	172
2. Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Komersil dan Perintis ..	174
BAB VI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	178
I. LALU LINTAS & KESELAMATAN JALAN	178
1. Perlengkapan Jalan	178
2. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	178
II. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN.....	180
1. Terminal Penumpang	180
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)	181
3. Pembangunan Terminal Barang Internasional.....	183
III. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	183
1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan	183
2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan.....	184
3. Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru.....	185
4. Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan.....	185
5. Rehabilitasi Pelabuhan Sungai.....	186
6. Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan	186
7. Rehabilitasi Pelabuhan Danau	186
8. Pembangunan Halte Sungai.....	186
9. Pemasangan dan Pengadaan Rambu Sungai dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)	187
BAB VII REGULASI	189
BAB VIII PENGELOLAAN KEUANGAN.....	191
I. PENATAUSAHAAN PNBP	191
1. Rekapitulasi Laporan PNBP	191
II. PERBENDAHARAAN DAN AKUNTASI.....	193
1. Penetapan Status Hibah.....	193

2.	Penghapusan BMN	196
3.	Simak BMN	196
4.	Serah Terima Operasional.....	197
5.	Pembinaan dan Evaluasi Hasil Audit	197
6.	Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.....	199
7.	Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).....	199
8.	Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	201
III.	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023	203
1.	Pagu Anggaran	203
2.	Realisasi Penyerapan Anggaran	204
3.	Kegiatan yang Dikontrakkan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	204
4.	Kegiatan yang Diblokir DIPA Awal Antara lain:.....	205
BAB IX	PENUTUP	206

BAB I

PROFIL UNIT KERJA

I. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan merupakan salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

II. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Transportasi Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat memiliki Unit Kerja yang membantu untuk mencapai tujuan Kementerian Perhubungan khususnya di Bidang Transportasi Darat, berikut susunan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

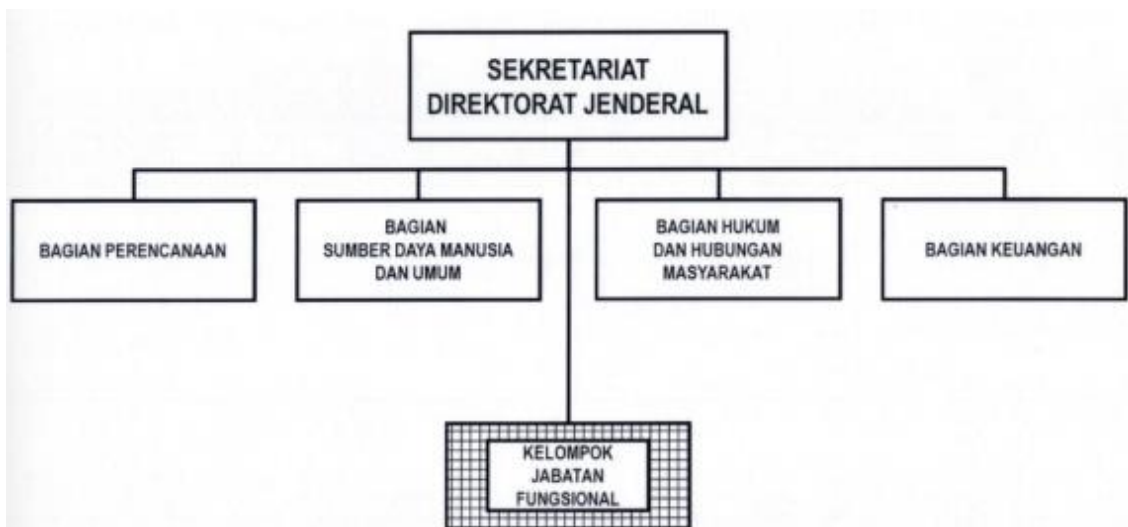
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang, kebijakan angka pendek, menengah dan panjang, sasaran dan arah pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rencana induk Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLAJSDP), kajian, rencana dan program

kerja dan anggaran, dan hibah/bantuan luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi bidang LLAJSDP, sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan dan penyusunan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, rapat koordinasi dan rapat kerja dinas;

- b) Pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, reformasi birokrasi, dan urusan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, serta penyiapan dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi darat;
- c) Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, evaluasi peraturan perundang- undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pengelolaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat, dan;
- d) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, pengusulan BLU, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional eksternal dan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta evaluasi dan pelaporan.



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

2. Direktorat Lalu Lintas Jalan

Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan, dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Lalu Lintas Jalan

3. Direktorat Angkutan Jalan

Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang antar kota, angkutan perkotaan, angkutan barang, angkutan multimoda dan antarmoda; dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Angkutan Jalan

4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

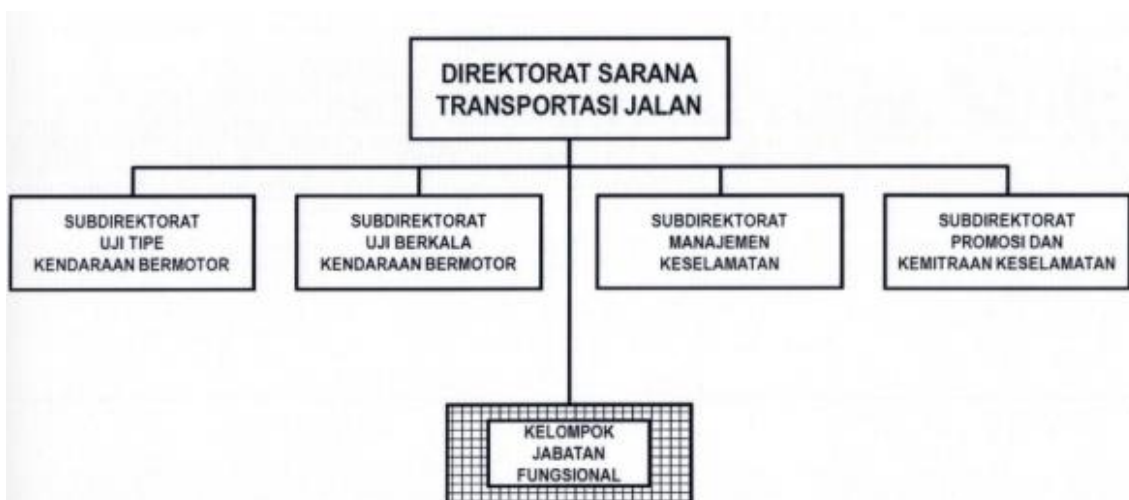


Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;

Direktorat Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan

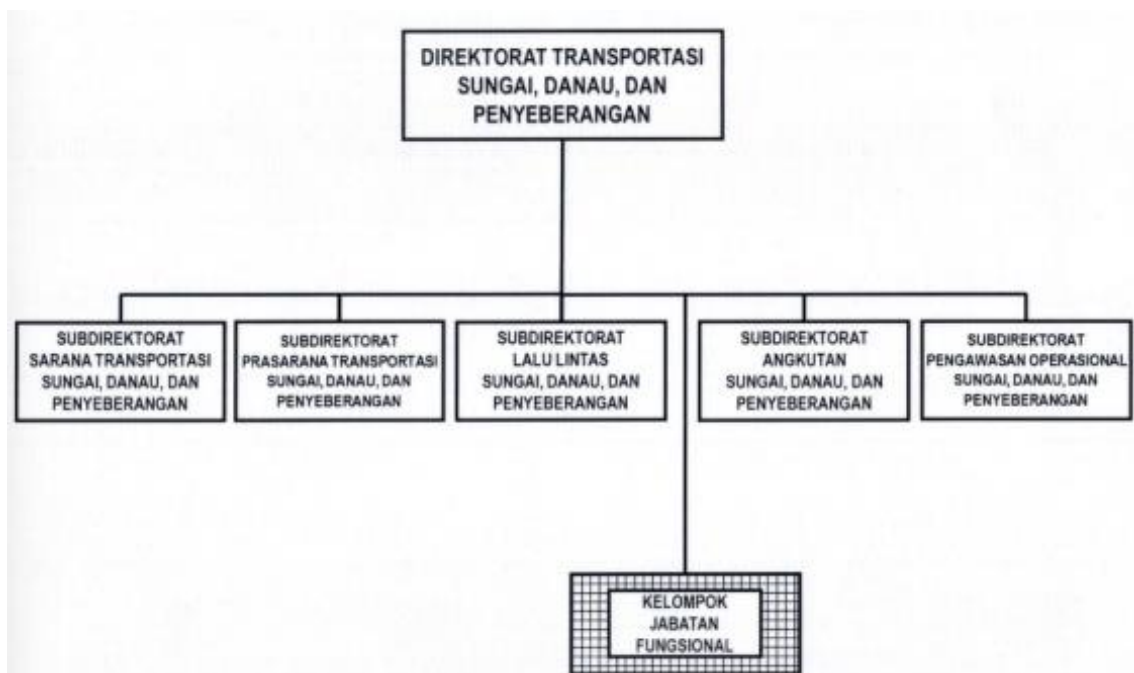
6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan pengawasan operasional sungai, danau, dan penyeberangan, dan;
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat



Bagan Struktur Organisasi Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

7. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2002 Tentang Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan kendaraan khusus.

Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor antara lain:

- Pelaksanaan uji prestasi, bagian kendaraan bermotor, peralatan keselamatan, dan uji lapangan serta pemeriksaan konstruksi;
- Penyiapan bahan sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan pemeriksaan dokumen teknis dan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji;
- Pelaksanaan pemeliharaan, pengadaan dan penilaian kinerja fasilitas dan peralatan pengujian serta sarana penunjang teknis lainnya;
- Pengembangan teknologi pengujian tipe kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.



Bagan Struktur Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

8. Balai Pengelola Transportasi Darat

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), BPTD merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala.

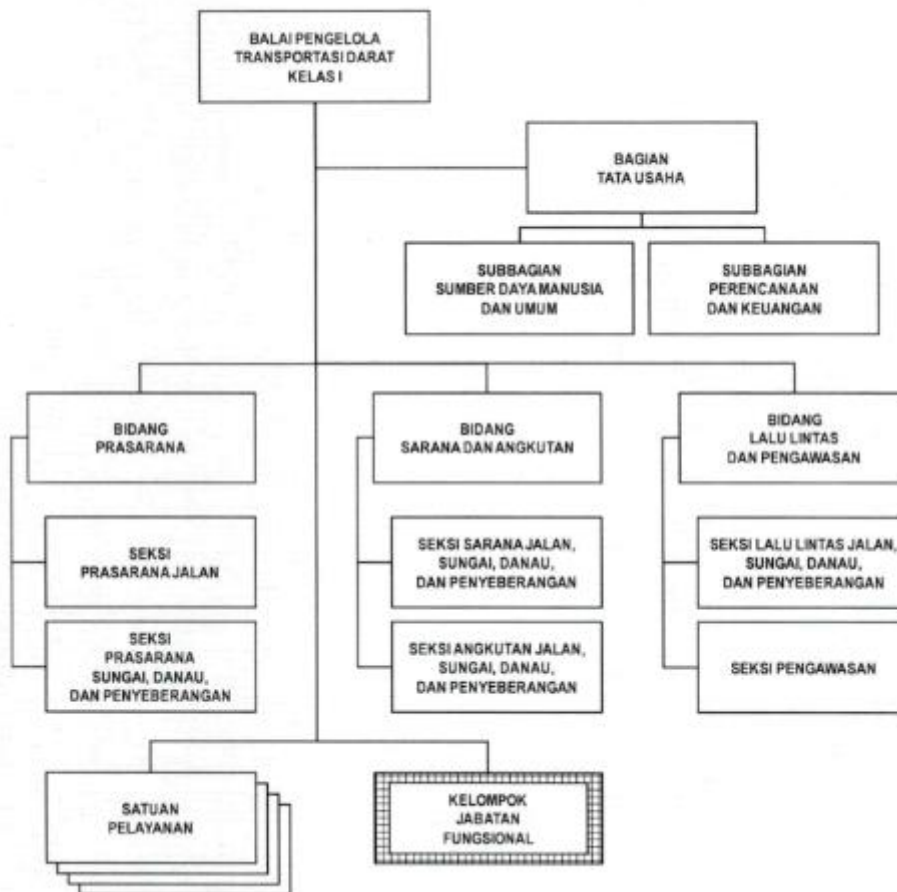
BPTD diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:

- a. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I;
Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:
 - 1) Bagian Tata Usaha;
 - 2) Bidang Prasarana;
 - 3) Bidang Sarana dan Angkutan;
 - 4) Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II;
Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - 3) Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - 4) Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan;
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III;
Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. 33 Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut adalah sebagai berikut :

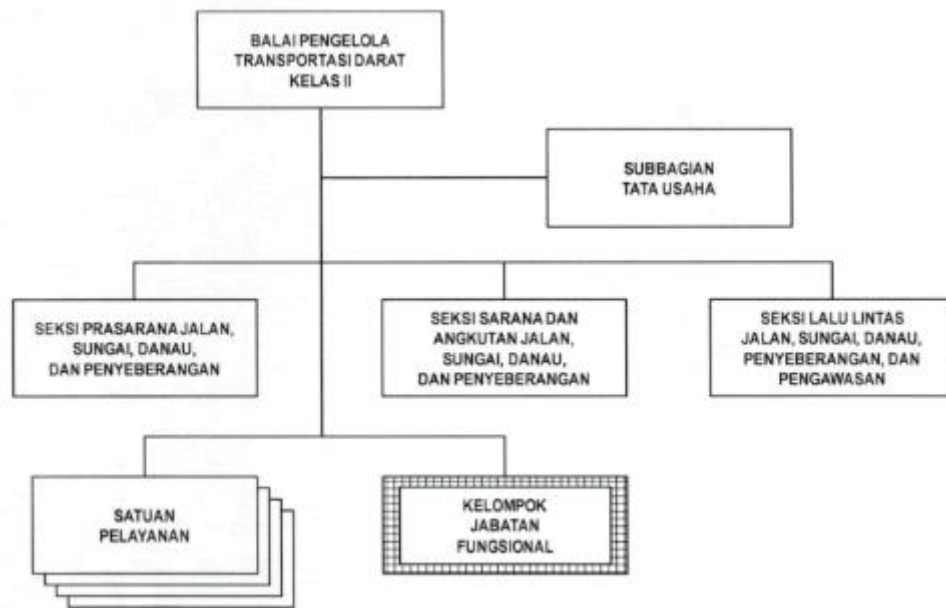
1) BPTD Kelas II Aceh	18) BPTD Kelas II NTT
2) BPTD Kelas II Sumut	19) BPTD Kelas II Kalbar
3) BPTD Kelas II Sumbar	20) BPTD Kelas II Kalsel
4) BPTD Kelas II Riau	21) BPTD Kelas II Kalteng
5) BPTD Kelas II Kepri	22) BPTD Kelas II Kaltim
6) BPTD Kelas II Jambi	23) BPTD Kelas III Kaltara
7) BPTD Kelas III Bengkulu	24) BPTD Kelas II Sultra

- 8) BPTD Kelas II Lampung
- 9) BPTD Kelas II Sumsel
- 10) BPTD Kelas III Babel
- 11) BPTD Kelas II Banten
- 12) BPTD Kelas II Jabar
- 13) BPTD Kelas II Jateng
- 14) BPTD Kelas III DIY
- 15) BPTD Kelas II Jatim
- 16) BPTD Kelas II Bali
- 17) BPTD Kelas II NTB
- 25) BPTD Kelas II Sulsel
- 26) BPTD Kelas III Sulbar
- 27) BPTD Kelas II Sulteng
- 28) BPTD Kelas II Gorontalo
- 29) BPTD Kelas II Sulut
- 30) BPTD Kelas II Maluku
- 31) BPTD Kelas II Maluku Utara
- 32) BPTD Kelas II Papua
- 33) BPTD Kelas II Papua Barat

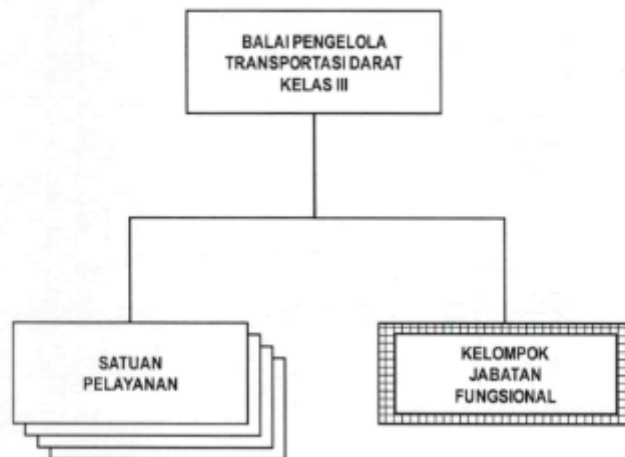
A. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I



B. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II



C. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III



Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas I, Kelas II dan Kelas III

9. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba (KSOPP Danau Toba), KSOPP Danau Toba merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. KSOPP Danau Toba dipimpin oleh Kepala.



III. Komposisi Pegawai Tahun 2023

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Transportasi Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Darat didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pada bidangnya, berikut rekapitulasi jumlah sumber daya manusia di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

No	Unit Kerja	Jumlah ASN
1.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat :	1
2.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :	146
3.	Direktorat Lalu Lintas Jalan :	68
4.	Direktorat Angkutan Jalan :	65
5.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan :	64
6.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan :	79
7.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan :	102
8.	BPLJSKB Bekasi :	97
9.	BPTD Kelas II Aceh :	141
10.	BPTD Kelas II Sumut :	229
11.	BPTD Kelas II Sumbar :	177
12.	BPTD Kelas II Riau :	111
13.	BPTD Kelas II Kepri :	66
14.	BPTD Kelas II Jambi :	166
15.	BPTD Kelas III Bengkulu :	137

No	Unit Kerja	Jumlah ASN
16.	BPTD Kelas II Lampung	98
17.	BPTD Kelas II Sumsel :	206
18.	BPTD Kelas III Babel	41
19.	BPTD Kelas II Banten :	134
20.	BPTD Kelas II Jabar :	367
21.	BPTD Kelas II Jateng :	495
22.	BPTD Kelas III DIY	130
23.	BPTD Kelas II Jatim :	510
24.	BPTD Kelas II Bali :	111
25.	BPTD Kelas II NTB	135
26.	BPTD Kelas II NTT :	105
27.	BPTD Kelas II Kalbar :	80
28.	BPTD Kelas II Kalsel :	70
29.	BPTD Kelas II Kalteng :	115
30.	BPTD Kelas II Kaltim dan Kaltara :	105
31.	BPTD Kelas III Kaltara	43
32.	BPTD Kelas II Sultra :	121
33.	BPTD Kelas II Sulsel :	190
34.	BPTD Kelas III Sulbar	177
35.	BPTD Kelas II Sulteng :	122
36.	BPTD Kelas II Gorontalo :	117
37.	BPTD Kelas II Sulut :	94
38.	BPTD Kelas II Maluku :	76
39.	BPTD Kelas II Maluku Utara :	112
40.	BPTD Kelas II Papua :	52
41.	BPTD Kelas II Papua Barat :	56
42.	Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba :	42
JUMLAH :		5553

Tabel Rekapitulasi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

IV. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya-saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia;
- b. Menciptakan dan mengorganisasi transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan;
- c. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel;
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

V. Sejarah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Departemen Perhubungan yang lahir dalam kancah perjuangan adalah gabungan antara Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Menteri Abikusno Tjokrosuyoso. Namun hal ini tidak berlangsung lama, karena Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum tidak lagi dijabat oleh orang yang sama yang merangkap tugas seperti sebeumnya. Urusan perhubungan dan pekerjaan umum kemudian berada di bawah dua pejabat yang berbeda yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Ir. Abdulkarim dan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Ir. Putuhena. Sesuai dengan nama yang disandangnya, Departemen Perhubungan mengurus masalah perhubungan. Keinginan Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia sangat jelas terlihat ketika mereka melancarkan agresi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresinya tersebut, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Dalam kondisi darurat ini, Dinas Telegraf sebagai salah satu Jawatan dalam Departemen Perhubungan berhasil menjalankan tugasnya yang sangat berdampak penting bagi kelangsungan tegaknya Indonesia saat itu. Dinas Telegraf berhasil mengirim berita terakhir ke Bukittinggi yang ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dari Presiden Soekarno yang isinya memberi wewenang untuk membentuk suatu pemerintahan darurat. Selanjutnya

dibentuklah Kabinet Darurat dengan Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dan Ir. Indratjaja sebagai Menteri Perhubungan dan merangkap sebagai Menteri Kemakmuran. Sejak awal kemerdekaan hingga pengakuan kedaulatan Belanda atas RIS tahun 1949, Departemen Perhubungan memiliki wewenang untuk mengatur perhubungan laut, udara, darat, perkeretaapian serta pos, telegraf, dan telekomunikasi dan masing-masing sektor tersebut diurus oleh jawatan-jawatannya sendiri yang berada di bawah struktur organisasi Departemen Perhubungan.

Titik berat yang menjadi perhatian Departemen Perhubungan pada era 1945-1949 adalah perhubungan darat karena diantara beberapa sektor perhubungan lainnya seperti laut maupun udara belum bisa menjadi sarana optimal. Angkatan laut masih terbatas jalur operasinya karena sebagian besar wilayah lautan Indonesia dikuasai oleh tentara sekutu, termasuk Belanda sehingga hubungan interinsuler ada dalam kekuasaan mereka. Perkeretaapian menjadi perhatian utama dalam mengelola perhubungan darat pada masa itu karena jaringan angkutan darat lainnya seperti bus, truk, mobil dapat dikatakan tidak ada karena semua alat angkut bermotor masih dikuasai Jepang. Pembenahan perkeretaapian sebagai sarana darat utama saat itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan sebab tingkat kerusakan kereta api cukup signifikan. Pada masa Demokrasi Liberal ini terjadi perubahan bagi Departemen Perhubungan secara kelembagaan, yaitu dibentuknya Departemen Perhubungan Laut pada masa Kabinet Djuanda. Dengan adanya departemen tersebut, maka urusan laut yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan, kini menjadi terpisah dan ditangani secara mandiri oleh Departemen Perhubungan Laut. Dalam rangka menguasai pelayaran secara menyeluruh, diputuskan bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran. Oleh karena itu pada tahun 1952, Ir. Djuanda selaku Menteri Perhubungan menetapkan berdirinya PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mulai beroperasi dengan 16 buah kapal milik Perpuska dan 45 kapal yang baru dibeli.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 153 tanggal 10 Juli 1959, Soekarno kemudian membentuk kabinet baru yang dikenal dengan sebutan Kabinet Kerja I. Dalam Kabinet Kerja I ini terjadi perubahan dalam struktur pemerintahan negara. Istilah Departemen Perhubungan tidak lagi digunakan dan sebagai gantinya dikenal dengan sebutan Kementrian Distribusi dengan J. Leimena menjabat sebagai Menteri. Perubahan yang cukup signifikan bagi Departemen Perhubungan terjadi pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin ini. Pada era ini, urusan perhubungan laut, udara, dan darat serta komunikasi tidak lagi berada secara keseluruhan di bawah

wewenang Departemen Perhubungan, tetapi terpecah-pecah ke dalam beberapa Departemen yang baru terbentuk pada era tersebut. Nama Departemen Perhubungan dalam Kabinet Kerja I tidak lagi ada tetapi diganti dengan istilah Bidang Distribusi yang menangani perhubungan laut, perhubungan darat, pos, dan telekomunikasi, perhubungan udara serta perdagangan. Sedangkan pada Kabinet Kerja II, urusan perhubungan berada di bawah bidang Distribusi yang terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan Udara, dan Departemen Perdagangan. Dalam Kabinet Kerja IV, istilah Bidang Distribusi diganti dengan Kompartemen Distribusi yang antara lain terdiri dari Departemen Perhubungan Darat, Pos dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan Udara. Sedangkan pada masa Kabinet Dwikora, perhubungan laut tidak lagi masuk dalam Kompartemen Distribusi tetapi dibentuk kompartemen sendiri yaitu Kompartemen Maritim yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Produksi Hasil Laut, serta Departemen Industri Maritim. Perubahan terjadi lagi dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan I, yaitu terpisahnya urusan pos dan telekomunikasi dengan perhubungan darat. Dalam kabinet ini dibentuk Departemen baru yaitu Departemen Pos dan Telekomunikasi dibawah Kompartemen Distribusi. Selanjutnya dalam susunan Kabinet Dwikora yang disempurnakan II kembali terjadi lagi perubahan. Urusan-urusan perhubungan yang sebelumnya didistribusikan dalam beberapa departemen, kini disatukan kembali dalam Departemen Perhubungan. Dalam masa awal Orde Baru Struktur Organisasi Departemen Perhubungan dalam Kabinet Pembangunan I, II, dan III adalah meliputi Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Lembaga Meteorologi dan Geofisika berada di bawah Direktorat Perhubungan Udara sampai dengan tahun 1972 karena pada tahun 1973 dipindahkan dari Direktorat Perhubungan Udara ke departemen Perhubungan. Penataan demi penataan yang dilakukan dalam Departemen Perhubungan dengan menyesuaikan struktur dan citranya, sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Konsolidasi yang dilakukan sejak tahun 1945 hingga sekarang menghasilkan sebuah Departemen yang besar.

BAB II

KILAS KINERJA

I. UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DALAM ANGKA

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Transportasi yang telah tertuang pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas dan fungsi yang saling berkaitan agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Kementerian Perhubungan. Berikut Capaian Key Performance Indikator (KPI) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2023:

1. Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur Konektivitas merupakan layanan dan fasilitas transportasi darat pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah total Kawasan Prioritas Nasional yang telah ditetapkan. Adapun Kawasan Prioritas Nasional terdiri dari:

- a. Sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Kawasan Strategis Nasional, terdiri dari:
 - 1) 10 (Sepuluh) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPP):

a) KSPN Danau Toba;	f) KSPN Labuan Bajo;
b) KSPN Tanjung Kelayang;	g) KSPN Likupang;
c) KSPN Borobudur;	h) KSPN Wakatobi
d) KSPN Bromo Tengger Semeru;	i) KSPN Morotai;
e) KSPN Mandalika;	j) KSPN Raja Ampat.
 - 2) 9 (Sembilan) Kawasan Industri (KI):

a) KI Sei Mangkei;	f) KI Surya Borneo;
b) KI Galang Batang;	g) KI Palu;
c) KI Bintan Aerospace;	h) KI Teluk Weda;
d) KI Sadai;	i) KI Teluk Bintuni
e) KI Ketapang;	
 - 3) 13 (Tiga Belas) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

a) KPBPB Sabang;	h) KEK Morotai;
b) KEK Arun Lhokseumawe;	i) KEK Sorong.
c) KPBPB Batam Bintan Karimun	j) KI/KEK Sei Mangkei*;
d) KEK Tanjung Kelayang;	k) KI/KEK Galang Batang*;
e) KEK Tanjung Lesung;	l) KEK Mandalika*;

- f) KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan;
m) KI/KEK Palu*.
- g) KEK Bitung;

Catatan : *4 KEK Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat

b. Sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTPK):

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 1) Sabang; | 12) Nunukan; | 22) Keerom; |
| 2) Serdang Bedagai; | 13) Belu; | 23) Boven Digoel; |
| 3) Kep. Meranti; | 14) Rote Ndao; | 24) Peg. Bintang; |
| 4) Natuna; | 15) Alor; | 25) Dumai*; |
| 5) Kep. Anambas; | 16) Sabu Raijua; | 26) Bintan*; |
| 6) Sambas; | 17) Kep. Sangihe; | 27) Karimun*; |
| 7) Sanggau; | 18) Kep. Talaud; | 28) Kupang*; |
| 8) Kapuas Hulu; | 19) Maluku Barat Daya; | 29) Kep. Morotai*; |
| 9) Sintang; | 20) Maluku Tenggara Barat; | 30) Raja Ampat*; |
| 10) Kutai Barat; | | 31) Merauke*; |
| 11) Malinau; | 21) Kep. Aru; | 32) Jayapura*. |

Catatan : *8 DTPK Tidak masuk perhitungan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai penyebut Rasio Konektivitas Transportasi Darat

c. Sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

- | | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1) Banda Aceh; | 13) Serang; | 28) Banjarmasin dsk; |
| 2) Mebidangro; | 14) Cilegon; | 29) Balikpapan- |
| 3) Padang-Lubuk Agung-Pariaman; | 15) Bandung Raya; | Samarinda- |
| 4) Pekanbaru; | 16) Cirebon; | Bontang; |
| 5) Dumai; | 17) Surakarta; | 30) Tarakan; |
| 6) Batam; | 18) Kedungsepur; | 31) Gorontalo; |
| 7) Jambi; | 19) Cilacap; | 32) Manado; |
| 8) Palembang dsk; | 20) Yogyakarta; | 33) Bitung; |
| 9) Bengkulu; | 21) Gerbangkertosusilo | 34) Palu; |
| 10) Pangkal Pinang; | 22) Malang; | 35) Maminasata; |
| 11) Bandar Lampung; | 23) Sarbagita; | 36) Kendari; |
| | 24) Mataram Raya; | 37) Ambon; |

- | | | |
|------------------|-------------------|---------------|
| 12) Jabodetabek; | 25) Kupang; | 38) Ternate; |
| | 26) Pontianak; | 39) Sorong; |
| | 27) Palangkaraya; | 40) Timika; |
| | | 41) Jayapura; |
| | | Merauke. |

Sepanjang Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan untuk menunjang Infrastruktur Konektivitas, berikut capaian pembangunan pada Tahun 2023:

- a. Prasarana Angkutan Jalan:
 - 1) Pembangunan Terminal Tipe A di 2 (Dua) Lokasi.
- b. Pembangunan Prasarana Angkutan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - 1) Pembangunan Pelabuhan Sungai di 7 (Tujuh) Lokasi Pembangunan Lanjutan;
 - 2) Pembangunan Pelabuhan Danau di 4 (Empat) Lokasi Pembangunan Lanjutan;
 - 3) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 4 (Empat) Lokasi Pembangunan Baru;
 - 4) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 10 (Sepuluh) Lokasi Pembangunan Lanjutan;
 - 5) Pembangunan Halte Sungai di 15 (Lima Belas) Lokasi.
- c. Pelayanan Angkutan Jalan:
 - 1) Subsidi Keperintisan Angkutan Jalan sebanyak 332 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Trayek;
 - 2) Subsidi Perintis Angkutan Barang sebanyak 6 (Enam) Lintasan;
 - 3) Subsidi Angkutan Antarmoda Kawasan KSPN di 11 (Sepuluh) Wilayah KSPN sebanyak 34 (Tiga Puluh Dua) Trayek;
 - 4) Pelaksanaan *Buy the Service* di 10 (Sepuluh) Lokasi.
- d. Pembangunan Sarana Angkutan Jalan:
 - 1) Bus Bantuan sebanyak 149 Unit.
- e. Pembangunan Sarana Angkutan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - 1) Pembangunan Kapal Penyeberangan sebanyak 1 (Satu) Unit Pembangunan Lanjutan.
- f. Pelayanan Angkutan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan:
 - 1) Subsidi Perintis Penyeberangan sebanyak 274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) Lintas;
 - 2) Pelayanan *Long Distance Ferry* (LDF) sebanyak 2 (Dua) Lintas.

2. Pelayanan

Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat yang optimal di Bidang Sarana maupun Prasarana pada Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun Kinerja Pelayanan Transportasi Darat diantaranya antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan pada Satuan Pelayanan yang melaksanakan Operasional di masing-masing Provinsi dengan Pengawasan Langsung oleh 35 Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, adapun Satuan Pelayanan dimaksud yaitu:
 - 1) Operasional Terminal Tipe A di 113 (Seratus Tiga Belas) Lokasi;
 - 2) Operasional Pelabuhan Penyeberangan di 328 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) Pelabuhan Penyeberangan yang terbagi menjadi 281 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu) Wilayah Kerja atau 47 (Empat Puluh Tujuh) Satuan Pelayanan.
- b. Peningkatan Prasarana Satuan Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan pada pengguna moda transportasi darat, Sektor Darat telah melaksanakan Revitalisasi dan Rehabilitasi pada:
 - 1) Revitalisasi/ Rehabilitasi Terminal Tipe A pada 19 (Sembilan Belas) Lokasi;
 - 2) Rehabilitasi Pelabuhan Sungai pada 5 (Lima) Lokasi;
 - 3) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan pada 16 (Enam belas) Lokasi.
- c. Peningkatan Pelayanan
 - 1) Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online (JTO)
Untuk meningkatkan pelayanan penimbangan pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membangun Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online (JTO) di 2 Lokasi;
 - 2) Excellence Service Terminal Tipe A
Peningkatan pelayanan kepada penumpang angkutan umum pada Terminal Tipe A, maka pada 21 Lokasi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A menyediakan Excellence Service untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh penumpang dan pengguna jasa terminal.

3. Keselamatan dan Keamanan

Sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi Darat yang aman, lancar, tertib serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan berbagai program dan kegiatan

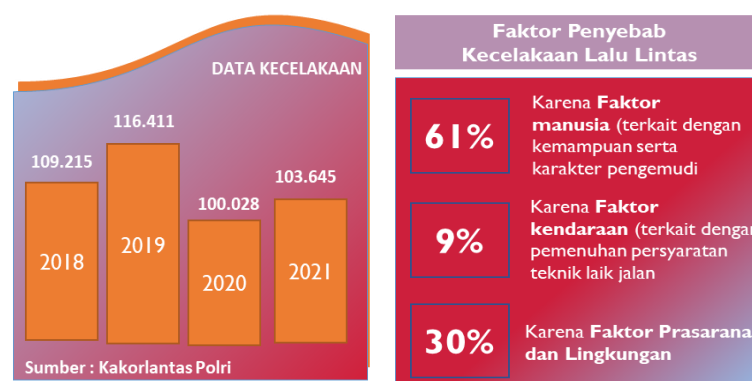
untuk meningkatkan kinerja keselamatan. Salah satu capaian keberhasilan dalam peningkatan keselamatan adalah menurunnya angka kejadian kecelakaan setiap tahunnya.

Dikutip dari Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan di Indonesia Tahun 2022 terdapat 139.258 kasus kecelakaan. Dari 5 Tahun terakhir, data Kecelakaan terbesar terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 116.411 kejadian, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi 100.028 kejadian sampai pada Tahun 2022 telah terjadi 139.258 kejadian. Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena faktor manusia sebesar 61%, faktor kendaraan sebesar 9%, dan faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%.

Kecelakaan tidak saja mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan namun juga mengakibatkan kematian dan kerugian harta benda. Untuk meminimalisir jumlah kecelakaan di Tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya, Berikut langkah-langkah peningkatan Keselamatan dan Keamanan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu:

- Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Transportasi Penyeberangan;
- Menyelenggarakan Sarana Keselamatan Transportasi Jalan;
- Pemasangan Perlengkapan Jalan yang Berkeselamatan;
- Bantuan Teknis dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK).

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan transportasi darat sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan di Indonesia.



Infografis Data Kecelakaan beserta Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Pada tahun 2023, Realisasi dukungan pada Program Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat yaitu:

- a. Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor:
 - 1) Pembangunan UPPKB di 4 (Empat) Lokasi;
 - 2) Rehabilitasi UPPKB di 7 (Tujuh) Lokasi;
 - 3) Operasional UPPKB di 84 (Delapan Puluh Empat) Lokasi;
 - 4) Operasional UPPKB dengan Dukungan Pihak Ke-2 di 84 (Delapan Puluh Empat) Lokasi;
 - 5) Pemasangan *Weight in Motion* (WIM) di 6 (Enam) Lokasi.
- b. Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Transportasi Penyeberangan:
 - 1) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 15 (Lima Belas) Unit;
 - 2) Pemasangan Rambu Sungai sebanyak 451 (Empat Ratus Lima Puluh Satu) Unit;
 - 3) Pembangunan LPS di 1 (Satu) Lokasi;
 - 4) Operasional Kapal Patroli sebanyak 3 (Tiga) Unit.
- c. Menyelenggarakan Sarana Keselamatan Transportasi Jalan:
 - 1) Menyelenggarakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di 26 (Dua Puluh Enam) Provinsi;
 - 2) Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di 25 (Dua Puluh Lima) Lokasi;
 - 3) Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Unit;
 - 4) Pengadaan Alat Uji Berkala Non Statis sebanyak 1 (Satu) Unit;
 - 5) Pengadaan Alat Kalibrasi Kendaraan sebanyak 6 (Enam) Lokasi.
- d. Pemasangan Perlengkapan Jalan yang Berkeselamatan:
 - 1) Pemasangan APILL sebanyak 13 (Tiga Belas) Unit;
 - 2) Pemasangan Lampu Peringatan Pemakai jalan sebanyak 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) Unit;
 - 3) Pemasangan Marka sepanjang 1.062.297 (Satu Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh) M;
 - 4) Pemasangan Pagar Pengaman Jalan sebanyak 4.852 (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Unit;
 - 5) Pemasangan Paku Jalan sebanyak 9.388 (Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan) Buah;
 - 6) Pemasangan Alat Penerangan Jalan sebanyak 1.785 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima) Unit;
 - 7) Pemasangan Rambu sebanyak 6.780 (Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Buah;

- 8) Pemasangan Patok Lalu Lintas sebanyak 2.722 (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua) Buah.
- e. Bantuan Teknis dan Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK):
 - 1) Pemberian Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Kepada Pemerintah Daerah di 69 (Enam Puluh Sembilan) Lokasi;
 - 2) Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) di 22 (Dua Puluh Dua) Lokasi.
- f. Pengadaan Perlengkapan Jalan:
 - 1) Pengadaan APILL sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) Unit;
 - 2) Pengadaan Lampu Peringatan Pemakai Jalan sebanyak 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Unit;
 - 3) Pengadaan Marka sepanjang 1.428.712 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua belas) Meter;
 - 4) Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan sebanyak 7.368 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan) Unit;
 - 5) Pengadaan Cermin Tikungan sebanyak 3.480 (Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Unit;
 - 6) Pengadaan Paku Jalan sebanyak 30.083 (Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Tiga) Unit;
 - 7) Pengadaan Alat Penerangan Jalan sebanyak 8.574 (Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat) Unit;
 - 8) Pengadaan Rambu sebanyak 12.930 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Unit;
 - 9) Pengadaan Patok Lalu Lintas sebanyak 4.274 (Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) Unit.

II. PERISTIWA PENTING

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyelenggarakan banyak kegiatan dan turut serta mendukung kegiatan yang memiliki skala Nasional maupun Internasional, berikut beberapa kegiatan yang Penting dan melibatkan Pimpinan Tinggi Utama, Madya sampai dengan Pratama antara lain :

1. Kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik;
2. Semiloka Pengusaha Angkutan Orang Tahun 2023;
3. Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023;
4. Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang Terbaik Tahun 2023;
5. Pemilihan Abdiyasa Teladan Angkutan Orang Tingkat Nasional Tahun 2023;
6. Dukungan pelaksanaan F1H20 Danau Toba (Sumatera Utara);
7. Dukungan pelaksanaan KTT Asean Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur);
8. Dukungan Pelaksanaan KTT ASEAN Summit (Jakarta);
9. Dukungan pelaksanaan STQH Provinsi Jambi (Jambi);
10. Dukungan pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Biak (Papua);
11. Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
12. Dukungan Bus Pelaksanaan Kegiatan KTT AIS BALI;
13. Dukungan Pelaksanaan Aquabike World Championship;
14. Peresmian Terminal Penumpang Tipe A;
15. Peresmian KMP. Bahtera Nusantara 03;
16. Peresmian Pelabuhan Peresmian Pelabuhan 16 Ilir dan 7 Ulu;
17. Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023.

III. PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

1. Daftar Penerima Penghargaan

No	Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kab./ Instansi/ Satuan Pelayanan	Program/ Kebijakan/ Penilaian	Keterangan
A.	Pemerintah Daerah Dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Terbaik		
1	Kota Semarang	Trans Semarang (Nilai 87,56)	Beroperasi sejak Tahun 2010 dengan subsidi APBD sebesar Rp. 216.000.000.000,- atau $\pm$ 3,6% dari APBD tahun 2023 memiliki jumlah kendaraan sebanyak 271 unit dengan jumlah koridor sebanyak 8 koridor.
2	Provinsi DI Yogyakarta	Trans Jogja (Nilai 55,53)	Beroperasi sejak 2008 dengan subsidi APBD sebesar Rp. 80.000.000.000,- atau $\pm$ 1,3% dari APBD tahun 2023

No	Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kab./ Instansi/ Satuan Pelayanan	Program/ Kebijakan/ Penilaian	Keterangan
			memiliki jumlah kendaraan sebanyak 95 unit dengan jumlah koridor sebanyak 18 koridor
3	Kota Pekanbaru	Trans Metro Pekanbaru (Nilai 35,80)	Beroperasi sejak 2009 dengan subsidi APBD sebesar Rp. 23.618.647.556,- atau ± 0,79% dari APBD tahun 2023 memiliki jumlah kendaraan sebanyak 90 unit dengan jumlah koridor sebanyak 8 koridor
4	Kota Padang	Trans Padang (Nilai 28,21)	Beroperasi sejak 2014 dengan subsidi APBD sebesar Rp. 27.000.000.000,- atau ± 0,99% dari APBD tahun 2023 memiliki jumlah kendaraan sebanyak 55 unit dengan jumlah koridor sebanyak 4 koridor
5	Provinsi Aceh	Trans Kutaraja (Nilai 26,68)	Beroperasi sejak 2016 dengan subsidi APBD sebesar Rp. 9.501.402.228,- atau ± 0,79% dari APBD tahun 2023 memiliki jumlah kendaraan sebanyak 59 unit dengan jumlah koridor sebanyak 6 koridor
B.	Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik		
1	UPUBKB Pulogadung, Provinsi DKI Jakarta	174	Aspek Penilaian : SarPras, Penunjang, Kinerja Pegawai, Inovasi & Kreatifitas, Penghargaan
2	UPUBKB Kota Tangerang	166	
3	UPUBKB Tandes, Kota Surabaya	155	
C.	Penyelenggara Operasional Pelabuhan Penyeberangan Terbaik		

No	Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kab./ Instansi/ Satuan Pelayanan	Program/ Kebijakan/ Penilaian	Keterangan
1	Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo	90,48	Aspek Penilaian : SPM 75%, Adm 15%, Inovasi 5% dan Penghargaan 5%
2	Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	75,16	
3	Pelabuhan Danau Tigaras	74,73	
D.	Penyelenggara Operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor Terbaik		
1	UPPKB Balonggandu, Jawa Barat	80,396	Aspek Penilaian : Fasilitas Utama 40%, Penunjang 40%, Kinerja Pegawai 20%, Inovasi +2,5 & Penghargaan +2,5
2	UPPKB Widodaren, Jawa Timur	79,472	
3	UPPKB Pasar Panas, Kalimantan Tengah	74,674	
E.	Penyelenggara Operasional Terminal Tipe A Terbaik		
1	Terminal Tipe A Patria, Kota Blitar, Jawa Timur	91,77	Aspek Penilaian : ADM & Manajemen, Prasarana & Operasional, Kesehatan & Kebersihan Lingkungan, Data Produksi Terminal
2	Terminal Tipe A Guntur Melati, Kota Garut, Jawa Barat	85,12	
3	Terminal Tipe A Leuwipanjang, Kota Bandung, Jawa Barat	81,74	

2. Gambar Sertifikat Penerima Penghargaan



Penyelenggara Operasional Terminal Tipe A Terbaik



Penyelenggara Operasional Penimbangan Kendaraan Bermotor Terbaik



Penyelenggara Operasional Pelabuhan Penyeberangan Terbaik



Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor Terbaik



*Pemerintah Daerah Dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan
Perkotaan Terbaik*

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

I. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah mengelola sumber daya manusia yang memiliki jabatan-jabatan mendukung capaian kinerja Kementerian Perhubungan, berikut pemetaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat :

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai (%)		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
1.	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	86	58	144	59,72	40,28	100
2.	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	47	30	77	61,04	38,96	100
3.	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	33	27	60	55,00	45,00	100
4.	Direktorat Lalu Lintas Jalan	41	24	65	63,08	36,92	100
5.	Direktorat Angkutan Jalan	38	23	61	62,30	37,70	100
6.	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	58	40	98	59,18	40,82	100
7.	Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	65	31	96	67,71	32,29	100

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai (%)		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
8.	BPTD Kelas II Aceh	104	29	133	78,20	21,80	100
9.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	173	47	220	78,64	21,36	100
10.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	151	21	172	87,79	12,21	100
11.	BPTD Kelas II Riau	83	26	109	76,15	23,85	100
12.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	40	25	65	61,54	38,46	100
13.	BPTD Kelas II Jawa Barat	274	42	316	86,71	13,29	100
14.	BPTD Kelas II Jambi	140	25	165	84,85	15,15	100
15.	BPTD Kelas II Lampung	104	49	153	67,97	32,03	100
16.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	150	53	203	73,89	26,11	100
17.	BPTD Kelas II Banten	74	46	120	61,67	38,33	100
18.	BPTD Kelas II Jawa Tengah	365	70	435	83,91	16,09	100

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai (%)		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
19.	BPTD Kelas II Jawa Timur	342	99	441	77,55	22,45	100
20.	BPTD Kelas II Bali	60	31	91	65,93	34,07	100
21.	BPTD Kelas II NTT	78	23	101	77,23	22,77	100
22.	BPTD Kelas II NTB	96	33	129	74,42	25,58	100
23.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	59	19	78	75,64	24,36	100
24.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	151	33	184	82,07	17,93	100
25.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	46	20	66	69,70	30,30	100
26.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	86	28	114	75,44	24,56	100
27.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	81	24	105	77,14	22,86	100
28.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	103	18	121	85,12	14,88	100
29.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	96	26	122	78,69	21,31	100

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai (%)		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
30.	BPTD Kelas II Gorontalo	89	27	116	76,72	23,28	100
31.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	77	16	93	82,80	17,20	100
32.	BPTD Kelas II Maluku	56	20	76	73,68	26,32	100
33.	BPTD Kelas II Maluku Utara	90	22	112	80,36	19,64	100
34.	BPTD Kelas II Papua	49	3	52	94,23	5,77	100
35.	BPTD Kelas II Papua Barat	50	5	55	90,91	9,09	100
36.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	28	13	41	68,29	31,71	100
37.	BPTD Kelas III Bengkulu	67	28	95	70,53	29,47	100
38.	BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	85	28	113	75,22	24,78	100
39.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	35	8	43	81,40	18,60	100
40.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	88	10	98	89,80	10,20	100

NO	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai (%)		
		Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
41.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba	31	11	42	73,81	26,19	100
	Total	3969	1211	5180	76,62	23,38	100,00

Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

II. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

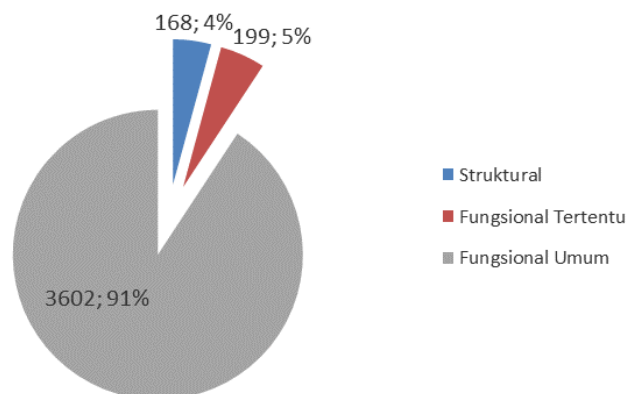
Dari 41 Unit Kerja yang mendukung Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dipetakan dalam beberapa analisa, antara lain:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin:

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	168	15	183	91,80	8,20	100
2	Fungsional Tertentu	199	77	276	72,10	27,90	100
3	Fungsional Umum	3602	1119	4721	76,30	23,70	100
JUMLAH		3969	1211	5180	76,62	23,38	100

Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Status Kepegawaian

**Persentase Komposisi SDM Ditjen HubDat menurut
Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

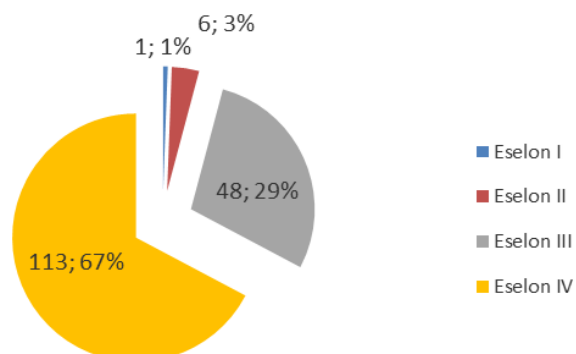


2. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

No	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon I	1	0	1	100,00	0,00	100,00
2	Eselon II	6	0	6	100,00	0,00	100,00
3	Eselon III	48	6	54	88,89	11,11	100,00
4	Eselon IV	113	9	122	92,62	7,38	100,00
JUMLAH		168	15	183	91,80	8,20	100,00

*Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan
Eselon*

**Persentase Komposisi SDM HubDat menurut
Eselon dan Jenis Kelamin**

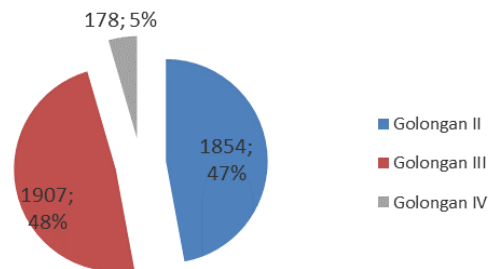


3. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan I	30	0	30	100,00	0,00	100,00
2	Golongan II	1854	630	2484	74,64	25,36	100,00
3	Golongan III	1907	557	2464	77,39	22,61	100,00
4	Golongan IV	178	24	202	88,12	11,88	100,00
JUMLAH		3969	1211	5180	76,62	23,38	100,00

Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Golongan

Persentase Komposisi SDM HubDat menurut Golongan dan Jenis Kelamin

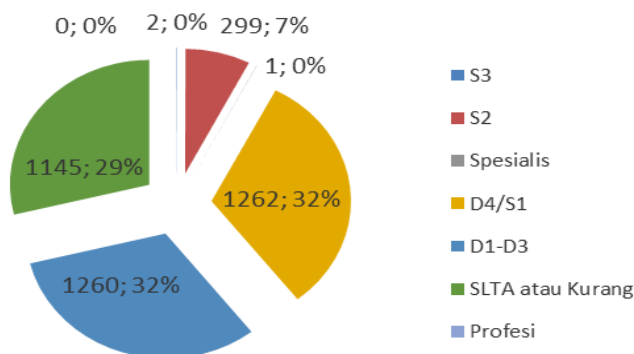


4. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S3	2	0	2	100,00	0,00	100,00
2	S2	299	81	380	78,68	21,32	100,00
3	Spesialis	1	2	3	33,33	66,67	100,00
4	D4/S1	1262	400	1662	75,93	24,07	100,00
5	D1-D3	1260	647	1907	66,07	33,93	100,00
6	SLTA atau Kurang	1145	81	1226	93,39	6,61	100,00
7	Profesi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3969	1211	5180	76,62	23,38	100,00

Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Persentase Komposisi SDM HubDat menurut
Tk. Pendidikan dan Jenis Kelamin**



5. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan Usia (18-25, 26-58, 59-65) dan Jenis Kelamin

No	Data Pegawai Menurut Usia	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Usia 18-25	928	479	1407	65,96	34,04	100,00
2	Usia 26-58	3037	732	3769	80,58	19,42	100,00
3	Usia 59-65	4	0	4	100,00	0,00	100,00
JUMLAH		3969	1211	5180	76,62	23,38	100

Tabel Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Usia

6. Manajemen Kepegawaian

- a. Perencanaan dan Pengadaan Pegawai

- 1) Kebutuhan 5 (lima) Tahun

Kebutuhan Pegawai ASN Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 s.d 2028 adalah sebagai berikut:

ABK	PNS	PPPK	KEBUTUHAN
8.676	5.169	317	3.190

Jumlah Pemenuhan ASN di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat dalam 5 Tahun (2024 s.d 2028) adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kebutuhan
1	2024	1.238
2	2025	892
3	2026	555
4	2027	332
5	2028	173
	TOTAL	3.190

2) Formasi Pola Pembibitan

Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat Pola Pembibitan sebanyak 563 CPNS dengan perincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	DIT LALU LINTAS	2
2	DIT ANGKUTAN JALAN	2
3	DIT PRASARANA	2
4	DIT SARANA	2
5	DIT TSDP	9
6	BPLJSKB	9
7	BPTD KELAS II ACEH	13
8	BPTD KELAS II SUMUT	9
9	BPTD KELAS II SUMBAR	17
10	BPTD KELAS II RIAU	16
11	BPTD KELAS II KEPRI	42
12	BPTD KELAS II JAMBI	12
13	BPTD KELAS II SUMSEL	10
14	BPTD KELAS II LAMPUNG	19
15	BPTD KELAS II BANTEN	8
16	BPTD KELAS II JABAR	5
17	BPTD KELAS II JATENG	5
18	BPTD KELAS II JATIM	5
19	BPTD KELAS II BALI	10
20	BPTD KELAS II NTB	45
21	BPTD KELAS II NTT	8
22	BPTD KELAS II KALBAR	13
23	BPTD KELAS II KALSEL	12

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
24	BPTD KELAS II KALTENG	8
25	BPTD KELAS II KALTIM	15
26	BPTD KELAS II SULTRA	29
27	BPTD KELAS II SULSEL	15
28	BPTD KELAS II SULTENG	13
29	BPTD KELAS II GORONTALO	7
30	BPTD KELAS II SULUT	13
31	BPTD KELAS II MALUKU	15
32	BPTD KELAS II MALUT	14
33	BPTD KELAS II PAPUA	23
34	BPTD KELAS II PAPUA BARAT	15
35	KSOPP DANAU TOBA	15
36	BPTD KELAS III BENGKULU	26
37	BPTD KELAS III BABEL	21
38	BPTD KELAS III YOGYAKARTA	24
39	BPTD KELAS III KALTARA	22
40	BPTD KELAS III SULBAR	13
TOTAL		563

Berikut ini adalah rencana penerimaan Pola Pembibitan Tahun 2024

JENJANG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN			
		2024	2025	2026	2027
DIII	Manajemen Logistik	46	47	1	2
	Manaj Trans Jalan	100	126	36	39
	Manaj Trans Perairan Daratan	118	51	41	42
	Studi Nautika	110	169	19	15
	Permesinan Kapal	72	74	24	11
	Teknologi Otomotif	103	100	49	47
	Manajemen Trans Perkeretaapian				
DIV	Rekayasa Sistem Transportasi	54	55	57	36

JENJANG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN			
		2024	2025	2026	2027
	Tekn Rekayasa Otomotif	59	60	108	15
	Transdar	61	45	65	44
	TOTAL	723	727	400	251

3) Formasi PPPK

Tahun 2023 Ditjen Perhubungan Darat mendapat PPPK sejumlah 317 dengan perincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	SETDITJEN	4
2	DIT LALU LINTAS	3
3	DIT ANGKUTAN JALAN	6
4	DIT PRASARANA	4
5	DIT SARANA	2
6	DIT TSDP	4
7	BPLJSKB	1
8	BPTD KELAS II ACEH	8
9	BPTD KELAS II SUMUT	8
10	BPTD KELAS II SUMBAR	3
11	BPTD KELAS II RIAU	1
12	BPTD KELAS II KEPRI	1
13	BPTD KELAS II JAMBI	2
14	BPTD KELAS II SUMSEL	4
15	BPTD KELAS II LAMPUNG	12
16	BPTD KELAS II BANTEN	13
17	BPTD KELAS II JABAR	51
18	BPTD KELAS II JATENG	66
19	BPTD KELAS II JATIM	67
20	BPTD KELAS II BALI	20
21	BPTD KELAS II NTB	6
22	BPTD KELAS II NTT	4
23	BPTD KELAS II KALSEL	4
24	BPTD KELAS II KALTENG	1

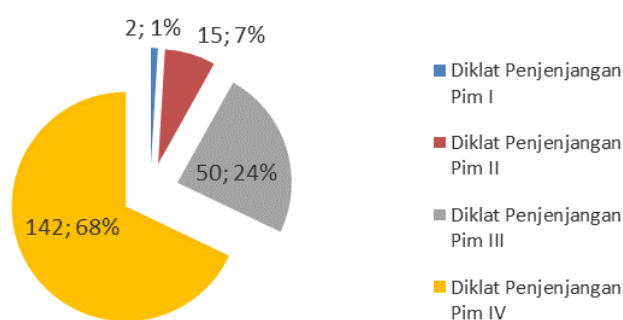
NO	UNIT KERJA	JUMLAH
25	BPTD KELAS II SULSEL	5
26	BPTD KELAS II SULUT	1
27	BPTD KELAS II PAPUA BARAT	1
28	BPTD KELAS II BENGKULU	1
29	BPTD KELAS III YOGYAKARTA	14
TOTAL		317

III. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan keikutsertaan dalam Diklat Teknis/ Administrasi/ Penjenjangan dan Jenis Kelamin

No	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan						
	Diklat Penjenjangan Pim I	2	0	2	100,00	0,00	100,00
	Diklat Penjenjangan Pim II	15	0	15	100,00	0,00	100,00
	Diklat Penjenjangan Pim III	50	4	54	92,59	7,41	100,00
	Diklat Penjenjangan Pim IV	142	26	168	84,52	15,48	100,00
JUMLAH		209	30	239	87,45	12,55	100,00

Persentase Komposisi SDM HubDat menurut
Keikutsertaan dalam Diklat
Teknis/Administrasi/Penjenjangan dan Jenis Kelamin



No	Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Diklat PPNS	80	10	90	88,89	11,11	100,00
	Diklat Dasar PKB	26	4	30	86,67	13,33	100,00
	Diklat Operator Jembatan Timbang	0	0	0	0	0	0
	Diklat Teknis Dasar	26	4	30	86,67	13,33	100,00
	Sub Jumlah	132	18	150	88,00	12,00	100,00
2	Pendidikan/Pelatihan Adm						
	Diklat Bendahara	0	0	0	0	0	0
	Diklat Pengelola Anggaran	0	0	0	0	0	0
	Diklat Fungsional Penerjemah	0	0	0	0	0	0
	Diklat Bahasa Inggris	0	0	0	0	0	0
	Diklat Pengacara	0	0	0	0	0	0
	Diklat Keuangan	0	0	0	0	0	0
	Diklat Barang dan Jasa	21	4	25	84,00	16,00	100,00
	Sub Jumlah	21	4	25	84,00	16,00	100,00
	JUMLAH	153	22	175	87,43	12,57	100,00

2. Jumlah Perekrutan Sumber Daya Manusia pada 3 (Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tahun	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Tahun 2023						
	S2	0	0	0	0	0	0
	Spesialis	0	0	0	0	0	0
	D4-S1	92	36	128	71,88	28,13	100,00
	D1-D3	314	137	451	69,62	30,38	100,00
	SMA	1	0	1	100,00	0,00	100,00

	Sub Jumlah	407	173,00	580	70,17	29,83	100,00
2	Tahun 2022						
	S2	0	1,00	1	0,00	100,00	100,00
	Spesialis	0	0	0	0	0	0
	D4-S1	141	66	207	68,12	31,88	100,00
	D1-D3	569	297	866	65,70	34,30	100,00
	SMA	61	1	62	98,39	1,61	100,00
	Sub Jumlah	771	365	1136	67,87	32,13	100,00
3	Tahun 2021						
	S2	0	0	0	0	0	0
	Spesialis	0	0	0	0	0	0
	D4-S1	0	0	0	0	0	0
	D1-D3	87	62	149	58,39	41,61	100,00
	SMA	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah	87	62	149	58,39	41,61	100,00
	JUMLAH	1265	600	1865	67,83	32,17	100,00

3. Jumlah Perekrutan Sumber Daya Manusia pada 3 (Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan Unit Kerja, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin

No	Direktorat (Fungsional)	Jumlah Pegawai			Persentase Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Setditjen Hubdat	6	11	17	35,29	64,71	100,00
2	Direktorat Lalu Lintas Jalan	3	3	6	50,00	50,00	100,00
3	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	7	2	9	77,78	22,22	100,00
4	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	4	4	8	50,00	50,00	100,00
5	Direktorat Angkutan Jalan	4	3	7	57,14	42,86	100,00
6	Direktorat TSDP	8	11	19	42,11	57,89	100,00
7	BPLJSKB Bekasi	24	13	37	64,86	35,14	100,00
8	BPTD Kelas II Aceh	32	15	47	68,09	31,91	100,00

9	BPTD Kelas II Sumatera Utara	42	22	64	65,63	34,38	100,00
10	BPTD Kelas II Sumatera Barat	43	9	52	82,69	17,31	100,00
11	BPTD Kelas II Riau	35	25	60	58,33	41,67	100,00
12	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	25	17	42	59,52	40,48	100,00
13	BPTD Kelas II Jambi	26	12	38	68,42	31,58	100,00
14	BPTD Kelas III Bengkulu	13	15	28	46,43	53,57	100,00
15	BPTD Kelas II Lampung	39	27	66	59,09	40,91	100,00
16	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	51	30	81	62,96	37,04	100,00
17	BPTD Kelas III Bangka Belitung	12	9	21	57,14	42,86	100,00
18	BPTD Kelas II Banten	42	33	75	56,00	44,00	100,00
19	BPTD Kelas II Jawa Barat	49	26	75	65,33	34,67	100,00
20	BPTD Kelas II Jawa Tengah	57	29	86	66,28	33,72	100,00
21	BPTD Kelas III DI Yogyakarta	11	13	24	45,83	54,17	100,00
22	BPTD Kelas II Jawa Timur	62	53	115	53,91	46,09	100,00
23	BPTD Kelas II Bali	47	26	73	64,38	35,62	100,00
24	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat	27	18	45	60,00	40,00	100,00
25	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur	36	16	52	69,23	30,77	100,00
26	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	37	16	53	69,81	30,19	100,00
27	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	26	17	43	60,47	39,53	100,00

28	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	34	15	49	69,39	30,61	100,00
29	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	57	18	75	76,00	24,00	100,00
30	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	21	1	22	95,45	4,55	100,00
31	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	55	9	64	85,94	14,06	100,00
32	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	52	18	70	74,29	25,71	100,00
33	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	12	1	13	92,31	7,69	100,00
34	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	38	9	47	80,85	19,15	100,00
35	BPTD Kelas II Gorontalo	32	9	41	78,05	21,95	100,00
36	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	41	9	50	82,00	18,00	100,00
37	BPTD Kelas II Maluku	39	18	57	68,42	31,58	100,00
38	BPTD Kelas II Maluku Utara	45	7	52	86,54	13,46	100,00
39	BPTD Kelas II Papua	54	7	61	88,52	11,48	100,00
40	BPTD Kelas II Papua Barat	17	0	17	100,00	0,00	100,00
41	KSOPP Danau Toba	6	9	15	40,00	60,00	100,00
JUMLAH		1271	605	1876	67,75	32,25	100,00

4. Pangkat dan Jabatan

- a. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

- b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya terkait dengan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara maka perlu menambah periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Periodisasi kenaikan pangkat sebanyak 6 kali dalam 1 tahun mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Ke 6 periode tersebut yaitu Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember.
- c. Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiunan PNS/ Pejabat Negara telah mengalami perubahan yang semula berupa berkas hardcopy menjadi dokumen digital. Sesuai dengan SE 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:
 - 1) Proses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
 - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Kenaikan Pangkat yang ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan format dalam SIASN setelah mendapatkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - 3) Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
 - 4) Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja.
 - 5) Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai yang melaksanakan manajemen kepegawaian pada tahun 2023 telah menyelesaikan sebanyak 828 usulan dengan rincian:

- 1) Kenaikan pangkat pilihan (struktural, fungsional tertentu dan penyesuaian ijazah) sebanyak 117 SK;
- 2) Kenaikan pangkat reguler (KPO) sebanyak 711 SK.

5. Pengembangan Karir

Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Berkaca dari hal tersebut maka terbitlah Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 28 tahun 2021.

1) Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier. Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Instansi. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai PNS tugas belajar. Dengan diterbitkannya SE 28 tahun 2021 maka istilah Ijin Belajar tidak lagi digunakan. Keseluruhan pengembangan kompetensi melalui pendidikan adalah Tugas Belajar. Yang membedakan hanyalah apakah pegawai yang bersangkutan meninggalkan tugas atau tetap dalam tugas. Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:

- a) Anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b) Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau;
- c) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK;
- e) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pada point 5 SE 28 tahun 2021 disebutkan bahwa Tugas Belajar memiliki Jangka waktu yang harus diselesaikan. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Jangka waktu yang dihabiskan untuk menjalani tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian SDM dan Umum sebagai yang melaksanakan manajemen kepegawaian pada tahun 2023 telah mengusulkan penerbitan Surat Tugas Belajar kepada Biro SDM dan Organisasi sebanyak 78 usulan dengan rincian:

- a) Tugas Belajar Meninggalkan Tugas sebanyak 19 Pegawai;
- b) Tugas Belajar Tidak Meninggalkan Tugas sebanyak 59 Pegawai.

2) Ujian Dinas

Ujian Dinas merupakan syarat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Ujian Dinas Tk.I untuk kenaikan dari Pengatur Tk.I (II/d) ke Penata Muda (III/a) dan Ujian Dinas Tk.II untuk Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a). Pada tahun 2023 Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Setditjen Perhubungan Darat mengadakan Ujian Dinas Tk.I sebanyak 5 angkatan. Ujian Dinas Angkatan I s.d. V diadakan pada tanggal 21 Agustus s.d. 21 September 2023. Dari jumlah peserta sebanyak 215 orang pegawai yang sudah mengikuti pembekalan dan pelaksanaan ujian dinas Tk.I yang dinyatakan lulus adalah sebanyak 208 orang dan 7 orang dinyatakan tidak lulus.

3) Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan DIPA Satker Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian SDM dan Umum dialokasikan anggaran Pendidikan dan Pelatihan Teknis sebesar Rp.12.132.200.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dari anggaran dimaksud, Bagian SDM dan Umum telah menyelenggarakan Diklat antara lain: Diklat teknis prioritas dan Diklat teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023. Untuk pelaksanaan Diklat teknis prioritas dan Diklat teknis penunjang secara penuh diberikan dukungan biaya Diklat dari DIPA Satker Sekretariat Ditjen Perhubungan Darat sedangkan untuk biaya transportasi dan uang harian Diklat dibebankan pada DIPA Unit Kerja masing-masing pengirim peserta diklat. Dapat kami laporkan juga bahwa dalam rangka operasional 8 (delapan) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) baru, sebagai dampak pengembangan organisasi dari 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka Setditjen Perhubungan Darat melalui bagian SDM dan Umum telah menyelenggarakan Diklat pengelolaan anggaran baik Diklat

Bendahara maupun Diklat Pengadaan Barang dan Jasa difasilitasi oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan operasional BPTD tersebut, khususnya dalam bidang pengelolaan anggaran. Adapun Diklat teknis prioritas dan Diklat Teknis serta Diklat Manajerial atau penunjang sebagaimana dimaksud, antara lain sebagai berikut:

Berikut Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2023:

NO.	NAMA DIKLAT	TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
1	MARINE INSPECTOR	BPPTL, Jagakarsa / 13 Februari s.d. 20 Maret 2023	30
2	LOCAL PORT SERVICE	BPPTL, Jagakarsa / 23 Mei s.d 10 Juni 2023	30
3	KESYAHBANDARAN	BPPTL, Jagakarsa / 13 Februari s.d. 20 Maret 2023	30
4	KEBANGSAAN KAPAL	Poltektrans SDP Palembang / 7 Februari s.d 14 Maret 2023	30
5	DASAR-DASAR SYAHBANDAR	Poltektrans SDP Palembang / 7 s.d 23 Februari 2023	30
6	PPNS POLA 200 JP	Lemdiklat POLRI Megamendung/4 s.d 31 Mei 2023	30
7	PPNS POLA 400 JP Gelombang I DAN II	Lemdiklat POLRI Megamendung/9 Oktober s.d 7 Desember 2023	58
8	PETUGAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	Poltrada Bali/20 s.d 25 November 2023	30
9	PENGELOLA TERMINAL	Poltrada Bali/20 s.d 25 November 2023	20

NO.	NAMA DIKLAT	TEMPAT/TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA
10	PENGADAAN BARANG DAN JASA	Poltektrans SDP Palembang/22 s.d 25 November 2023	25
11	ASESSOR KOMPETENSI	Jakarta/4 s.d 08 Desember 2023	24
Jumlah Pegawai Memiliki Kompetensi			337

Jumlah PNS dan PPNP di lingkungan Ditjen Perhubungan darat yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial sebanyak 337 pegawai.

Berdasarkan hasil pemetaan jenis diklat dan ketersediaan anggaran Diklat secara umum beberapa kendala dan masukan dalam pelaksanaan diklat adalah sebagai berikut:

- a) Terkait dengan biaya transportasi dan uang harian pelaksanaan diklat, untuk beberapa UPT tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan beberapa Diklat prioritas tahun 2024 tidak hanya menanggung biaya diklat akan tetapi menanggung uang harian dan biaya transportasi peserta Diklat.
- b) Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dimana pegawai mempunyai hak dan kewajiban terkait pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP setahun. Hal tersebut untuk memenuhi kesenjangan penilaian pada Indeks Profesionalitas ASN karena salah satu dimensinya adalah pemenuhan 20 JP pada pegawai. Dapat kami informasikan juga bahwa PNS di Ditjen Perhubungan Darat berjumlah 4.772 Orang, sehingga untuk tahun anggaran 2024 diperlukan penambahan anggaran agar seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat memenuhi minimal standar 20 JP setiap pegawai.
- c) Serta sehubungan dengan adanya peralihan kewenangan keselamatan pelayaran angkutan penyeberangan, yang semula tugas pokok dan fungsi kewenangan keselamatan dan keamanan pelayaran SDP berada pada Ditjen Perhubungan Laut beralih menjadi kewenangan Ditjen Perhubungan Darat, dimana hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor PM 17 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara

Pelabuhan, oleh karena itu masih dibutuhkan diklat-diklat untuk menunjang tugas pokok dan fungsi terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran SDP seperti diklat LPS (Local Port Service) pada 8 (delapan) lokasi BPTD di lingkungan Perhubungan Darat, yang mana menjadi prioritas Pembangunan dikarenakan termasuk dalam 7 lintas utama penyeberangan yang memiliki volume lalu lintas penyeberangan yang cukup tinggi serta Lokasi Pelabuhan yang melayani lebih dari 1 (satu) lintasan.

- d) Selain itu juga dimana Ditjen Perhubungan Darat belum memiliki SDM yang berkompetensi mengenai pelaksana Surveyor alur, yang dimana selama ini untuk melakukan survey penetapan alur pelayaran dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran), Ditjen Perhubungan Darat masi memerlukan rekomendasi teknis dari Direktorat navigasi Ditjen Perhubungan Laut untuk pelaksanaan. Dengan adanya hal tersebut, menyebabkan pelaksanaan survey penetapan alur pelayaran dan SBNP memerlukan waktu yang cukup lama.
- e) Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2023 perihal Organisasi dan Tata Kerja Balai Transportasi Darat, dapat kami sampaikan bahwa Ditjen Perhubungan Darat memiliki Satuan Pelayanan sebanyak 165 di bidang Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan, 141 di bidang Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 113 di bidang Terminal Tipe A serta 7 di bidang Terminal Barang. Dan dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan ZI dan Evaluasi ZI Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kriteria penilaian utama dalam persyaratan pembangunan Zona integritas menuju WBK di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, maka diperlukan pelatihan terkait peningkatan pelayanan prima yang berkelanjutan.
- f) Berdasarkan 5 pilar Rencana Umum Nasional (RUNK) yang dimana pada pilar 3 yaitu kendaraan yang berkeselamatan yang merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, oleh karena itu dibutuhkan seorang assessor penguji yang tersertifikasi untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat guna untuk menghasilkan SDM yang profesional dalam bidang Transportasi dan Keselamatan, oleh karena itu dipandang perlu diadakan pelaksanaan peningkatan Pendidikan dan pelatihan serta Kompetensi SDM di lingkungan Ditjen Perhubungan meliputi diklat LPS, SBNP, Hospitality dan Asessor Kompetensi.

IV. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN UNIT KERJA

1. Promosi

Untuk kegiatan promosi jabatan dalam setiap tahunnya memiliki jumlah yang berbeda dan tidak ada batasan karena dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi. Pada Tahun 2022 terdapat pegawai yang promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu:

- a. Staf yang promosi menjadi Pejabat Eselon IV sebanyak 10 orang;
- b. Pejabat Eselon IV yang promosi menjadi Pejabat Eselon III sebanyak 7 orang.

2. Mutasi

a. Mutasi Eksternal

Perpindahan tugas dan/atau lokasi dari pegawai Instansi Daerah ke Instansi Pusat mulai tahun 2021 proses mutasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilaksanakan melalui Menteri Perhubungan akan diseleksi dan dilakukan *assessment* namun sampai tahun 2022 proses mutasi antar instansi sedang diberhentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

b. Mutasi Internal

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai dan pembinaan kepegawaian, Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum telah melaksanakan mutasi pegawai secara internal antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat baik di kantor pusat maupun di unit kerja yang ada di daerah. Mengingat perubahan kebutuhan pegawai pada unit kerja sangat cepat baik dari segi kuantitas maupun kompetensi pegawai maka dari itu pola mutasi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat masih sangat fluktuatif berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara segera. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan mutasi internal yang diproses di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

- 1) Alasan pribadi seperti mengikuti suami, mendekatkan diri dengan keluarga atau karena sakit keras;
- 2) Terkait kebutuhan pegawai pada unit kerja baik pemenuhan secara kuantitas dikarenakan kekurangan pegawai terutama pada satuan pelayanan dikarenakan terdapat penambahan beberapa satuan pelayanan yang beroperasi di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat;

- 3) Untuk memenuhi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu seperti pengelola keuangan, PPNS dan lain-lain untuk optimalisasi tugas dan fungsi di lapangan;
- 4) Pembinaan kepegawaian berkaitan dengan para pegawai yang dimutasi karena dikenai sanksi hukuman disiplin.

Beberapa pertimbangan di atas tentunya juga tetap melalui persetujuan dari Kepala Kantor Unit Kerja masing-masing pegawai dan juga memperhatikan komposisi pegawai yang ada sehingga tidak terjadi ketimpangan baik secara jumlah maupun kualitas.

Selain pelaksanaan mutasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Bagian SDM dan Umum juga telah mengkonsep peraturan terkait mutasi internal dalam bentuk Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor KP-DRJD 3889 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuan dari diterbitkannya peraturan dimaksud adalah selain sebagai pedoman pengajuan mutasi pegawai juga untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan mutasi pegawai.

Selama tahun 2023 Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum telah melaksanakan pemindahan pegawai antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 110 pegawai.

3. Pengelolaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil maka dasar penilaian sebelumnya yaitu Permenpan 8 Tahun 2021 sudah tidak digunakan lagi. Beberapa hal penting yang berubah dari aturan sebelumnya kepada Permenpan 6 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Kesatu adalah pada ruang lingkup pengelolaan. Sebelumnya ruang lingkup pengelolaan kinerja berfokus pada PNS saja, namun pada PermenPANRB 6/2022, ruang lingkup pengelolaan kinerjanya mencakup seluruh ASN yaitu PNS dan PPPK.
- b. Perubahan Kedua dapat dilihat pada tahapan. Tahapan pertama yaitu perencanaan kinerja. Sebelumnya meliputi perencanaan dan penetapan SKP, sedangkan perencanaan kinerja pada PermenPANRB 6/2022 meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Tahapan kedua adalah Pelaksanaan,

Pemantauan, dan Penilaian kinerja pegawai yang meliputi bimbingan dan konseling kinerja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Tahapan ketiga adalah penilaian kinerja yang meliputi penilaian SKP dan perilaku kerja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 meliputi evaluasi kinerja pegawai. Tahapan keempat yaitu tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang meliputi penghargaan dan sanksi.

- c. Perubahan Ketiga dilihat pada perilaku kinerja dimana sebelumnya meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama dan kepemimpinan, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 perilaku kerjanya disesuaikan dengan *core value* ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
- d. Perubahan Keempat yaitu standar perilaku kerja yang sebelumnya ditetapkan sesuai jenjang jabatan dalam bentuk level, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 panduan perilaku pada *core values* ASN tanpa pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku ASN.
- e. Perubahan Kelima adalah pada format SKP. Pada PermenPANRB 8/2021 terdapat 2 (dua) model SKP yaitu Model Dasar dan Model Pengembangan dengan pendekatan kuantitatif dan SKP adalah rencana kinerja (hasil kerja) saja, sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 model SKP menggunakan pendekatan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta SKP adalah rencana kinerja yang memuat hasil kerja dan perilaku kerja.
- f. Perubahan Keenam adalah pada penilaian kinerja. Pada PermenPANRB 8/2021 penilaian kinerja menggunakan rumus matematis, pembobotan *cascading direct* dan *non-direct*, serta pembobotan kinerja utama dan tambahan. Sedangkan pada PermenPANRB 6/2022 menggunakan kuadran kinerja, metode cascading, dan tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu pada kinerja.
- g. Perubahan Ketujuh adalah pada PermenPANRB 6/2022 kinerja JF tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit. Kemudian untuk ketentuan peralihan, manajemen kinerja pegawai periode bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2021 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Untuk tingkat Kementerian Perhubungan sebagai tindak lanjut dari Permenpan RB nomor 6 Tahun 2022 telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja pegawai dilingkungan kementerian perhubungan.

Pengelolaan Kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan kinerja sumber daya manusia yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai. Terbitnya KM 254 Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai serta bertujuan untuk terwujudnya kesamaan pola pikir

dan tata cara dalam melakukan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada KM 254 sudah dibahas keseluruhan aturan dan tata cara pengelolaan kinerja pegawai sehingga pengelolaan bisa lebih baik dan sesuai. Menindaklanjuti diterbitkannya KM 254 Tahun 2022 lahirlah aplikasi E-Kinerja Kemenhub sebagai pengganti aplikasi AP2KP untuk sarana pelaporan kinerja pegawai di Kementerian Perhubungan. Aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan digunakan oleh pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk melakukan pelaporan terkait kinerja pegawai pada masing-masing unit kerja, serta sebagai sarana untuk melakukan penilaian kinerja pegawai yang merupakan dasar dari perhitungan tunjangan kinerja. Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Kinerja BKN adalah aplikasi berbagi pakai berbasis elektronik yang memuat tahapan pengelolaan kinerja pegawai ASN, terdiri dari:

- a. Perencanaan kinerja pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai ASN;
- c. Penilaian kinerja pegawai ASN;
- d. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai ASN.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Aplikasi E-Kinerja wajib digunakan oleh seluruh unit kerja mulai bulan November 2023 dan menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja yang dibayarkan mulai Januari Tahun 2024. Bagian SDM dan Umum sebagai yang bertanggung jawab untuk melakukan diseminasi atau sosialisasi penggunaan aplikasi e-Kinerja kepada seluruh pegawai paling kurang selama masa uji coba penggunaan aplikasi E-Kinerja berlangsung telah melaksanakan 3 kali kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dengan dilaksanakannya acara sosialisasi tersebut, diharapkan aplikasi E-Kinerja dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan menjadi lebih efisien dalam perencanaan perencanaan kinerja hingga pembayaran tunjangan kinerja.

Selanjutnya dalam pemanfaatan aplikasi E-Kinerja sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain baik yang internal Kemenhub atau Instansi lain sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Kepegawaian (SIK), sebagai referensi data base kepegawaian;
- b. E-Performance yang dipegang oleh Bagian Perencanaan untuk sinkronisasi Perjanjian Kerja yang menjadi dasar pembagian kerja melalui matrik pembagian peran hasil;
- c. E-Monitoring oleh Bagian Keuangan, sebagai dasar penilaian realisasi anggaran untuk pimpinan unit kerja;
- d. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN, percepatan layanan kepegawaian dalam SIASN seperti layanan kenaikan pangkat dan layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan SIASN, tanpa perlu mengunggah dokumen atau melakukan penyelarasan/sinkronisasi data penilaian kinerja.

4. Penggajian dan Tunjangan

Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan meliputi pembayaran gaji, uang makan, tunjangan kinerja, dan uang lembur. Pada tahun anggaran 2023 Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum mengelola kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi 12 (dua belas) unit kerja sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- c. Direktorat Angkutan Jalan;
- d. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- e. Direktorat Sarana Transportasi Jalan;
- f. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan;
- g. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh;
- h. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
- i. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku;
- j. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara;
- k. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua;
- l. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat.

Untuk tahun anggaran 2023, Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengelola kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan dengan pagu Rp. 111.077.306.000,- yang digunakan untuk membayarkan gaji, uang makan, tunjangan kinerja, dan uang lembur bagi 1.013 orang PNS dan 4 orang PPPK di

lingkungan Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	CPNS	PNS	PPPK	Grand Total
1	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh	13	120	3	136
2	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat	13	66		79
3	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku	15	61		76
4	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara	14	98		112
5	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua	23	29		52
6	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	17	38	1	56
7	Direktorat Angkutan Jalan	2	59		61
8	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1		1
9	Direktorat Lalu Lintas Jalan	2	64		66
10	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	2	58		60
11	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	2	75		77
12	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9	89		98

No	Unit Kerja	CPNS	PNS	PPPK	Grand Total
13	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1	142		143
Grand Total		113	900	4	1017

Realisasi penyerapan anggaran Belanja Pegawai tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023 sebesar 98,76%. Perhitungan penilaian tunjangan kinerja menggunakan dasar PM 46 Tahun 2023. Perhitungan tunjangan kinerja dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas perhitungan capaian kinerja Pegawai dengan unsur disiplin dan unsur prestasi kerja. Perhitungan dari unsur disiplin kerja sebesar 40% yang terdiri dari aspek jumlah keterambatan dan pulang cepat, jumlah hari tidak hadir dan pengenaan hukuman disiplin. Perhitungan tunjangan kinerja dari unsur Prestasi Kerja sebesar 60% yang terdiri dari aspek predikat kinerja pegawai, ketepatan waktu laporan bulanan dan perkembangan realisasi penyerapan anggaran. Prestasi kerja pegawai dihitung menggunakan aplikasi E-Kinerja. Sesuai dengan SE 18 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi E-Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana aplikasi e-kinerja wajib digunakan pada bulan November 2023 dan menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Bagian SDM dan Umum Setditjen Perhubungan Darat telah melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sosialisasi dilakukan secara langsung/ tatap muka di Jakarta dengan mengundang perwakilan dari masing-masing unit kerja. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap pertama dilakukan untuk unit kerja di Kantor Pusat Ditjen Darat pada tanggal 11-12 Juli 2023. Tahap kedua dilakukan untuk unit kerja di wilayah Jawa dan Sumatera pada tanggal 27-28 Juli 2023. Tahap ketiga dilakukan untuk unit kerja di wilayah Kalimantan dan wilayah Timur.

5. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas. Jenis Penghargaan yang telah diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

a. Penghargaan Satyalencana Karya Satya

Dasar peraturan pemberian penghargaan pegawai negeri sipil adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat

Edaran Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada para PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan serta prestasi kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Usulan penghargaan pada tahun 2023 sebanyak 246 usulan yang diusulkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Adapun rincian Satyalencana Karya Satya yang terbit sebagai berikut:

- 1) Satyalencana Karya Satya XXX tahun sebanyak 74 penghargaan;
 - 2) Satyalencana Karya Satya XX tahun sebanyak 48 penghargaan;
 - 3) Satyalencana Karya Satya X tahun sebanyak 124 penghargaan.
- b. Penghargaan kepada PNS dalam bentuk bantuan uang muka pembelian rumah (tapera)

Dasar peraturan penghargaan ini adalah Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat. Penghargaan ini diberikan bagi PNS yang telah memiliki masa kerja diatas 5 (lima) tahun. Penghargaan berupa bantuan uang muka pembiayaan rumah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan agar dapat memiliki rumah yang layak. Jika selama menjadi PNS tidak pernah memanfaatkan tapera maka akan dilakukan pengembalian dana setelah PNS memasuki masa pensiun. Selama Tahun 2023 terdapat 217 pegawai yang menerima pengembalian dana tapera.

6. Disiplin

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan tentang disiplin pegawai negeri sipil, Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil tentu berkaitan dengan pembinaan pegawai karena adanya pegawai PNS yang tidak mematuhi kewajiban dan adanya pelanggaran. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai berdasarkan adanya laporan aduan dengan melaksanakan pemanggilan, klarifikasi/meminta keterangan, membuat laporan hasil pemeriksaan sampai keluarnya sanksi berupa surat keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat sesuai dengan jenis kasus dan pelanggarannya. Adapun jenis kasus pelanggaran disiplin dalam proses

pemeriksaan maupun sudah di proses dan menunggu keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1	Tidak melaksanakan tugas/Absensi	11
2	Narkoba	3
3	Perselingkuhan	0
4	Tipikor /Penipuan/Pungli	5
5	Pelecehan	1
6	Pengrusakan barang	0
7	Pencurian/maling	0
8	Pemalsuan	1
9	Tuntutan Hak	0
10	Penyalahgunaan Wewenang	1
11	Perceraian	3
12	Piutang	0
TOTAL		25

Berdasarkan uraian di atas dari jumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus yang paling banyak jenis kasus adalah kasus tidak melaksanakan tugas/absensi sebanyak 11 (sebelas) pegawai. Dari banyaknya jenis kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yang dalam proses menunggu keputusan maupun sudah keluarnya keputusan hukuman disiplin berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
1	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN	
	Teguran Lisan	1
	Teguran Tertulis	1
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2
2	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG	
	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	0
	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	0

NO	NAMA JENIS HUKUMAN DISIPLIN	TOTAL
	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	0
	Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun	1
	Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun	0
	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	6
3	HUKUMAN DISIPLIN BERAT	
	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	3
	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	0
	Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri sebagai PNS	5
	Pemberhentian sementara karena menjadi tahanan pidana	4
	JUMLAH	21

7. Pemberhentian

Dasar aturan Pemberhentian adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian PNS meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena pelanggaran disiplin, dan pemberhentian karena meninggal dunia. Pada Tahun 2023 pemberhentian atas permintaan sendiri sebanyak 4 (empat) pegawai, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) pegawai, pemberhentian karena pelanggaran disiplin sebanyak 5 (lima) pegawai, dan pemberhentian karena meninggal dunia sebanyak 23 (dua puluh tiga) pegawai.

8. Jaminan Pensiun dan Hari Tua

PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pada Tahun 2023 sebanyak 217 PNS mendapat Jaminan pensiun dan hari tua

sedangkan 9 (Sembilan) PNS tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua karena masa kerja saat pemberhentian menjadi PNS belum memenuhi 20 tahun dan umur saat pensiun belum mencapai 50 tahun.

9. Perlindungan

Perlindungan ASN meliputi perlindungan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Usulan BPJS Tahun 2023 dilakukan secara 2 (dua) mekanisme yaitu melalui aplikasi PANDAWA dimana masing-masing ASN melakukan registrasi secara mandiri dan diusulkan secara kolektif oleh PIC Setditjen Perhubungan Darat yang telah terdaftar di BPJS. Usulan BPJS PNS tahun 2023 sebanyak 15 (lima belas) usulan melalui PIC Setditjen Perhubungan Darat.

10. Update Sistem Informasi Kepegawaian (SIK)

Kementerian Perhubungan telah melakukan perbaikan dan penambahan menu pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dengan menambahkan fitur integrasi dengan aplikasi SIASN BKN pada menu Jabatan dan Diklat Teknis. Dengan adanya hal tersebut di atas upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan admin SIK dan pegawai di seluruh unit kerja baik lisan maupun tulisan untuk terus update data kepegawaiannya masing-masing guna mendapatkan data dan informasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat guna kepentingan pengambilan Keputusan yang diperlukan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO.5
JAKARTA, 10110

Telp. : (021) 3506136,
3506129,
3506145,
3506143,
3506220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor : 529/SDM/VI/2023

Yth. : 1. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Hubdat
2. Para Ketua Tim Substansi di lingkungan Bagian SDM dan Umum
Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum
Hal : Pemutakhiran Data ASN pada Aplikasi SIK Dalam Rangka
Proses Integrasi Data Dengan Aplikasi SIASN BKN
Tanggal : 13 Juni 2023

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan No. KP.001/1/13/DJPD/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Pemutakhiran Data ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) bahwa dalam rangka proses Integrasi Data antara aplikasi SIK dan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) guna mendapatkan data pegawai yang akurat dan *terupdate*.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka proses lanjut integrasi data pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN dengan aplikasi SIK Kementerian Perhubungan rencana integrasi dilakukan secara 2 (dua) arah, dimana data pada aplikasi SIASN dapat diambil oleh SIK maupun sebaliknya, mohon kiranya Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengecek data kepegawaiannya dan melengkapi *softfile* pada aplikasi SIK sesuai dengan menu yang disediakan pada aplikasi tersebut.

Data yang dapat *diupdate* pada aplikasi SIK adalah :

1. Data yang bisa *diupdate* oleh masing-masing pegawai dengan melakukan login pada situs web <https://sik.dephub.go.id/> yaitu
 - a. Photo Pegawai (menu profil dan tugas pribadi – profil pribadi);
 - b. Data Personal (menu profil dan tugas pribadi – profil pribadi);
 - c. Data Diklat Teknis (menu profil dan tugas pribadi – layanan kepegawaian – perubahan data pegawai – diklat teknis/kursus);

- d. Data Kunjungan ke LN (menu profil dan tugas pribadi – layanan kepegawaian – perubahan data pegawai – kunjungan ke LN);
 - e. Data Organisasi yang pernah diikuti (menu profil dan tugas pribadi – layanan kepegawaian – perubahan data pegawai – organisasi);
 - f. Data Berkas Pendukung yang harus diunggah berupa KTP, Akte Kelahiran, Karpeg, Karis Karsu, NPWP, TASPEN dll (menu profil dan tugas pribadi – layanan kepegawaian – perubahan data pegawai – berkas pendukung);
 - g. Data Keluarga baik pasangan, anak, orang tua, mertua, saudara kandung beserta unggahan bukti dukung (menu profil dan tugas pribadi – layanan kepegawaian – perubahan data pegawai – data keluarga);
2. Data yang bisa di update oleh admin SIK di Setditjen Hubdat berupa data pengangkatan CPNS/PNS, riwayat jabatan, riwayat pemberhentian, riwayat pendidikan, riwayat diklat/kursus, riwayat penjenjangan, riwayat penghargaan (Tanda Jasa), riwayat pangkat dan golongan/ruang, riwayat keluarga, riwayat unit kerja, riwayat disiplin, riwayat gaji, riwayat izin/tugas belajar, riwayat tugas khusus, riwayat cuti di luar tanggungan negara (CLTN), riwayat peninjauan masa kerja, riwayat perpindahan wilayah kerja (PWK), riwayat angka kredit, riwayat DP3, riwayat SKP, riwayat pindah instansi, riwayat pasangan dan anak.

Berkaitan butir 2 (dua) diatas, untuk kelancaran kegiatan dimaksud, masing-masing pegawai dapat mengunggah bukti dukung berupa *softfile* dimaksud untuk dapat dilakukan update oleh administrator SIK guna mendapatkan data *terupdate* dengan link *upload* data **<https://bit.ly/SOFTFILESIKSETDITJEN>**, dikarenakan pentingnya kegiatan ini, kami menghimbau agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi data pegawai secara pribadi karena jika data pegawai tidak *terupdate* dapat menyebabkan kerugian kepada pegawai itu sendiri dalam proses kegiatan Manajemen Kepegawai (Kenaikan Pangkat dll).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dadan M. Ramdan, ATD, M.Si
NIP. 19671206 199003 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT, NO.8
JAKARTA, 10110

Telp. (021) 3506138,
3506129,
3506145
3506143,
3862220

FAX : (021) 3507262, 3506129
3506145, 3506143
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Jakarta, 09 Juni 2023

Nomor : KP.001/1/13/DjPD/2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemutakhiran Data ASN pada Aplikasi SIK
Dalam Rangka Proses Integrasi Data
Dengan Aplikasi SIASN BKN

Yth. 1. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubdat;
2. Para Kepala Bagian di lingkungan Setditjen Hubdat;
3. Para Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubdat.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kementerian Perhubungan No. KP.001/2/6/ PHB 2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Pemutakhiran Data ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) bahwa dalam rangka proses Integrasi Data antara aplikasi SIK dan aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) guna mendapatkan data pegawai yang akurat dan *ter-update*.

Berkaitan hal tersebut di atas, dalam rangka proses lanjut integrasi data pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN dengan aplikasi SIK Kementerian Perhubungan rencana integrasi dilakukan secara 2 (dua) arah, dimana data pada aplikasi SIASN dapat diambil oleh SIK maupun sebaliknya. Data yang dapat diambil oleh aplikasi SIK yaitu seperti data Pengangkatan CPNS/PNS, riwayat pangkat dan golongan, Pendidikan dan data yang menjadi kewenangan BKN sedangkan untuk data pegawai pada aplikasi SIK yang dikirimkan ke aplikasi SIASN yaitu data pribadi, riwayat jabatan, keluarga, disiplin, kinerja, penghargaan.

Untuk kelancaran kegiatan integrasi dimaksud, bagi unit kerja yang belum memiliki admin aplikasi SIK agar segera mengusulkan nama PNS untuk di daftarkan menjadi admin aplikasi dimaksud. Dikarenakan pentingnya kegiatan ini, sehingga kami menghimbau agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi data pegawai baik secara pribadi maupun oleh admin aplikasi SIK dimasing-masing unit kerja di karenakan jika data pegawai tidak *terupdate* menyebabkan kerugian kepada pegawai itu sendiri. Adapun jenis data yang sangat prioritas dan data rutin yang harus di mutakhirkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Sesdjen Perhubungan Darat,

Aminulloh
NIP. 197407301997031001

Lampiran Surat
 Sedditjen Perhubungan Darat
 Nomor : KP.001/1/13/DPD/2023
 Tanggal : 09 Juni 2023

**LAMPIRAN JENIS DATA YANG HARUS DIMUTAKHIRKAN
 DALAM RANGKA INTEGRASI DATA DENGAN APLIKASI SIASN BKN
 PADA APLIKASI SIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Skala	Jenis Data
Prioritas untuk segera dimutakhirkan	1. Data pegawai yang diangkat PNS Tahun 2023; 2. Data pegawai yang baru naik pangkat periode April 2023; 3. Data pegawai terkait jabatan yang baru dilantik tanggal 19 Mei 2023; 4. Data Nomor HP dan alamat email aktif selain email dinas; 5. Data riwayat Diklat Teknis, dan/atau Diklat Penjurangan; 6. Data pegawai yang masih kosong seperti jabatan, pangkat golongan dan pendidikan; 7. Bukti dukung jenis data diatas dan di <i>upload</i> kedalam aplikasi.
Rutin	1. Photo Pegawai; 2. Data Personal (Alamat, No. KTP/NIK, NPWP, KK, Kartu Pegawai); 3. SK Pengangkatan CPNS/PNS; 4. Riwayat Jabatan; 5. Riwayat Pendidikan; 6. Riwayat Diklat/kursus; 7. Riwayat Penjurangan; 8. Riwayat Penghargaan (Tanda Jasa); 9. Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang; 10. Riwayat Keluarga; 11. Riwayat Unit Kerja (diisi sesuai lokasi kerja pegawai ybs. sampai unit kerja terkecil Contoh UPPKB.....); 12. Riwayat Disiplin; 13. Riwayat Izin/Tugas Belajar; 14. Riwayat Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); 15. Riwayat Peninjauan Masa Kerja; 16. Riwayat Perpindahan Wilayah Kerja (PWK); 17. Riwayat Angka Kredit; 18. Riwayat SKP; 19. Riwayat Pindah Instansi; 20. Riwayat Pasangan dan Anak; 21. Bukti dukung jenis data diatas dan di <i>upload</i> kedalam aplikasi.

BAB IV

KEGIATAN STRATEGIS

Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, *vice versa*. Namun demikian, agar pembangunan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya.

I. Peristiwa Penting dan Kegiatan yang Melibatkan Menteri/ Direktur Jenderal Perhubungan Darat

1. Kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik

Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa mudik. Transportasi Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Selain itu juga transportasi jalan memiliki tujuan untuk dapat memberikan kenyamanan dan keefisienan yang mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Tujuan dari Kegiatan Pemantauan Jalur Mudik adalah:

- a. Sebagai sarana/ media dalam mewujudkan keterpaduan, keterkaitan/keseimbangan serta keserasian antar sector dalam bidang transportasi;
- b. Terselenggaranya kegiatan lalu lintas yang baik dan tertib;
- c. Terciptanya mobilitas yang baik bagi pengguna jalan;
- d. Memaksimalkan penggunaan jaringan jalan yang ada dan meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Jalan Nasional;
- e. Memperbaiki kinerja operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Meningkatkan kinerja ruas jalan.

Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan fasilitas keselamatan jalan yang akan di gunakan untuk jalur mudik Lebaran Tahun 2023 serta rute-rute strategis transportasi darat selama masa Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Seluruh kegiatan pemantauan jalur mudik telah dilaksanakan pada 2 (dua) periode, yaitu periode Lebaran Tahun 2023 dan periode Nataru 2023/2024, dengan rincian untuk Lebaran Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Survei Pelabuhan Merak dan Ciwandan dalam rangka kesiapan operasi ketupat 2023 pada tanggal 6 maret 2023;
- b. Kegiatan Rapat Antisipasi Kemacetan Periode Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 H) Lintas Penyeberangan Merak – Bakauheni tanggal 10 s.d 12 Maret 2023 di Provinsi Banten;
- c. Pemantauan Kesiapan MRLI Menghadapi Angkutan Lebaran Tahun 2023 tanggal 19 Maret 2023;
- d. Kegiatan pemantauan jalur mudik dilaksanakan melalui kunjungan lapangan pengecekan kesiapan kondisi jalan tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) Seksi 4, 5, dan 6 Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 s.d. 10 April 2023



Rapat Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik

Pemantauan kesiapan jalur mudik dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan Gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa mudik. Pelaksanaan kegiatan pemantauan jalur mudik dimaksud untuk mengetahui kesiapan fasilitas keselamatan jalan yang akan di gunakan untuk kegiatan jalur mudik Lebaran Tahun 2023 serta mempersiapkan rute-rute strategis transportasi darat selama masa Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Seluruh kegiatan pemantauan jalur mudik telah dilaksanakan pada 2 (dua) periode, yaitu periode Lebaran Tahun 2023 dan periode Nataru 2023/2024, dengan rincian untuk Lebaran Tahun 2023 sebagai berikut:

1) Periode Masa Lebaran Tahun 2023

a) Pemantauan Jalur Mudik Ruas Pantai Selatan (Pansela)

Pemantauan jalur mudik ruas Pantai Selatan (Pansela) di wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y dengan rincian sebagai berikut:

- [1] Simpang Labuhan – Pelabuhan Ratu;
- [2] Pelabuhan Ratu – pangandaran;
- [3] Pangandaran – cilacap;
- [4] Cilacap – Kebumen;
- [5] Kebumen – Yogyakarta.

Sepanjang Jalan Nasional Jalur Pantai Selatan yang telah dilakukan pengecekan, belum seluruhnya dilengkapi dengan pemasangan perlengkapan jalan. Saat ini sedang dilaksanakan survei kebutuhan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang surveinya sudah mencapai 80%, untuk sementara diperlukan tambahan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dengan rincian: 6.963 unit alat penerangan jalan, 2.630 unit rambu lalu lintas, 34.071 unit delineator, 5.588 beam guardrail dan 27.167 m² marka jalan.

b) Pemantauan Jalur Mudik Ruas Pantai Utara (Pantura)

Pemantauan jalur mudik ruas Pantai Utara (Pantura) di wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Y dengan rincian sebagai berikut:

- [1] Bekasi – Karawang (Kedung Waringin);
- [2] Karawang (Kedung Waringin) – Subang;
- [3] Subang – Jembatan Cipangaritan;
- [4] Jembatan Cipangaritan – Cirebon;

- [5] Cirebon – Tegal;
- [6] Tegal – Semarang.

Sepanjang Jalan Nasional Jalur Pantai Utara yang telah dilakukan pengecekan, secara umum sudah terpasang perlengkapan jalan di jalur pantura, hanya ada beberapa ruas jalan di Kanci yang belum memiliki penerangan jalan dan terdapat penerangan jalan umum solar cell dengan kondisi baterai yang hilang.

c) Pada Bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Selain Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan melakukan antisipasi seperti menyusun Rencana Operasi Libur Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 H), rapat koordinasi serta meminta BPTD setempat untuk menurunkan tim teknisnya melakukan pemeriksaan kesiapan sarana maupun prasarana angkutan penyeberangan dalam menghadapi Libur Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 H), adapun lintasan penyeberangan yang kemungkinan terjadinya lonjakan pengguna jasa sehingga perlu diantisipasi antara lain:

- [1] Merak-Bakauheni;
- [2] Ketapang-Gilimanuk;
- [3] Padangbai-Lembar;
- [4] Kayangan – Pototano;
- [5] Kariangau – Penajam;
- [6] Ajibata – Ambarita;
- [7] Tj. Api – Tj. Kelian;
- [8] Bajoe – Kolaka;

Menurut hasil pengamatan 8 (delapan) lintas di atas merupakan lintasan yang sangat signifikan terhadap lonjakan pengguna jasa, namun demikian pada lintasan lain tetap disiagakan untuk meghadapi terjadinya lonjakan pengguna jasa angkutan penyeberangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD setempat bersama dengan Polri, TNI, Dishub dan seluruh stakeholder terkait melakukan posko pelayanan dan monitoring serta pengawasan terhadap para pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan dengan memeriksa syarat perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan screening, stopper dan kantong parkir kendaraan pada lokasi menuju pelabuhan.

Tabel 2. Realisasi Produksi Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 H)

NO	PELABUHAN	TRIP	PENUMPANG	RODA 2	RODA 4	BUS	TRUK	R4 ATAU LEBIH	TOTAL KENDARAAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (6) + (7)	(9) = (4)+(8)
1	Merak	2.567	1.461.406	90.451	177.886	10.356	39.662	227.904	318.355
2	Bakauheni	117	1.408.538	83.049	171.424	10.361	38.319	220.104	303.153
3	Ketapang	4.979	671.709	69.685	72.964	7.323	24.243	104.530	174.215
4	Gilimanuk	4.806	711.344	85.273	76.384	6.976	24.662	108.022	193.295
5	Lembar	276	55.841	12.464	3.567	222	2.315	6.104	18.568
6	Padangbai	285	71.870	17.604	3.935	218	2.240	6.393	23.997
7	Kariangau	2.040	113.943	18.091	13.938	294	2.281	16.513	34.604
8	Penajam	2.037	107.747	14.337	14.526	284	2.581	17.391	31.728
9	Tanjung Api-api	225	47.850	3.180	5.926	50	1.764	7.740	10.920
10	Tanjung Ketian	219	65.060	3.720	6.089	66	1.600	7.755	11.475
11	Kayangan	874	116.168	21.483	8.724	1.237	5.780	15.741	37.224
12	Pototano	873	121.781	22.682	8.977	1.271	5.308	15.556	38.238
13	Ajibata	214	24.281	818	4.025	132	23	4.180	4.998
14	Ambarita	214	21.659	945	3.511	117	22	3.650	4.595
15	Bajoe	64	14.894	2.207	1.109	134	415	1.658	3.865
16	Kolaka	63	19.245	2.333	934	139	184	1.257	3.590
TOTAL		19.853	5.033.336	448.322	573.919	39.180	151.399	764.498	1.212.820

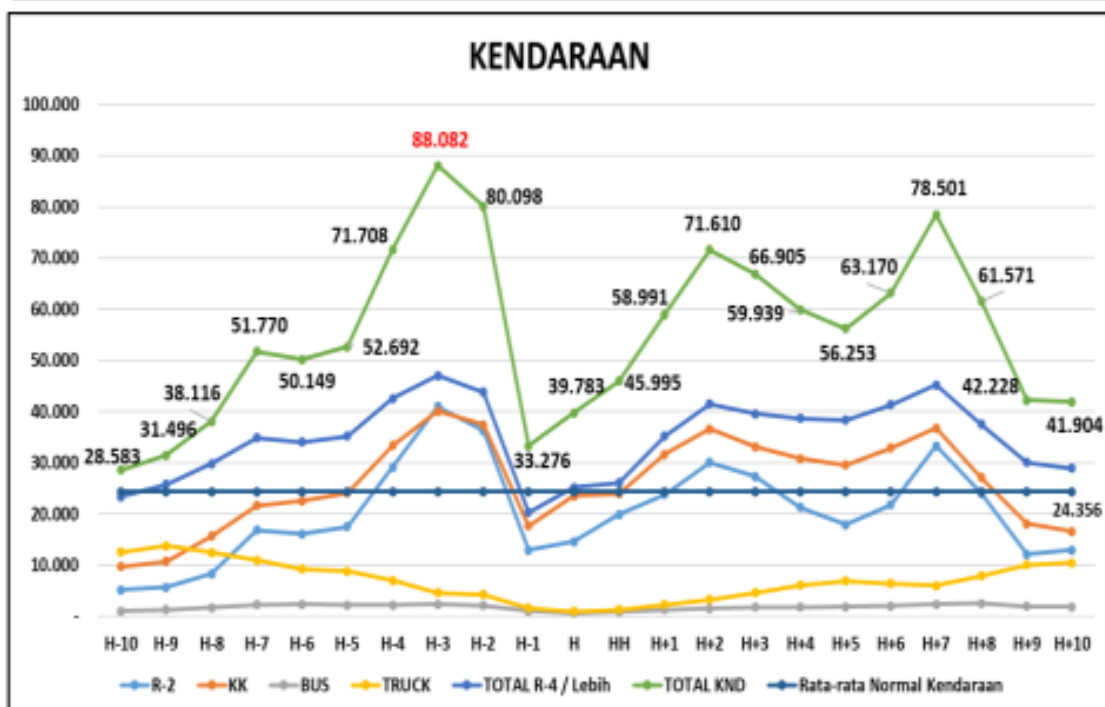
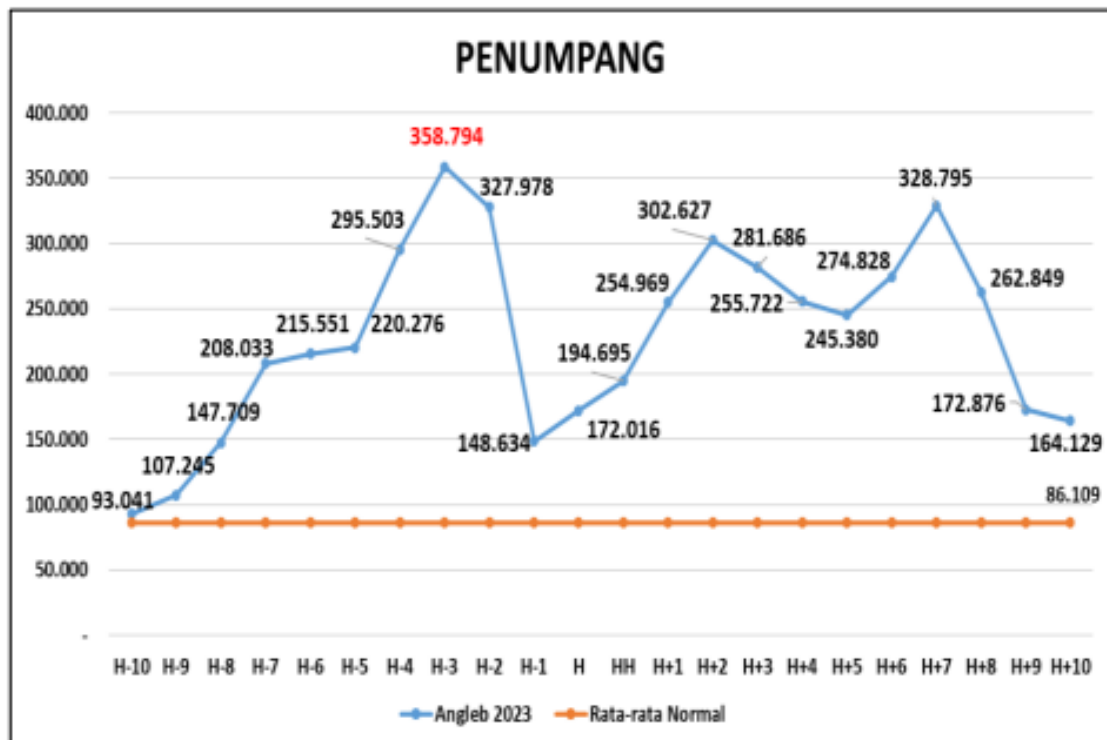
Sumber : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persem)



Gbr. 7 Dokumentasi Pimpinan dan Tim Posko Monitoring di Rest Area Menuju Pelabuhan Bakauheni



Gbr. 8 Grafik Realisasi Produksi pada 8 Lintas Pantauan Banding Normal



- 2) Periode Masa Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024
 - a) Pemantauan Jalur Mudik di Jalur Pantai Utara (Pantura)

Pemantauan jalur mudik di Jalur Pantai Utara (Pantura) melalui Rute Sukabumi – Cianjur – Pangandaran di Jawa Barat. Kondisi Jalan Nasional secara umum dalam kondisi baik dengan terdapat beberapa titik sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan serta jembatan.

Pemasalahan yang terjadi di ruas Pantai Utara (Pantura) Rute Sukabumi – Cianjur – Pangandaran adalah sebagai berikut:

- [1] Kepadatan arus lalu lintas di Jl. Raya Cibadak – Sukabumi karena adanya kendaraan yang berhenti di sepanjang jalan Pasar Cibadak ditambah geometrik jalan dengan kemiringan yang ekstrem;
- [2] Rawan terjadi tanah longsor disepanjang Jl. Palabuhanratu s.d Jl. Sukasari dikarenakan rute jalan tersebut berada di lereng gunung terutama saat musim hujan;
- [3] Rawan hewan menyeberang jalan dan kabut di sepanjang jalan Jl. Cidolog – Rambay s.d Jl. Raya Cipatri;
- [4] Perbaikan dan pelebaran jalan di sepanjang Jl. Cidolog – Rambay (7°21'45.0"S 106°40'27.4"E)
- [5] Potensi kepadatan arus lalu lintas jalan di simpang:
 - [a] Simpang 3 Cikembar (6°57'12.3"S 106°46'05.5"E)
 - [b] Simpang 3 Sindang Barang (7°27'04.6"S 107°08'06.5"E)
- [6] Perbaikan dan Pelebaran Jembatan:
 - [a] Jembatan Kecamatan Tegal Buleud (7°21'43.412"S 106°40'30.908"E), (7°24'58.9"S 106°42'00.7"E),
 - [b] Jembatan Kecamatan Cibalong (7°40'28.0"S 107°46'32.7"E)
 - [c] Jembatan Kecamatan Cimerak (7°48'43.1"S 108°23'47.8"E)

b) Pemantauan Jalur Mudik di Jalur Pantai Selatan (Pansela) dan Pantai Utara (Pantura)

Kegiatan ini dilakukan secara bersama dengan bersama-sama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Direktur Operasional PT. Jasa Raharja serta diikuti para Dirlantas Polda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Polres, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dan Kepala Cabang PT. Jasa Raharja sesuai wilayah kerja.

Ruas Jalan Nasional Jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) berada di wilayah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, DI

Yogyakarta dan Jawa Timur yang terbentang sepanjang 1.543,56 Km dan yang sudah terbangun sepanjang 1.313,70 Km dengan rincian sebagai berikut:

- [1] Prov. Banten, Ruas Simpang Labuhan – Perbatasan Prov. Jawa Barat
Sepanjang 170,09 Km;
- [2] Prov. Jawa Barat, Ruas Perbatasan Prov. Banten – Sindang Barang –
Perbatasan Prov. Jawa Tengah Sepanjang 416 Km;
- [3] Prov. Jawa Tengah, Ruas Perbatasan Provinsi Jawa Barat – Ayah –
Congot – Duwet Glonggong (Perbatasan Jawa Timur) Sepanjang 215, 68
Km;
- [4] D.I Yogyakarta, Ruas Congot – Legundi – Duwet, Sepanjang 118,61 Km;
- [5] Prov. Jawa Timur, Ruas Glonggong – Panggul – Sd. Biru – Bago – Puger
– Glenmore – Ketapang, Sepanjang 623, 18 Km.

1) Pemantauan Jalur Mudik di Rute Merak – Anyer – Rangkas Bitung –
Pandeglang – Labuan – Tanjung Lesung di Banten

Kondisi Jalan Nasional secara umum dalam kondisi baik dengan terdapat beberapa titik sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan, untuk jalan tol serang – panimbang saat ini hanya sampai exit tol rangkas bitung. Pemasalahan yang terjadi di Rute Merak – Anyer – Rangkas Bitung – Pandeglang – Labuan – Tanjung Lesung di Banten adalah sebagai berikut:

a) Titik Lokasi yang sedang dilakukan perbaikan jalan, yakni:

- (1) Simpang menuju Jalan akses tol Cilegon Barat;
- (2) Jalan Raya Kecamatan Citangkil (Long: 105.992755o Lat: -
6.010385o dan Long: 105.992416o Lat: -6.010372o);
- (3) Jembatan Sambolo Kecamatan Carita (Long: 105.82738 Lat:
-6.27539);
- (4) Perbaikan bahu jalan dan saluran air di jalan raya
rangkasbitung – pandeglang kecamatan warugunung (Long:
106.16815 Lat: -6.33972)

b) Titik lokasi simpang dengan potensi kemacetan, yakni:

- (1) Simpang 3 (Tiga) Jl. Australia I (Exit Kawasan Krakatau Stell)
– Jl. Raya Anyer;
- (2) Simpang 3 (Tiga) Anyer (Jl. Raya Anyer – Pelabuhan
Ciwandan – Jl. Lingkar Selatan);
- (3) Simpang 3 (tiga) Kadubera (Sindanghayu Kecamatan
Saketi).

c) Pemantauan Jalur Mudik Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Posko Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 s.d 5 Januari 2024. Untuk wilayah Jawa Tengah, unit kendaraan VMS (Variable Message Sign) ditempatkan pada Ruas Jalan Tol Pejagan – Pemalang KM 248+000 Jalur A pada tenggang waktu arus mudik. Dan untuk arus balik, unit kendaraan VMS (Variable Message Sign) ditempatkan pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Palimanan KM 248+000 pada jalur B.

Selama pelaksanaan dilapangan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas sesuai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pergerakan volume kendaraan yang melintas berupa sistem *Contraflow* dan sistem *One way* untuk menghindari kemacetan lalu lintas, memberlakukan pembatasan bagi kendaraan besar sumbu 3 atau lebih agar tidak melintas sesuai dengan jadwal dan timeline pada SKB sehingga potensi-potensi kemacetan dan kepadatan lalu lintas dapat terurai dan teratasi.

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Posko Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 termasuk diantaranya menempatkan personil dan unit kendaraan VMS (*Variable Message Sign*) berjalan dengan lancar. Beberapa pengaturan rakayasa lalu lintas berupa penerapan contra flow dan sistem satu arah (*one way*) yang dilakukan oleh seluruh jajaran berhasil mengurai kendaraan dan tidak menimbulkan kemacetan pada masa arus mudik dan arus balik pada masa angkutan tersebut.

Output kegiatan ini berupa laporan kondisi jalan, inventarisasi kondisi perlengkapan jalan dan serta kebutuhan dan rekomendasi pada ruas-ruas jalan yang dilakukan pemantauan. Laporan kegiatan dimaksud dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas jalur-jalur strategis yang banyak dilalui oleh pengguna jalan, baik selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 maupun selama penyelenggarakan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan *outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan lalu lintas yang baik dan tertib, terciptanya mobilitas yang baik bagi pengguna jalan, memaksimalkan penggunaan jaringan jalan yang ada dan meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan Nasional, memperbaiki kinerja operasional lalu lintas dan angkutan jalan,

serta meningkatkan kinerja ruas jalan, terutama selama mudik Lebaran Tahun 2023 dan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan jalur mudik ini melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk memudahkan ketika peninjauan di lapangan. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa depan, yaitu:

- [1] Memasukkan perihal kondisi cuaca dan bangkitan lalu lintas di sekitar ruas jalan yang dilakukan pemantauan ke dalam laporan kegiatan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang menyeluruh;
- [2] Melakukan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan kegiatan pemantauan mudik secara sistematis dan sesuai kebutuhan kebijakan yang akan diambil selama masa Angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru.

Adapun dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kesiapan Jalur Mudik sebagaimana berikut ini:







Dokumentasi Pantauan Persiapan Arus Mudik Periode Masa Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024

d) Pengawasan pada sektor Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya cuti bersama dan kelonggaran dari pemudik untuk masuk kewilayahnya masing-masing ataupun untuk berwisata ke tempat – tempat wisata. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kepadatan dan terhambatnya pelaksanaan dimaksud, Kementerian Perhubungan juga melibatkan lembaga terkait lainnya seperti Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian RI, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, BMKG, Badan SAR

Nasional, KNKT, Kementerian Kominfo, Perum DAMRI, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. PELNI, PT. Pelindo II, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pura II, PT. KAI, PT. Jasa Marga, PT. Jasa Raharja, RAPI, ORARI, Seskam Mitra Polisi, GAIKINDO/AISI, Asosiasi Transportasi dan juga media massa. Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang bertujuan untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas selama kegiatan dimaksud. Menyikapi hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan melakukan antisipasi dengan melakukan pemeriksaan sarana maupun prasarana angkutan penyeberangan pada lintas pantauan yang cenderung mengalami lonjakan pengguna jasa, yang diantaranya terdapat lintasan yang sangat signifikan pada masa Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yaitu lintas penyeberangan Merak - Bakauheni, Ketapang – Gilimanuk, Padangbai – Lembar, Kayangan – Pototano, Sibolga –Nias, Ajibata – Ambarita, Tj. Api – Tj. Kelian, Bajoe – Kolaka, Bitung – Ternate, Kupang – Rote dan Hunimua - Waipiritnamun demikian lintasan lainnya tetap mendapatkan perhatian untuk menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan terhadap permintaan jasa angkutan penyeberangan.



**Gbr. 1 Dokumentasi
Pemeriksaan Petugas pada
lokasi Stopper**



Posko Pada penyelenggaraan Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan 11 (sebelas) lintas pantauan yaitu :

- [1] Merak – Bakauheni;
- [2] Ketapang – Gilimanuk;
- [3] Padangbai – Lembar;
- [4] Kayangan – Pototano;
- [5] Sibolga – Nias;

- [6] Ajibata – Ambarita;
- [7] Tj. Api – Tj. Kelian;
- [8] Bajoe – Kolaka;
- [9] Bitung – Ternate;
- [10] Kupang – Rote; dan
- [11] Hunimua – Waipirit

Adapun untuk realisasi produksi penumpang pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 naik 21% dari produksi penumpang pada Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, sementara untuk realisasi produksi Roda 2 pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 naik sebesar 51% dari produksi Roda 2 pada Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Untuk realisasi produksi Roda 4 pada Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 naik sebesar 14% dari produksi Roda 4 pada Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Tabel 2. Realisasi Perbandingan Periode Nataru 2023/2024 Penumpang dan Total Kendaraan

Demand	PERIODE NATARU 2022/2023	PERIODE NATARU 2023/2024	BANDING 2023/2022
PNP	2.192.747	2.647.834	21%
R2	123.549	187.123	51%
R4	243.273	278.320	14%
BUS	23.484	24.507	4%
TRUK	145.483	150.913	4%
R4 >	413.926	453.740	10%
TOTAL KENDARAAN	538.118	640.863	19%

Sumber : PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)

2. Semiloka Pengusaha Angkutan Orang Tahun 2023

Penyelenggaraan kegiatan semiloka pengusaha angkutan orang tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali secara berurutan secara virtual menggunakan aplikasi zoom dan tatap muka dengan tema :

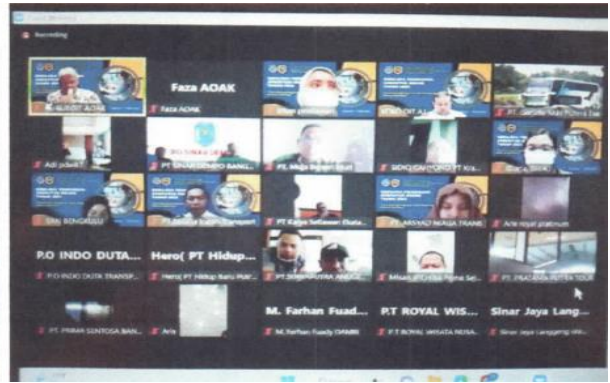
- a. Peran Penting Pengemudi Dalam Menghadapi Tantangan dan Risiko di Jalan Raya;
- b. Peran Pengusaha Angkutan Dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang.

Kegiatan semiloka pengusaha angkutan orang dilakukan sebagai wujud nyata peran pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan angkutan jalan untuk meningkatkan mutu pelayanan angkutan jalan kepada masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Pada kegiatan semiloka ini disampaikan wawasan baru mengenai keselamatan baik dalam mengemudi, pemeliharaan kendaraan, dan manajemen keselamatan dalam perusahaan sehingga tujuan transportasi aman, selamat, dan nyaman dapat tercapai.

Pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam memberikan motivasi agar Penyelenggaraan Angkutan Jalan, khususnya Penyelenggaraan Angkutan Orang dapat memenuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya terkait aspek keselamatan sehingga para pengusaha dapat meningkatkan Kinerja Perusahaan, meningkatkan kualitas Pelayanan Angkutan Orang dan mengembangkan usahanya serta dapat bersaing secara sehat dengan para pengusaha asing lainnya.

Penyelenggaraan kegiatan semiloka pengusaha angkutan orang tahun 2023 dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Perwakilan Pengusaha Angkutan AKAP dan Angkutan Pariwisata seperti pengemudi/teknisi dan manajemen perusahaan. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini yaitu :

- a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang di wakili oleh Bapak Ahmad Wildan;
- b. Indonesia Defensive Driving Center (IDDC);
- c. PT. Daimler Commercial Vehicles Indonesia;
- d. PT. HINO Motors Sales Indonesia;
- e. Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan; dan
- f. Sekolah Tinggi Transportasi Darat - Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD-PTDI).





Kegiatan Semiloka Pengusaha Angkutan Orang Tahun 2023

3. Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023

Rapat Kerja Teknis ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas yang baik dan seimbang antara Pemerintah Pusat dengan Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dalam memberikan pelayanan angkutan jalan dapat tercapai output baik dan selamat. Dengan adanya sinergitas ini, diharapkan implementasi regulasi dan kebijakan di bidang angkutan jalan dapat terwujud untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan kebutuhan transportasi masyarakat terutama dalam pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang 2023 ini dilaksanakan sebanyak 2 kali di Bandung dan Tangerang dimana pembahasan lebih ditekankan terkait sosialisasi pedoman teknis pemberian subsidi berupa bantuan biaya operasional angkutan jalan perintis, pengenalan aplikasi Mitra Darat, tata cara pengajuan usul trayek baru angkutan jalan perintis untuk tahun berikutnya dan evaluasi layanan angkutan jalan perintis.



Rapat Kerja Teknis Bidang Angkutan Orang Tahun 2023

4. Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang Terbaik Tahun 2023

Kegiatan pemilihan pengusaha angkutan orang terbaik tahun 2023 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi perusahaan angkutan yang telah memberikan pelayanan angkutan terbaik bagi masyarakat dan juga telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan di dalam perusahaannya. Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang terbaik ini dibagi menjadi 6 kategori, antara lain :

- a. Kategori AKAP perusahaan Besar;
- b. Kategori AKAP perusahaan Sedang;
- c. Kategori AKAP perusahaan Kecil;
- d. Kategori PARIWISATA perusahaan Besar;

- e. Kategori PARIWISATA perusahaan Sedang;
- f. Kategori PARIWISATA perusahaan Kecil.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 34 (tiga puluh empat) perusahaan angkutan baik AKAP dan Pariwisata. Penilaian dilakukan melalui seleksi administrasi terutama terkait dokumen Sistem Manajemen Keselamatan serta kelengkapan dokumen perizinan lainnya, selanjutnya penilaian Teknis Operasional, Fasilitas Keselamatan dan Keamanan dan kemudian dilanjutkan dengan survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan masing-masing perusahaan angkutan orang. Pemilihan pengusaha angkutan orang terbaik tahun 2023 dilakukan bersama tim konsultan dan tim penilai, yang terdiri dari KNKT, Kepolisian, Praktisi, Jasa Raharja, dan Dit. Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat.

Dari hasil seleksi tersebut, diperoleh 18 (delapan belas) perusahaan yang memiliki nilai terbaik dari masing-masing kategori, antara lain :

- a. Kategori AKAP perusahaan Besar:
 - 1) PT. Rosalia Indah Transport dengan nilai 94,59;
 - 2) PT. Sinar Jaya Megah Langgeng dengan nilai 94,37;
 - 3) PT. Eka Mira Prima Sentosa dengan nilai 62,00
- b. Kategori AKAP perusahaan Sedang:
 - 1) PT. San Putra Sejahtera dengan nilai 94,34;
 - 2) PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk dengan nilai 93,21;
 - 3) PT. Sumber Alam Ekspres dengan nilai 66,00
- c. Kategori AKAP perusahaan Kecil:
 - 1) PT. Inspired Sinar Abadi dengan nilai 95,55;
 - 2) PT. Wahana Indo Trada Mobilindo dengan nilai 94, 53;
 - 3) PT. Medali Mas Transportation dengan nilai 50,00.
- d. Kategori PARIWISATA perusahaan Besar:
 - 1) PT. Big Bird Pusaka dengan nilai 92,84;
 - 2) PT. Sinar Jaya Langgeng Utama dengan nilai 92,71;
 - 3) PT. Hiba Utama dengan nilai 22,00.
- e. Kategori PARIWISATA perusahaan Sedang:
 - 1) PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk dengan nilai 89,72;
 - 2) PT. Jackal Holidays dengan nilai 86,03;
 - 3) PT. United Automobil Sembilan Puluh Utama dengan nilai 47.
- f. Kategori PARIWISATA perusahaan Kecil:
 - 1) PT. Anugerah Karya Utami Gemilang dengan nilai 93,51;
 - 2) PT. Putra Mas Trans dengan nilai 92,89;

3) PT. Travelar Linkar Sejahtera dengan nilai 61,00.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana, perusahaan yang telah dinilai sesuai masing-masing kategori diberikan penghargaan berupa Piala dan sertifikat/ piagam penghargaan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pemenang Peraih Penghargaan Wahana Adhigana Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2023.



Pemilihan Pengusaha Angkutan Orang Terbaik Tahun 2023

5. Pemilihan Abdiyasa Teladan Angkutan Orang Tingkat Nasional Tahun 2023

Kegiatan pemilihan abdiyasa teladan angkutan orang tingkat nasional tahun 2023 ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para pengemudi perusahaan angkutan umum dimana telah menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan profesional serta telah memberikan pelayanan angkutan umum yang terbaik bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan bimbingan teknis dan sertifikasi pengemudi angkutan orang tahun 2023, dimana setelah diberikan pembekalan, para pengemudi dilakukan ujian/seleksi mengenai pengetahuannya dalam mengemudi dan penerapannya selama berkendara serta melayani pengguna jasa angkutan. Seleksi dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari KNKT, Kepolisian, Praktisi, Jasa Raharja, dan Dit. Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat.

Hasil dari seleksi tersebut diperoleh 3 pengemudi terbaik, antara lain :

- a. Zulfi Indra dari PT. Blue Bird Group Cabang Padang (Sumatera Barat) dengan nilai 85,85;
- b. Yusuf Fadillah dari PO Purimas Jaya (DKI Jakarta) dengan nilai 85,19;
- c. Emi Asyhari dari PT. Yessoe Travel (Kalimantan Tengah) dengan nilai 83,59.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Yasa dan Penghargaan Wahana Adhigana, pengemudi yang telah dinilai dengan nilai terbaik untuk peringkat 1, 2 dan 3 diberikan penghargaan berupa Piala dan sertifikat/ piagam penghargaan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pemenang Peraih Penghargaan Abdi Yasa Tingkat Nasional Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 112 Tahun 2023.





Pemilihan Abdiyasa Teladan Angkutan Orang Tingkat Nasional Tahun 2023

6. Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan

Kegiatan Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan angkutan umum di wilayah perkotaan, maka diharapkan pembangunan transportasi perkotaan dapat dilakukan secara utuh, tidak hanya berorientasi pada sarana, prasarana atau infrastruktur saja, tetapi juga harus memikirkan sistemnya. Untuk mewujudkan integrasi sistem transportasi antar wilayah perlu dilakukan konsolidasi penataan angkutan perkotaan.

Kegiatan Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Kegiatan MoU Proyek Kendaraan Listrik dan Transportasi Hijau;
- b. Kegiatan Peresmian Layanan Trans Jateng di Kawasan Subosukowonosraten di Wonogiri Jawa Tengah;
- c. Komitmen Anggaran untuk BRT Bandung Raya di Bappeda Provinsi Jawa Barat;
- d. FGD Smart Ubud di Kantor Desa Peliatan Kecamatan Ubud;
- e. Pembahasan Permohonan Bantuan Jalur Bus;
- f. Launching Integrasi Antarmoda Sulsel di Makassar;
- g. Dan kegiatan rutin lainnya.

Adapun Dokumentasi Kegiatan Konsolidasi Penataan Angkutan Perkotaan selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Peresmian Layanan Trans Jateng di Kawasan Subosukowonosraten di Wonogiri Jawa Tengah



MoU Proyek Kendaraan Listrik dan Transportasi Hijau



FGD Smart Ubud di Kantor Desa Peliatan Kecamatan Ubud



Launching Integrasi Antarmoda Sulsel di Makassar



Pembahasan Permohonan Bantuan Jalur Bus di Kota Palembang

7. Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan

Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, diperlukan koordinasi dan sinergi bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Operator maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan program subsidi buy the service.

Berbeda dengan Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan yang terhambat karena pandemi COVID-19, di Tahun 2023 Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan Tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 30 s.d. 31 Mei 2023 bertempat di Hotel Swiss Bell Harbour Bay Batam, Kepulauan Riau selama 2 (dua) hari. Hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah peserta yang hadir pada pelaksanaan Bimbingan Teknis sebanyak 50 peserta, yang terdiri dari perwakilan dari Kepala Bappeda Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Kota/Kabupaten, BPTD Wilayah Penyelenggara Program Subsidi *Buy The Service* (BTS), DPRD Provinsi, Pejabat Eselon III di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, serta Mitra Kerja terkait lainnya;

- b. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan Tahun 2023 ini dilakukan dengan metode pemberian materi oleh narasumber dari Para Kepala Bagian di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, dan Narasumber dari Praktisi Transportasi;

- c. Adapun Narasumber yang hadir :

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan Tahun 2023 ini dilakukan dengan metode pemberian materi oleh narasumber yang terdiri dari:

- 1) Dari Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda, dengan Materi “Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan untuk Mendukung Konektivitas dan Integrasi Antar Moda”;
- 2) Dari Direktur Angkutan Jalan, dengan materi “Evaluasi Penyelenggaraan dan Rencana Pengambilalihan BTS”;
- 3) Dari Direktur Transportasi Bappenas dengan materi “Kebijakan Penganggaran Bidang Transportasi ”;
- 4) Dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan materi “Penguatan Dukungan Anggaran dan Regulasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum di Daerah”;
- 5) Dari Kepala Bappenda Prov. DKI Jakarta dengan materi “Kebijakan dan Implementasi APBD untuk Subsidi Angkutan Perkotaan”;
- 6) Dari Kepala Bappenda Prov. DKI Jakarta dengan materi “Kebijakan dan Implementasi APBD untuk Subsidi Angkutan Perkotaan”;
- 7) Dari Dr. Okto Manullang dengan materi “Kebijakan Pendukung *Buy The Service*”;
- 8) Dari Direktur Utama PT. Transjakarta dengan materi “Pembentukan Pengelolaan Kelembagaan Transportasi Daerah (BLU/UTD/BUMD)”;
- 9) Dari ITDP dengan materi “Benchmarking Pengembangan Angkutan Umum”;
- 10) Dari GIZ dengan materi “Alternatif Pembiayaan Transportasi”;
- 11) *Sharing session* dari Kadishub Kota Aceh dan Kadishub Kota Semarang dengan materi “Pengalaman Implementasi Pengembangan BRT/BTS dengan Pemerintah Daerah”;
- 12) Dari Direktur PT. Surveyor Indonesia dengan materi “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program BTS”;
- 13) Dari Direktur PT. TKDN dengan materi “Sistem Informasi pada BTS” dan;
- 14) Dari Direktur PT. Aino Indonesia dengan materi “Sistem Pembayaran BTS”.

Adapun dokumentasi kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Kegiatan Bimbingan Teknis Angkutan Perkotaan 2023

8. Dukungan pelaksanaan F1H2O Danau Toba (Sumatera Utara)

Kejuaraan dunia perahu bermotor Formula 1 atau sering disebut Formula One Power Boat adalah sebuah kompetisi balapan perahu motor internasional untuk motor Perahu yang diselenggarakan oleh Union International Motanatique (UIM) dan dipromosikan oleh H2O racing sehingga sering disebut F1H2O. kejuaraan tersebut merupakan balap motor perahu pesisir kelas tertinggi di dunia dan karena itu dengan berbagai gelar F1 setara dengan balap mobil Formula One di mana pada tahun 2023 Indonesia ditunjuk sebagai negara penyelenggara event Formula One power boat F1H2O yang lokasinya diadakan di Danau Toba Sumatera Utara

Formula one Power Boat merupakan bentuk keterpaduan program lintas Kementerian atau lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan secara optimal

Indonesia baru pertama kali melaksanakan pergelaran Formula One power boat dan Danau Toba terpilih menjadi tempat diselenggarakan Formula One power boot F1H2O tidak hanya berkaitan dengan percepatan pembangunan tetapi juga promosi pariwisata pengembangan kebudayaan panggilan sejarah pengembangan iptek terkait perikanan dan lain sebagainya demi suksesnya pagelaran Formula One power Boat F1H2O 2023 masing-masing Kementerian atau lembaga diminta untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi di bidangnya masing-masing

Ada beberapa manfaat kegiatan dukungan angkutan pada hewan Formula 1 robot F1 H2O 2023 di Danau Toba Sumatera Utara diantaranya memperlancar mobilitas Para delegasi dan peserta event Formula One Power Board even H2O 2023 di Danau Toba Sumatera Utara memberikan dukungan kegiatan dengan Menyediakan alat transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta event Formula 1 H2O 2023 di Danau Toba Sumatera Utara membantu para delegasi dan peserta dalam hal transportasi dan akomodasi sejak dari tiba di bandara menuju ke hotel dan agar tiba di lokasi secara tepat waktu.



Dukungan Pelaksanaan F1H2O Danau Toba

Selain dukungan akses pada jalur darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga memberikan kemudahan layanan mobilitas orang atau wisatawan maupun

kendaraan selama pelaksanaan kejuaraan dunia perahu super cepat F1 PowerBoat 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara pada jalur penyeberangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan F1 PowerBoat. Dukungan kesiapan prasarana pelabuhan untuk kapal penyeberangan di Danau Toba juga telah disiapkan dan disiagakan seperti Pelabuhan Balige, Pelabuhan Tigaras, Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Muara, Pelabuhan Tongging, Pelabuhan Simanindo, dan Pelabuhan Bakara.



Dukungan Pelaksanaan F1H20 Danau Toba

9. Dukungan pelaksanaan KTT Asean Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur)

ASEAN adalah singkatan dari The Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan bangsa – bangsa di Asian Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Oleh karena itu, setiap tanggal 8 Agustus kita memperingati hari ASEAN atau ASEAN Day, Karena ASEAN dirasa memberikan dampak positif, Anggota ASEAN bertambah 6 negara lagi yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Sehingga saat ini total anggota ASEAN menjadi 11 negara anggota.

Indonesia Optimis bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan . “ ASEAN “ masih penting dan relevan

bagi rakyat, bagi kawasan dan bagi dunia. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN, banyak pihak menyandarkan harapan kepada Indonesia untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang juga dihadapi kawasan.

Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

Tema dari ASEAN 2023 yang telah dilaksanakan adalah ASEAN matter : Epicentrum of Growth, tema tersebut terdiri dari dua element besar yaitu ASEAN matters dan Epicentrum of Growth. Elemen pertama adalah ASEAN matters, bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadi ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia tetapi juga bagi rakyat ASEAN dan beyond. Jadi beyondnya itu ada, diluar ASEAN. Untuk element kedua, ASEAN sebagai pusat pertumbuhan menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu lebih tinggi dari dunia, Untuk proyeksi 2023 misalnya proyeksi pertumbuhan ASEAN oleh ADB itu 4, 7 % sementara oleh World Bank proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 1. 7%.

Ada berbagai cara dalam memperkuat pertumbuhan negara, salah satunya dengan memperkuat di bidang kesehatan, Selain itu juga pengembangan akan dilakukan di bidang energi, bidang pangan dan penguatan untuk kerjasama keuangan.

Indo – Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis, dengan begitu untuk melakukan pendekatan dari aspek keamanan, ekonomi dan juga pembangunan. Oleh karena itu selama kekuatan Indonesia, Flagship event kita akan ada ASEAN Indo – Pacific Forum. Di dalam ASEAN Indo – Pacific Forum itu akan ada empat kegiatan utama. Satu terkait creativ ekonomy, yang kedua digital ekonomy for SDGs untuk sustainable development goals, yang ketiga adalah business and investment summit, dan yang keempat adalah infrastruktur.

Indo – Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis, dengan begitu untuk melakukan pendekatan dari aspek keamanan, ekonomi dan juga pembangunan. Oleh karena itu selama kekuatan Indonesia, Flagship event kita akan ada ASEAN Indo – Pacific Forum. Di dalam ASEAN Indo – Pacific Forum itu akan ada empat kegiatan utama. Satu terkait creativ ekonomy, yang kedua digital ekonomy for SDGs untuk sustainable development goals, yang ketiga adalah business and investment summit, dan yang keempat adalah infrastruktur.

Hal – hal yang menjadi fokus utama pada tahap pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bus Shuttle pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur yang berhubungan dengan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberangkatan armada Hiace Premio dari Surabaya menuju Labuan Bajo;
- b. Penjemputan delegasi peserta KTT Asean dan media;
- c. Mobilisasi peserta dari lokasi penjemputan ke hotel tempat dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi Asean dan sebaliknya;
- d. Pengantaran delegasi dan media dari hotel tempat menginap menuju bandara usai KTT Asean berakhir;
- e. Mengakomodir keamanan peserta selama Kegiatan Dukungan Bus Shuttle pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Labuan Bajo - Nusa Tenggara Timur;
- f. Penempatan lokasi Person in Charge (PIC) untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.

Secara umum dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan dukungan sarana angkutan untuk digunakan sebagai sarana transportasi pendukung mobilitas peserta / pendukung delegasi pada rangkaian kegiatan KTT ASEAN Summit 2023 yang berlangsung di Labuan Bajo Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk mengangkut perwakilan Delegasi maupun wartawan media.





Dukungan pelaksanaan KTT Asean Labuan Bajo

10. Dukungan Pelaksanaan KTT ASEAN Summit (Jakarta)

ASEAN adalah singkatan dari The Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan bangsa – bangsa di Asian Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Oleh karena itu, setiap tanggal 8 Agustus kita memperingati hari ASEAN atau ASEAN Day, Karena ASEAN dirasa memberikan dampak positif, Anggota ASEAN bertambah 6 negara lagi yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste. Sehingga saat ini total anggota ASEAN menjadi 11 negara anggota.

Indonesia Optimis bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan . “ ASEAN “ masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan dan bagi dunia. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN, banyak pihak menyandarkan harapan kepada Indonesia untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia yang juga dihadapi kawasan.

Indonesia bertekad mengarahkan kerjasama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

Pada tahun 2023, KTT ASEAN yang ke-43 akan diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 dan akan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

KTT ini akan menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara para pemimpin negara anggota dan mitra internasional. Sebanyak 27 pemimpin negara dan/atau organisasi internasional diperkirakan akan menghadiri KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta.

Jumlah tersebut termasuk 18 pemimpin negara anggota KTT Ekonomi Asia Timur (EAS), Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, pimpinan Pacific Island Forum (PIF), serta Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kehadiran berbagai pemimpin ini menunjukkan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah dialog dan kolaborasi di tingkat regional dan internasional.

KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta ini akan membahas perkembangan dan penguatan kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal. Berbeda dengan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo yang membahas isu-isu internal ASEAN, serta isu-isu penting di dalam dan luar kawasan.

Pertemuan KTT ke-43 ASEAN turut membahas beberapa tema penting. Baik itu soal Code of Conduct terkait Laut Cina Selatan, South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), ASEAN Maritime Outlook, ASEAN Outlook in Indo Pacific (AOIP), dan isu terkait Myanmar.

Sebagai ajang pertemuan antara pemimpin negara-negara Asia Tenggara dan negara mitra, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta memiliki tujuan yang sudah sangat jelas, yakni menguatkan pencapaian dan pondasi visi ASEAN 2045. Diharapkan, pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta menjadi landasan penguatan kelembagaan ASEAN dari segi pembuatan keputusan yang efektif dan efisien.

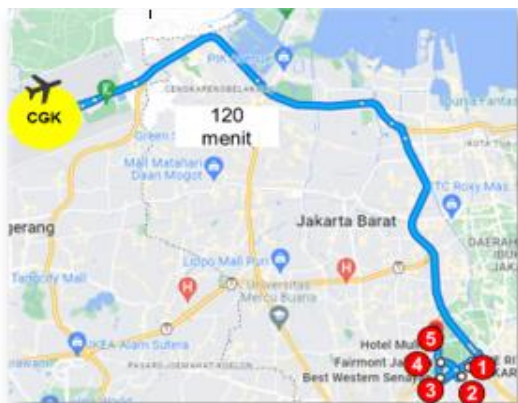
Selain itu, diharapkan pertemuan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta ini juga bisa menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Seperti, kesepakatan terkait penguatan infrastruktur ASEAN, food security, blue economy dan green economy, serta digital economy dan payment ecosystem.

Maksud pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk mengakomodir kegiatan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 dengan memberikan dukungan berupa pelayanan transportasi kepada para delegasi dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke hotel tempat menginap para delegasi dan pada saat kepulangan dari hotel menuju bandara Soekarno Hatta.

Ruang lingkup penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

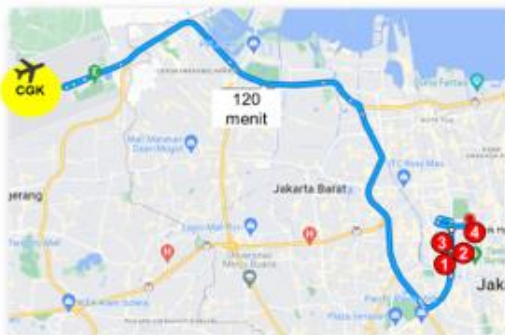
- a. Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan Supervisi dan monitoring terhadap layanan shuttle KTT ASEAN yang telah disediakan dengan rute:

- 1) Bandara Internasional Soekarno Hatta – Ritz Charlton Pacific Place – The Langham – Best Western – Fairmont – Mulia;
- 2) Bandara Internasional Soekarno Hatta – Hotel Indonesia Kempinski – Mandarin Oriental – Grand Hyatt - Park Hyatt;
- 3) Bandara Internasional Soekarno Hatta – Le Meridien – Ayana Midplaza – Shangri-La;
- 4) Bandara Internasional Soekarno Hatta – Four Seasons – Ritz-Carlton Kuningan – JW Mariott;
- 5) Bandara Internasional Soekarno Hatta – Raffles – The Westin – St. Regis.



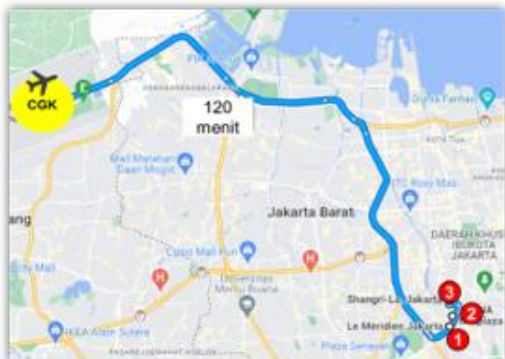
Route 1: SHUTTLE BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Bus Medium)

Rute	Bandara Internasional Soekarno Hatta - Ritz Charlton Pacific Place - The Langham – Best Western - Fairmont - Mulia
Tipe Bus	Medium Bus
Jumlah Operasi	6 Unit
Jarak Tempuh (km)	30
Waktu Tempuh (menit)	120
Headway (menit)	60 (Off Peak Hour) 30 (Peak Hour)



Route 2: SHUTTLE BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Bus Medium)

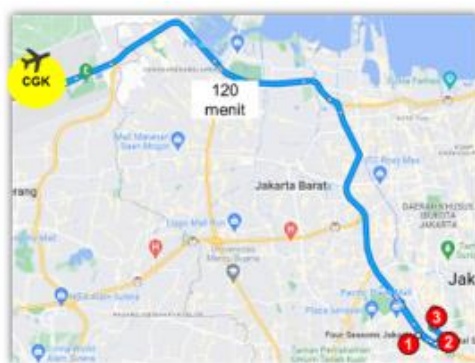
Rute	Bandara Internasional Soekarno Hatta - Hotel Indonesia Kempinski - Mandarin Oriental – Grand Hyatt - Park Hyatt
Tipe Bus	Medium Bus
Jumlah Operasi	6 Unit
Jarak Tempuh (km)	34
Waktu Tempuh (menit)	120
Headway (menit)	60 (Off Peak Hour) 30 (Peak Hour)



Route 3: SHUTTLE BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Bus Medium)

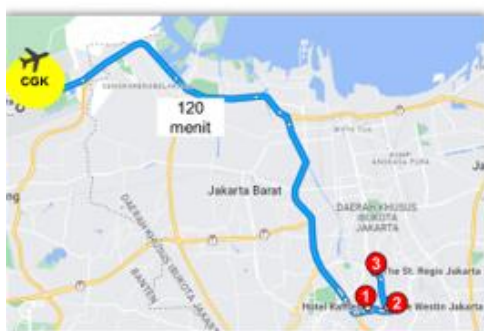
Rute	Bandara Internasional Soekarno Hatta - Le Meridien - Ayana Midplaza – Shangri-La
Tipe Bus	Medium Bus
Jumlah Operasi	6 Unit
Jarak Tempuh (km)	30
Waktu Tempuh (menit)	120
Headway (menit)	60 (Off Peak Hour) 30 (Peak Hour)

Rute Pelayanan Transportasi Dalam Mendukung KTT



Route 4: SHUTTLE BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Bus Medium)

Rute	Bandara Internasional Soekarno Hatta - Four Seasons - Ritz-Carlton Kuningan - JW Marriott
Tipe Bus	Medium Bus
Jumlah Operasi	6 Unit
Jarak Tempuh (km)	31
Waktu Tempuh (menit)	120
Headway (menit)	60 (Off Peak Hour) 30 (Peak Hour)



Route 5: SHUTTLE BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA (Bus Medium)

Rute	Bandara Internasional Soekarno Hatta - Raffles - The Westin - St. Regis
Tipe Bus	Medium Bus
Jumlah Operasi	6 Unit
Jarak Tempuh (km)	34
Waktu Tempuh (menit)	120
Headway (menit)	60 (Off Peak Hour) 30 (Peak Hour)

Rute Pelayanan Transportasi Dalam Mendukung KTT ASEAN ke-43





Dukungan pelaksanaan KTT ASEAN Summit (Jakarta)

11. Dukungan pelaksanaan STQH Provinsi Jambi (Jambi)

Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional Tahun 2023 di Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan mutu penghafalan Al-Qur'an dan Hadits di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 34 kafilah dari 34 provinsi di Indonesia, yang terdiri dari 590 peserta inti dan 146 peserta cadangan dan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 5 November 2023

Kegiatan STQH Nasional Tahun 2023 di Provinsi Jambi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan mutu penghafalan Al-Qur'an dan Hadits di Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan persaudaraan antar penghafal Al-Qur'an dan Hadits dari seluruh Indonesia.

Kegiatan Bus Dukungan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional Tahun 2023 di Provinsi Jambi oleh Kementerian Perhubungan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bus dukungan yang digunakan untuk mengangkut kafilah STQH Nasional Tahun 2023 di Provinsi Jambi memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Pada kegiatan STQ ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan bantuan berupa 38 unit Hiace, dimana 34 unit Hiace melekat untuk 34 provinsi, sehingga setiap provinsi mendapatkan masing-masing 1 unit Hiace, adapun 4 unit lainnya digunakan sebagai transportasi dari lapangan parkir menuju ke venue acara.

Dukungan bus dalam penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional Tahun 2023 di Provinsi Jambi menjadi salah satu aspek penting dalam memfasilitasi mobilitas para kafilah selama kegiatan berlangsung.

Beberapa point yang dicapai atau dihasilkan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bus Dukungan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Nasional di Provinsi Jambi, Bus Micro Dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebanyak 38 unit Hiace telah tiba seluruhnya di Provinsi Jambi pada tanggal 26 Oktober 2023, dan menjadi

lokasi pengendapan/parkir serta penginapan para driver di Kantor BPSDM Provinsi Jambi; Bus terdiri dari 37 unit bus seat 16 dan 1 unit Hiace VVIP; Dukungan penyediaan Micro Bus untuk acara STQH tersebut sudah termasuk biaya perencanaan, sewa armada beserta pengemudi, BBM, rampcheck, pengiriman/pengembalian, supervisi pengoperasian, akomodasi dan konsumsi pengemudi serta pelaporan. Sementara itu, pengoperasian bus akan berada di bawah kendali Panitia Bidang Transportasi STQH Tahun 2023;

Telah dilakukan serah terima bus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemprov Jambi, serah terima dilakukan oleh Bapak Suharto (Direktur Angkutan Jalan) sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Bapak Sudirman (Sekda Provinsi Jambi) mewakili Pemerintah Provinsi Jambi. Penandatanganan dilakukan di RR Sekda Prov Jambi dan dilakukan penyerahan bus secara simbolik di Depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi;

Kegiatan rapat dan penyerahan bus dihadiri juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Jhon Eka Poa; Kepala BPTD Kelas II Jambi, Eko Indra Yanto; Ketua Tim Kelompok Substansi Angkutan Antarmoda, Rizky Perdana Putra; Perwakilan dari Kementerian Agama; Perwakilan dari Satpol PP; dan Perwakilan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Jambi.

Skema layanan bus adalah melekat ke masing-masing provinsi kafilah, dengan jumlah 34 provinsi yang berpartisipasi maka masing-masing mendapatkan 1 unit bus Hiace, adapun 4 bus hiace lainnya akan digunakan sebagai layanan shuttle dari lokasi parkir ke venue acara;

Bus-bus tersebut akan digunakan untuk mengantar dan menjemput para Kafilah dari hotel ke tempat perlombaan dan sebaliknya. Sementara itu, Kafilah akan menaiki bus medium yang disediakan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dari bandara menuju hotel. Bus Bantuan dari Kementerian Perhubungan diperuntukkan sebagai transportasi operasional Kafilah yang melekat pada masing-masing provinsi setiap harinya selama kegiatan STQH berlangsung

Layanan untuk kafilah akan dimulai dari tanggal 29 Oktober s.d
November 2023.

7

Selain untuk kegiatan lomba STQH, bus hiace juga akan digunakan untuk wisata ke beberapa lokasi di Jambi seperti Candi Muaro Jambi, Gentala Arasy, termasuk Masjid Seribu Tiang milik Provinsi Jambi.



Dukungan pelaksanaan STQH Provinsi Jambi

12. Dukungan pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Biak (Papua)

Sail merupakan bentuk keterpaduan program lintas Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan secara optimal, dan Sail juga mengukuhkan bahwa Indonesia adalah negara maritim.

Indonesia telah melaksanakan Sail sebanyak 8 kali yaitu Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitong 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014, Sail Tomini 2015, Sail Selat Karimata 2016, Sail Sabang 2017, Sail Sunda Kecil 2018, Sail Nias 2019, dan Sail Tidore 2021.

Kegiatan Sail ini tidak hanya terkait dengan promosi pariwisata, tetapi juga percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kebudayaan, penggalian sejarah, pengembangan IPTEK terkait kelautan dan perikanan, dan lain sebagainya.

Demi suksesnya penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih 2023, masing-masing Kementerian/Lembaga diminta untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi di bidangnya masing-masing. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih 2023, yang salah satunya yaitu memberikan bantuan operasional micro bus selama penyelenggaraan Sail Teluk Cenderawasih 2023 berlangsung.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, maksud dari seluruh rangkaian kegiatan acara adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 dengan menyediakan jasa Akomodasi dan transportasi untuk mendukung kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada

Dukungan Pelaksanaan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Tujuan kegiatan ini tidak lain untuk mensukseskan kegiatan dan juga menyediakan jasa akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023.

Ada beberapa manfaat kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023, diantaranya :

- a. Memperlancar mobilitas para peserta dan delegasi kegiatan Sail Nasional Tahun 2023;
- b. Memberikan dukungan kegiatan dengan menyediakan alat transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta dan delegasi kegiatan Sail Nasional Tahun 2023.

Hal – hal yang menjadi fokus utama pada tahap pelaksanaan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 yang berhubungan dengan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberangkatan armada bus menuju lokasi kegiatan;
- b. Pendataan Unit kendaraan Hi Ace dan melakukan Rampchek Kendaraan sebelum diberangkatkan;;
- c. Pemberangkatann Kendaraan Hi Ace menuju pelabuhan
- d. Penyebrangan Kendaraan Hi ace dukungan kegiatan pelaksanaan Sail Nasional 2023 dari Jayapura menuju Biak Provinsi Papua;
- e. Serah Terima kendaraan dari Kementerian Perhubungan kepada Panitia acara;
- f. Operasional Kendaraan Hi Ace unit bantuan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 dan Penjemputan peserta;
- g. Mobilisasi peserta dari lokasi penjemputan ke hotel dan lokasi kegiatan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua.

Hal – hal yang menjadi fokus utama pada tahap pelaksanaan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2023 yang berhubungan dengan akomodasi adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya kamar hotel yang akan digunakan tim supervise yang bertanggung jawab pada kegiatan Transportasi kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua;
- b. Memfasilitasi transportasi peserta kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua di lokasi kegiatan;

- c. Mengakomodir keamanan dan kenyamanan peserta dalam hal ini adalah keamanan dan kenyamanan pada proses naik dan turun bus peserta dari dan menuju lokasi lomba atau dari dan menuju Bandara selama kegiatan kegiatan Sail Nasional Tahun 2023 di Provinsi Papua;
- d. Penempatan lokasi person in charge untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan.



Dukungan pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih Biak (Papua)

13. Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

Hari Nusantara jatuh pada tanggal 13 Desember yang diperingati setiap tahunnya berawal dari Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaya.

Setelah konsepsi negara kepulauan dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut internasional (United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS) oleh PBB tahun 1982. Deklarasi ini dipertegas kembali dalam UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Adanya Deklarasi Djuanda tersebut, luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari luas sebelumnya yaitu 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Bertolak dari Deklarasi Djuanda tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1999 dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Dan dua tahun kemudian, pada tanggal 11 Desember 2001, Presiden RI Megawati Soekarnoputri, melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001, menetapkan bahwa tanggal 13 Desember dinyatakan sebagai Hari Nusantara, dan resmi dinyatakan sebagai hari perayaan nasional yang diperingati setiap tahun.

Empat tujuan Hari Nusantara adalah, satu, merubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan matra laut berimbang), kedua, menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (Mainstream) pembangunan nasional, ketiga, menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil, dan keempat, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Hari Nusantara pada mulanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, Penetapan Hari Nusantara jatuh pada tanggal 13 Desember. Peringatan Hari Nusantara pada Tahun 2023, ditetapkan dan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pada tanggal 10 s.d 13 Desember 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Nomor 140 Tahun 2023 Tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2023.

Peringatan Hari Nusantara 2023 di Tidore diisi oleh serangkaian acara yang didukung oleh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan masyarakat setempat. Sebagai

dukungan suksesnya kegiatan ini, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi diantaranya yaitu:

1. Menyediakan 30 unit bus ukuran mikro di Tidore dan Ternate selama pelaksanaan kegiatan;
2. Menyediakan Hotel Terapung melalui KM. TATAMAILAU untuk penginapan di Tidore Kepulauan;
3. Menambah frekuensi penerbangan ke Ternate sebagai gerbang masuk ke Tidore Kepulauan;
4. Menyediakan 4 unit kapal rute Bastiong Ternate - Rum Tidore yang beroperasi sebanyak 3 trip pada pukul 12.30 ,08.00 dan 15.30 dan rute Bastiong - Sofifi dan Bastiong - Sidangoli serta 1 unit kapal penyeberangan perintis dengan 22 lintasan.

Adapun tema pada kegiatan ini yaitu “Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah”. Tema ini memiliki maksud Melalui momentum Hari Nusantara ini, diharapkan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia. Tema ini mengandung harapan agar posisi Tidore sebagai tempat pemusatan peringatan Hari Nusantara bisa kembali terangkat. Diketahui, Tidore dikenal sebagai pusat rempah-rempah seperti cengkeh pada tahun 60 - 70an Berikut logo yang diusung dalam peringatan Hari Nusantara Tahun 2023.



Dalam kegiatan ini, selain menyelenggarakan acara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga memberikan dukungan lainnya antara lain menyediakan jasa Akomodasi dan Transportasi untuk mendukung kegiatan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan.

Rangkaian Hari Nusantara tahun 2023 dimulai dengan Launching Hari Nusantara Tahun 2023 pada tanggal 13 November 2023 di Gedung Kementerian Perhubungan



Rangkaian Hari Nusantara dilaksanakan sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan puncak acara pada tanggal 13 Desember 2023, adapun rangkaian acara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan didukung Kementerian/ Lembaga, di puncak acara Kementerian Perhubungan menyiapkan rangkaian acara puncak.

Pada tanggal 10 Desember 2023 rangkaian acara dimulai dengan Senam SKJ dan Goyang Tidore dilanjutkan Lomba renang pesisir, bakti kesehatan oleh TNI dan terdapat Nusantara Expo dan Rumah Baca.

Senam SKJ dan goyang Tidore ini juga diikuti oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (DR. Gunawan Suswantoro), Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Amirulloh), Deputy III Bidang kebudayaan dan Olahraga Kemenpora RI, Wali Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Pimpinan OPD dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Senam SKJ ini diikuti oleh 1.000 (seribu) peserta yang terdiri dari siswa/siswi SD, SMP, SMA/SMK, ASN, dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemenpora RI bekerja sama dengan Pemda Kota Tidore melalui Dispora Kota Tidore Kepulauan dalam mendukung suksesnya Pelaksanaan Hari Nusantara Tahun 2023 di Kota Tidore Kepulauan. Senam SKJ dan Goyang Tidore mengawali rangkaian kegiatan Hari Nusantara ini diakhiri dengan pemberian doorprize kepada para peserta senam SKJ dan Goyan Tidore. Senam SKJ dan Goyang Tidore ini dipandu langsung oleh instruktur senam Nasional yakni Eva Susanti



MINGGU, 10 DESEMBER 2023
**PEMBUKAAN RANGKAIAN
 HARI NUSANTARA 2023**
 Pantai Tugulufa

Opening Ceremony atau Pembukaan simbolis Rangkaian Hari Nusantara tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), DR. Gunawan Suswantoro mewakili Ketua Panitia Nasional Hari Nusantara 2022, Budi Karya Sumadi, didampingi oleh Walikota Tidore Kepulauan, Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Utara (Drs. Syamsuddin A. Kadir, M.Si), Deputi III Bidang kebudayaan dan Olahraga Kemenpora RI, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Amirulloh), Kapolresta Kota Tidore Kepulauan dan Forkopimda Kota Tidore Kepulauan. Terpilihnya Pulau Tidore sebagai tuan rumah bukan tanpa

alasan. Tidore adalah pulau bersejarah dalam perjuangan merawat Nusantara. Tidore mempunyai sejarah sebagai titik 0 (nol) jalur rempah dalam ekspor cengkeh pertama dari Tidore ke Eropa pada 11 Desember 1521, dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Rempah Nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Kota Tidore Kepulauan saat ini menjadi anggota organisasi Jaringan Global Kota Magellan Global Network of Magellan Cities. Acara Pembukaan Hari Nusantara tahun 2023 ditandai dengan Pemukulan Tifa oleh Sesmenpora RI, Gunawan Suswantoro, Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Amirullah), Walikota Tidore Kepulauan, Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Sekot Tidore Kepulauan, Perwakilan BI Maluku Utara, Kadispota Malut serta Kapolresta Kota Tidore Kepulauan.

Kegiatan yang berlangsung selama 4 Hari, dimeriahkan oleh seluruh masyarakat. Tanggal 13 Desember 2023 merupakan acara puncak penyelenggaraan peringatan Hari Nusantara dimana rangkaian acara dilaksanakan di pantai tugulufa dengan parade demonstrasi paramotor menandakan rangkaian acara puncak dimulai, dilanjutkan rangkaian inti dan berakhir dengan panggung hiburan yang menghadirkan artis nasional yaitu Slank.







Berikut manfaat dukungan bantuan akomodasi transport darat pada kegiatan pelaksanaan Hari Nusantara 2023, diantaranya;

- a. Memperlancar mobilitas para delegasi dan peserta Hari Nusantara 2023, Tidore, Maluku Utara;
- b. Memberikan dukungan kegiatan dengan menyediakan alat transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh delegasi dan peserta;

- c. Membantu para delegasi dan pesero dalam hal transportasi dan akomodasi sejak dari tiba di bandara menuju ke hotel dan agar tiba di lokasi acara tepat waktu.

Hal — hal yang menjadi fokus utama pada tahap pelaksanaan kegiatan Hari Nusantara Tahun 2023 di Provinsi Maluku Utara yang berhubungan dengan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemberangkatan armada Mini Bus (Hi Ace / Elf) menuju lokasi kegiatan;
- b. Pendataan Unit kendaraan Hi Ace / elf dan melakukan Rampchek Kendaraan sebelum diberangkatkan;
- c. Pemberangkatann Kendaraan Hi Ace / elf menuju pelabuhan;
- d. Penyebrangan Kendaraan Hi ace dukungan kegiatan pelaksanaan Hart Nusantara Tahun 2023 Provinsi Maluku Utara;
- e. Serah Terima kendaraan dari Kementerian Perhubungan kepada Panitia acara;
- f. Operasional Kendaraan Hi Ace / Elf unit bantuan kegiatan Hari Nusantara Tahun 2023 di Provinsi Maluku Utara;
- g. Mobilisasi peserta dari lokasi penjemputan ke hotel dan lokasi kegiatan kegiatan Hari Nusantara Tahun 2023.





Dukungan Bus Pelaksanaan Kegiatan Hari Nusantara Tidore

14. Dukungan Bus Pelaksanaan Kegiatan KTT AIS BALI

Keterlibatan Indonesia dalam AIS Forum ini tak lepas dari peran serta aktif Indonesia dalam kancah diplomasi terkait dengan isu-isu kelautan global, melalui berbagai pertemuan internasional. Salah satunya saat penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 yang mengukuhkan prinsip negara kepulauan (archipelagic state).

KTT AIS Forum 2023 diharapkan tidak hanya sebuah ajang diskusi semata, melainkan juga akan memberikan dampak konkret dalam menjawab tantangan negara pulau dan kepulauan. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menjadi sebuah forum antarnegara pulau dan kepulauan yang berkelanjutan seperti organisasi kawasan lainnya yang telah lebih dulu berdiri.

KTT AIS Forum 2023 diharapkan tidak hanya sebuah ajang diskusi semata, melainkan juga akan memberikan dampak konkret dalam menjawab tantangan negara pulau dan kepulauan. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menjadi sebuah forum antarnegara pulau dan kepulauan yang berkelanjutan seperti organisasi kawasan lainnya yang telah lebih dulu berdiri.

KTT AIS Forum juga akan diikuti oleh sembilan pimpinan organisasi internasional, antara lain dari Forum Negara Kepulauan Pasifik (PIF), Kelompok Kerja Sama Negara Melanesia (MSG), Kelompok Negara Komunitas

Karibia (CARICOM), Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selain itu, forum tersebut akan dihadiri oleh para kepala atau pimpinan dari organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah, antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (IORA).

Indonesia tahun ini didaulat sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum. Sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia, lewat forum ini Indonesia diharapkan menjadi inisiator dalam menangani isu_x0002_isu global terkait kelautan. Ajang KTT AIS Forum 2023 akan berlangsung di Bali, pada 10--11 Oktober 2023. Indonesia mengundang 51 negara pulau dan kepulauan serta sejumlah organisasi internasional. Tahun ini, AIS Forum 2023 mengusung tema "Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future". Agenda pertemuan tersebut akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

Direktorat Angkutan Jalan Mendukung pelaksanaan acara “ Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Islands States (AIS) Forum Tahun 2023 di Provinsi Bali dengan menyediakan shuttle bus yang beroperasi di dua rute Nusa Dua dengan Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) sebagai pusat kegiatan pelaksanaan KTT yang diikuti oleh delegasi negara-negara peserta KTT beserta official dan media supportnya maupun sebagai angkutan VIP Delegasi dari Apron Bandara I Gusti NGurah Rai ke ruang VVIP bandara sebelum delegasi tersebut bertolak dengan kendaraan khusus tersendiri.

Memberikan sarana transportasi mobile shuttle guna mendukung mensukseskan Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelago and Islands States (AIS) Forum Tahun 2023 di Provinsi Bali yang telah dilaksanakan pada 10-12 Oktober dengan memfasilitasi transportasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam hal ini sebagai Event Organizer.



Pelaksanaan Kegiatan KTT AIS BALI

15. Dukungan Pelaksanaan Aquabike World Championship

Aquabike World Championship adalah kejuaraan jetski internasional yang diselenggarakan di berbagai negara. Setelah digelar di Sardinia, Italia, kejuaraan tersebut akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 22-26 November 2023.

Kejuaraan ini akan menghadirkan 118 pengendara jetski dari 20 negara. Tidak hanya dari luar negeri, Indonesia juga akan menghadirkan 10 "local heroes" yaitu pembalap jetski lokal yang akan ikut serta.

Danau toba dengan keindahannya yang megah dan lanskapnya yang tenang, menjadi latar belakang untuk sebuah acara yang lebih dari sekadar memacu adrenalin dari balap jetski. Hal ini membuat kita merenungkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai tuan rumah, kata Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, yang juga ketua pelaksana Aquabike World Championship 2023 Danau Toba, pada Media Gathering Aquabike Jetski World Championship 2023, melalui Zoom Meeting', Senin, 13 November 2023.

Danau vulkanik terbesar di dunia itu akan disulap menjadi track perlombaan. Akan ada dua kejuaraan, pertama ada Circuit, yaitu runabout dan ski yang menantang para pembalap bermanuver di sirkuit dengan variasi rintangan. Kedua, Endurance dengan

kelrualan dan daya tahan pembalap dengan menggunakan jenis Runabout jetski menjadi fokus utama.

Untuk kategori sirikuit, runabout GP1 akan menggunakan jetski terbesar, paling bertenaga dan tercepat di air, dengan kapasitas mesin yang dapat mencapai 170km/jam. Ski GP1 adalah kompetisi jetski yang sangat cepat, dan bermanuver sangat ekstrem, mengombinasikan keahlian atraksi jetski dan kemampuan mengendarai kendaraan motor.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, maksud dari sel1uruh rangkaian kegiatan acara adalah dal1am rangka mendukung pelaksanaan acara Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Aquabike World Championship 2023 di Provinsi Sumatera Utara dengan menye1diakan jasa Akomodasi dan transportasi yang amain dan nyaman untuk mendukung kegiatan Direktorat Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI.

Tujuan kegiatan ini tidak lain untuk mensukseskan Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Aquabike World Championship 2023 di Provinsi Sumatera Utara, dengan memberikan fasilitas transportasi dan akomodasi yang1 dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Hal - hal yang menjadi fokus utama pada tahap pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Aquabike World Championship 2023 di Provinsi Sumatera Utara yang berh1ubungan dengan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Proses Ramp check seluruh kendaraan;
- b. Pemberangkatan armada bus menuju lokasi kegiatan;
- c. Penjemputan peserta dan penonton;
- d. Mobilisasi peserta dan penonton dari lokasi penjemputan ke hotel dan lokasi Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Bus pada Pelaksanaan Aquabike World Championship 2023 di Provinsi Sumatera Utara.

Secara umum dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan dukungan sarana angkutan untuk digunakan sebagai sarana transportasi pendukung mobilitas penumpang / penonton pada kegiatan Aquabike World Championship 2023 yang berlangsung di Danau Toba Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan maksimal untuk mengangkut penumpang/penonton.



Pelaksanaan Bus Aquabike World Championship

16. Peresmian Terminal Penumpang Tipe A

Peresmian Terminal Tipe A oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 5 terminal tipe A yang tersebar di pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan rincian sebagai berikut :

- a. Peresmian Terminal Tipe A Amplas dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2023, acara peresmian berpusat di Terminal Tipe A Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.



- b. Peresmian Terminal Tipe Tingkir, Terminal Tipe A Paya Ilang dan Terminal Tipe A Anak Air dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023, acara peresmian berpusat di Terminal Tipe A Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.



17. Peresmian KMP. Bahtera Nusantara 03

Kegiatan Peresmian Kapal Penyeberangan Penumpang Ro – Ro 1500 GT lintas Tanjung Uban – Tambelan – Sintete (KMP. BAHTERA NUSANTARA 03) pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2023 di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau pukul 09.00 WIB pada tanggal 04 Februari 2023 yang dihadiri oleh para tamu undangan Kemenhub dan Legislatif :

- a. Menteri Perhubungan RI;
- b. Ibu Cen Sui Lan (Anggota Komisi V DPR RI);
- c. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- g. Sesditjen, Perhubungan Darat;
- h. Direktur Transportasi SDP;
- i. Kepala Kantor KSOP Khusus Batam;
- j. Kepala Otorita Batam;
- k. Kepala BPTD Wilayah Provinsi Riau dan Kepri;
- l. Direktur Sarana Hibdat;
- m. Ka. Disnav Tanjung Pinang;
- n. Staf Khusus Bid. SDM dan Kehumasan.
- o. List Undangan Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam :
- p. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
- q. Ketua DPRD Kepulauan Riau;
- r. Pangdam I Bukit Barisan;
- s. Kapolda Kepulauan Riau;
- t. Kajati Kepulauan Riau;
- u. Walikota Batam;
- v. Kadishub Provinsi Kepulauan Riau;
- w. Kadishub Kota Batam;
- x. Danrem 033 Kepri;
- y. Ketua Pengadilan Tinggi Kepri;
- z. Kapolres Batam;
- aa. Dandim Batam 0316.
- bb. List Undangan Lembaga, BUMN, dan Swasta :
- cc. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
- aa. Direktur Utama PT. BKI (Persero);
- bb. Direktur Utama PT. Karimun Anugrah Sejati;

- ff. Direktur Utama PT. Arun Prakarsa Inforindo;
- gg. Direktur Utama PT. R95 Naval Architect.
- hh. Kepala Stasiun BMKG Batam
- ii. Kepala Cabang PT. ASDP Pelabuhan Punggur Batam
- jj. Dirut Bandara Internasional Batam Hang Nadim



18. Peresmian Pelabuhan Peresmian Pelabuhan 16 Ilir dan 7 Ulu

Kegiatan Peresmian Pelabuhan 16 Ilir dan 7 Ulu 15 Juli 2023 yang dihadiri oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat di dampingi oleh Kepala Balai Sumatera Selatan dan *stakeholder* terkait.



19. Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tahun 2023

Rakornis 2023 yang di selenggarakan dalam rangka meningkatkan kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan darat 2023, dan pembuat kebijakan untuk bertukar pengetahuan, gagasan, dan penajaman ketatalaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, melanjutkan kesuksesan pelaksanaan layanan Mudik Angkutan Lebaran menggunakan aplikasi Mitra Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengembangkan fitur video call yang terhubung dengan aplikasi Sistem Mitra Darat. Rapat Koordinasi Teknis ini memiliki maksud untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diskusi untuk mempersiapkan pelaksanaan Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 dan penajaman ketatalaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan bertujuan untuk

menyediakan forum yang berkualitas tinggi bagi para pemangku kepentingan dari berbagai bidang pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dan membangun kolaborasi yang erat antara direktorat perhubungan dengan instansi terkait lainnya.

Lokasi kegiatan Rakornis 2023 Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Bandung pada tanggal 08 – 09 November 2023.







II. Kegiatan Penunjang Program Kerja Presiden

1. Capaian *Major Project* Pantauan Kemenko Marves

Terdapat 2 (dua) Proyek Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dipantau oleh Kemenko Marves, yaitu:

- a. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan, antara lain:
 - 1) Jakarta;
 - 2) Surabaya;
 - 3) Medan;
 - 4) Bandung;
 - 5) Makassar;
 - 6) Semarang.
- b. Pembangunan Pelabuhan Baru dimana terdapat 4 (empat) kegiatan pembangunan pelabuhan baru dalam T.A. 2022, tepatnya pada KSPN Danau Toba:
 - 1) Sebanyak 2 (dua) pelabuhan Selesai pada T.A. 2022 dan beroperasi pada tahun 2023, yaitu:
 - a) Pelabuhan Silalahi; dan
 - b) Pelabuhan Porsea.
 - 2) 2 (dua) pelabuhan pekerjaan akan dilanjutkan pada T.A. 2023, yaitu:
 - a) Pelabuhan Sipinging; dan
 - b) Pelabuhan Onan Runggu.

2. Capaian Janji Presiden

Terdapat 2 (dua) Janji Presiden yang merupakan kontribusi Sub Sektor Perhubungan Darat, yaitu dukungan MotoGP dan memperkuat konektivitas darat dengan segera meluncurkan trayek bus rute Kupang – Dili, yaitu:

- a. Kegiatan dukungan MotoGP terlaksana dengan baik dengan menyiapkan akomodasi untuk membantu perhelatan MotoGP yang sudah diagendakan;
- b. Peluncuran trayek bus rute Kupang – Dili sebagaimana pada Surat Keputusan Trayek ALBN khusus Indonesia – Timur Leste sudah terbit, dan akan dioperasikan oleh 2 (dua) perusahaan yang sedang proses pengajuan perizinan penyelenggaraan angkutan umum.

3. Capaian Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki kegiatan pendukung untuk 3 (tiga) tujuan SDGs tersebut, yaitu:

- a. Tujuan SDGs Poin 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- 1) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan, yaitu tercapainya pembangunan pelabuhan penyeberangan tersebar di 21 (dua puluh satu) lokasi, antara lain:
 - a) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Dalam Tahap IV (Prov. Sumatera Utara);
 - b) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Telo Tahap III (Prov. Sumatera Utara);
 - c) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Teluk Bungus Tahap III (Prov. Sumatera Barat);
 - d) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau (Kab. Natuna) Tahap IV (Prov. Riau & Kepri);
 - e) Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sagu-Sagu Lukit, Pada Lintas Penyeberangan Pulau Padang - Mengkapan (Prov. Riau & Kepri);
 - f) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan Tahap III, Kab. Siak (Prov. Riau & Kepri);
 - g) Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap III (Prov. Bengkulu Lampung);
 - h) Peningkatan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - Api Tahap II (MYC) termasuk supervisi (Prov. Sumsel Babel);
 - i) Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Kalianget (Sumenep) (Prov. Jatim);
 - j) Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul (Prov. Bali & NTB);
 - k) Manajemen Konstruksi Pembangunan Pelabuhan Bias Munjul (Prov. Bali & NTB);
 - l) Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo Kab. Ende Tahap II (Prov. NTT);
 - m) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu Tahap II (Prov. Sultra);
 - n) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua Tahap II (Prov. Sultra);
 - o) Rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Likupang Tahap II (Prov. Sulut);
 - p) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Moa Tahap IV (Prov. Maluku);
 - q) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat Tahap V (Prov. Maluku);
 - r) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Leti Tahap III (Prov. Maluku);

- s) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Weda (Lintas Weda-Patani-Gebe-Sorong) (Prov. Maluku Utara);
 - t) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Batanta Kab. Raja Ampat Tahap II (Prov. Papua & Papua Barat);
 - u) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak Kota Sorong Tahap III (Prov. Papua & Papua Barat).
- 2) Pembangunan Pelabuhan Sungai, yaitu tercapainya pembangunan pelabuhan sungai tersebar di 6 (enam lokasi), antara lain:
- a) Pembangunan Pelabuhan Sungai Sri Menanti Tahap IV (Prov. Sumsel Babel);
 - b) Pembangunan Dermaga Sei Ijum Kabupaten Kotim (Prov. Kalteng);
 - c) Pembangunan Dermaga Basirih dan Bapinang Tahap III Kabupaten Kotawaringin Timur (Prov. Kalteng);
 - d) Pembangunan Dermaga Sungai Kumai (Kumai Hilir dan Sei Kapitan) Tahap III Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan (Prov. Kalteng);
 - e) Pembangunan Dermaga Lupak Dalam Kapuas Kuala (dukungan Food Estate) (Prov. Kalteng);
 - f) Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Desa Benua Batu Ulu Kutai Timur Tahap II (Prov. Kaltim & Kaltara).
- 3) Pembangunan Pelabuhan Danau, yaitu tercapainya pembangunan pelabuhan danau tersebar di 8 (delapan) lokasi, antara lain:
- a) Pembangunan Pelabuhan Onan Rungu Tahap II (Prov. Sumatera Utara);
 - b) Pembangunan Pelabuhan Silalahi Tahap II (Prov. Sumatera Utara);
 - c) Pembangunan Pelabuhan Sipinggah Tahap III (Prov. Sumatera Utara);
 - d) Pembangunan Pelabuhan Porsea Tahap III (Prov. Sumatera Utara);
 - e) Pembangunan Dermaga Bedugul Tabanan Tahap V (Prov. Bali & NTB);
 - f) Pembangunan Dermaga Kedisan di Danau Batur Tahap III (Prov. Bali & NTB);
 - g) Pembangunan Dermaga Desa Trunyan di Danau Batur Tahap II (Prov. Bali & NTB);
 - h) Pembangunan Dermaga Kuburan di Danau Batur Tahap III (Prov. Bali & NTB).

- b. Tujuan SDGs Poin 11. Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan
- 1) Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan, yaitu tercapainya pembangunan dan pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 10 (sepuluh) kota metropolitan, yaitu:
 - a) Palembang;
 - b) Surakarta;
 - c) Denpasar;
 - d) Yogyakarta;
 - e) Medan;
 - f) Bandung;
 - g) Surabaya;
 - h) Banjarmasin;
 - i) Makassar; dan
 - j) Banyumas.
 - 2) Perlengkapan Jalan, yaitu tercapainya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk 33 (tiga puluh tiga) provinsi dengan 8 Kegiatan, adapun rincian kegiatan sebagaimana berikut:
 - a) Pengadaan dan Pemasangan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sebanyak 26 paket;
 - b) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Pemakai Jalan sebanyak 345 unit;
 - c) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan sepanjang 1.633.591 m²;
 - d) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan sepanjang 11.330 m;
 - e) Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan sebanyak 14.487 buah;
 - f) Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan sebanyak 2790 unit;
 - g) Pengadaan dan Pemasangan Rambu sebanyak 17.239 Unit;
 - h) Pengadaan dan Pemasangan Patok Lalu Lintas sebanyak 6.055 Buah.
- c. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
- 1) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 5 (lima) unit SBNP:
 - a) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Suar Darat di Pelabuhan Penyeberangan Boniton (Prov. Sulteng);

- b) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Suar Darat di Pelabuhan Penyeberangan Taipa (Prov. Sulteng);
- c) Pemeliharaan Rambu Suar Darat dan Laut Pelabuhan Penyeberangan Saiyong (Prov. Sulteng);
- d) Pemeliharaan Rambu Suar Darat dan Laut Pelabuhan Penyeberangan Toboli (Prov. Sulteng);
- e) Pemeliharaan Rambu Suar Darat dan Laut Pelabuhan Penyeberangan Kolonedale (Prov. Sulteng).

4. Capaian Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) – Perpres 34 Tahun 2022

Kebijakan Kelautan Indonesia adalah Pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung kebijakan tersebut dengan dilaksanakannya pembangunan pelabuhan penyeberangan dan kapal penyeberangan sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- 1) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelayang;
- 2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia;
- 3) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko;
- 4) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu;
- 5) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua;
- 6) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati Kab. Raja Ampat;
- 7) Pembangunan Kapal Penyeberangan Penumpang Ro-Ro 500 GT Lintas (Kaledupa – Tomia – Binongko).

5. Capaian Food Estate – Arahan Presiden Tahun 2021

Program *Food Estate* merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung program tersebut dengan tercapainya pembangunan pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- 1) Pembangunan Pelabuhan Sungai Sei Ijum;
- 2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Basirih Hulu – Bapinang Hulu; dan
- 3) Pembangunan Pelabuhan Sungai Lupak-Lupak Dalam Kab. Kapuas.

6. Capaian Kebijakan Satu Peta – Perpres 23 Tahun 2021

Kebijakan satu peta ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan data, terutama data spasial yang tidak standar dan tidak terintegrasi antar lembaga. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung program tersebut dengan tersedianya Informasi Geospasial Tematik (IGT) Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan Skala 1:50.000 dan sudah terintegrasi (Berita Acara Integrasi pada tanggal 28 Oktober 2022).

7. Capaian Program Pendukung PEN (Padat Karya) – Perpres 108 Tahun 2020

Program ini berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi warga miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung program tersebut dengan tercapainya kegiatan Padat Karya di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dan 318 (tiga ratus delapan belas) kabupaten/kota pada tahun 2022. Dengan rincian menyerap sebanyak 7.698 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan) Orang atau 213.242 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua) Orang per Hari.

8. Capaian 15 Danau Prioritas – Perpres 2021

Dari 15 (lima belas) Danau Prioritas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkontribusi atas Kegiatan 2 (dua) Danau Prioritas, yaitu:

- 1) Danau Matano (Sulteng, Kab. Luwu Timur), yaitu dengan tersedianya percontohan kapal motor ramah lingkungan (Pemda Kab. Luwu Timur);
- 2) Danau Batur (Bali, Kab. Bangli), yang akan mulai dilaksanakan pembangunan bus air.

9. Capaian 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) – Perpres 49 Tahun 2016

Dalam mendukung akses dan konektivitas terhadap Kawasan Pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas di kawasan pariwisata dengan pembangunan prasarana dan sarana transportasi darat, peningkatan keselamatan transportasi jalan, dan penyediaan angkutan antarmoda, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melaksanakan beberapa kegiatan pendukung di tahun 2022, yaitu:

a. DPSP Danau Toba dengan dukungan sebagai berikut:

- 1) Subsidi Angkutan Antarmoda sebanyak 4 (empat) trayek yang mampu melayani 102 (seratus dua) Penumpang dengan 4 (empat) Bus;
- 2) Pembangunan faspim pendukung BRT;
- 3) Penyelesaian pembangunan lanjutan Pelabuhan Danau di 4 (empat) Lokasi, antara lain:
 - a) Pelabuhan Onan Rungu;
 - b) Pelabuhan Silalahi;
 - c) Pelabuhan Sipinging;
 - d) Pelabuhan Porsea.

Dengan total lintasan sebanyak 6 (enam) Lintasan yang mampu melayani 912 (Sembilan ratus dua belas) Penumpang dan dilayani oleh 5 (lima) unit Kapal dan 2 (dua) unit Bus Air.

b. DPSP Borobudur dengan dukungan sebagai berikut:

- 1) Subsidi Angkutan Antarmoda sebanyak 5 (lima) trayek yang mampu melayani 224 (dua ratus dua puluh empat) Penumpang dengan 16 (enam belas) Bus Commuter Hiace;
- 2) Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur.

c. DPSP Labuan Bajo dengan dukungan sebagai berikut:

- 1) Subsidi Angkutan Antarmoda sebanyak 1 (satu) trayek yang mampu melayani 60 (enam puluh) penumpang dengan 4 (empat) Bus Commuter Hiace;
- 2) Pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS);
- 3) Pembangunan faspim pendukung BRT.

d. DPSP Mandalika dengan dukungan sebagai berikut:

- 1) Subsidi Angkutan Antarmoda sebanyak 5 (lima) trayek yang mampu melayani 140 (seratus empat puluh) penumpang dengan 10 (sepuluh) Bus Commuter Hiace;
- 2) Pembangunan faspim pendukung BRT;
- 3) Dukungan Kegiatan MotoGP (Sewa Bus).

- e. DPSP Likupang dengan dukungan sebagai berikut:
- 1) Subsidi Angkutan Antarmoda 3 (tiga) trayek yang mampu melayani 196 (serratus Sembilan puluh enam) penumpang dengan 14 (empat belas) Bus Commuter Hiace;
 - 2) Subsidi Angkutan Jalan sebanyak 11 trayek yang mampu melayani 361 (tiga ratus enam puluh satu) penumpang dengan 19 (Sembilan belas) Bus Sedang;
 - 3) Subsidi Angkutan Penyeberangan sebanyak 3 (tiga) lintasan yang mampu melayani 425 (empat ratus dua puluh lima) penumpang dengan 3 (tiga) Kapal;
 - 4) Pembangunan pelabuhan penyeberangan Likupang dengan skema kontrak MYC (2021-2022) sebanyak 5 (lima) lintasan yang mampu melayani 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) oenumpang dengan 5 (lima) Kapal.

BAB V

PENYEDIAAN SARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

I. ANGKUTAN JALAN

1. Izin penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Dikutip melalui Spionam, Sektor Transportasi Darat telah melayani 2.246 Trayek, 1372 trayek diantaranya pada 41 kawasan melayani Kawasan Strategis Nasional sebagaimana telah tertuang pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DRJD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia.

Seiring dengan perkembangan era digitalisasi saat ini maka semakin tinggi tuntutan masyarakat atas peningkatan pelayanan di bidang perizinan angkutan orang di jalan, sehingga saat ini sedang dilakukan pengembangan aplikasi perizinan angkutan orang di jalan berbasis web “spionam 2.0”. Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan suatu uji coba UAT (User Acceptance Test) atas pengembangan aplikasi dimaksud dengan melibatkan verifikator perizinan baik verifikator angkutan orang antar kota dan verifikator angkutan barang, admin dari perusahaan angkutan, bagian perencanaan setditjen perhubungan darat dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan terkait kesiapan aplikasi yang dikembangkan sekaligus integrasi dengan aplikasi dari K/L lain yakni OSS dan Simponi Kemenkeu, migrasi data hingga produksi di masa transisi implementasi aplikasi spionam 2.0.

Kegiatan dimaksud di tahun 2023 telah diselenggarakan di kota bandung, Jawa Barat dimana pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan terkait rencana konversi data jaringan trayek lama pada SPIONAM dengan konsep SK Dirjen Perhubungan Darat yang baru tentang Penetapan Trayek dan Jumlah Kebutuhan Kendaraan Pada Pelayanan Angkutan Antarkota Antarprovinsi di Seluruh Indonesia guna mendukung pengembangan aplikasi SPIONAM.

2. Izin penyelenggaraan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)

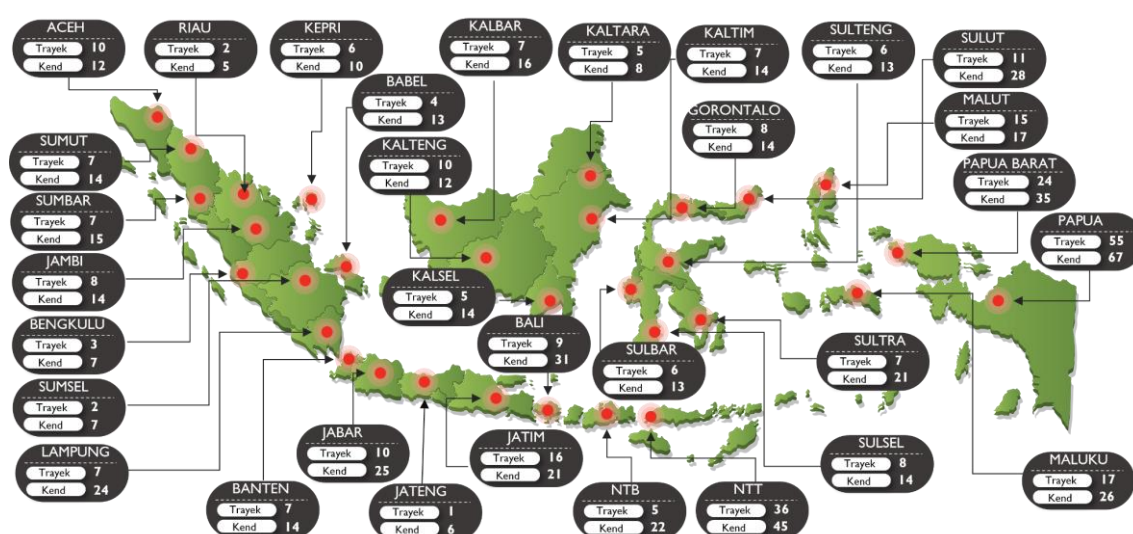
Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.6298/AJ.205/DJRD/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan pada Trayek Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Seluruh Indonesia, terdapat 4 (empat) trayek ALBN yang ditetapkan dan semua trayek yang ditetapkan telah dilayani. 4 trayek ALBN tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek ALBN
1.	6171100001	Pontianak (Indonesia) - Ngambang (Indonesia) - Entikong (Indonesia) - Tebedu (Malaysia) – Seriam (Malaysia) – Kuching (Malaysia)
2.	6171100002	Pontianak (Indonesia) - Ngambang (Indonesia)- Entikong (Indonesia)- Tebedu (Malaysia) – Serian (Malaysia) - Kuching (Malaysia)
3.	6171990001	Pontianak (Indonesia) - Ngambang (Indonesia)- Entikong (Indonesia)- Tebedu (Malaysia)- Seriam (Malaysia) – Kuching (Malaysia)
4.	6171990002	Pontianak (Indonesia) - Entikong (Indonesia)- Serian (Malaysia) - Sriaman (Malaysia) - Sarike (Malaysia) – Sibu (Malaysia) – Bintulu (Malaysia) - Miri (Malaysia) – Kuala (Brunei Darussalam) - Belati (Brunei Darussalam) -Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam)

Lintasan Trayek ALBN

3. Keperintisan Angkutan Jalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3695 Tahun 2023 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023, layanan Keperintisan Angkutan Jalan telah dilaksanakan pada 330 Trayek dari 32 provinsi yang melayani trayek perintis dengan pelaksanaan subsidi melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat di Indonesia.



Peta Sebaran Pelayanan Angkutan Jalan Perintis

Persebaran Jumlah Penduduk yang tidak merata menyebabkan adanya beberapa daerah yang terisolir dari daerah lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan Angkutan dan aksesibilitas untuk dapat menjangkau daerah - daerah lain guna menunjang aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat sehingga dapat memacu perkembangan perekonomian daerah terpencil yang lebih maju.

Pemberian Subsidi Angkutan Jalan Perintis merupakan perwujudan kehadiran Pemerintah terhadap konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan Angkutan Umum yang terjangkau.

No	Tahun	Provinsi	Trayek
1	2019	32 Provinsi	307
2	2020	32 Provinsi	322
3	2021	32 Provinsi	324
4	2022	32 Provinsi	338
5	2023	32 Provinsi	330

Perkembangan Trayek Angkutan Jalan Perintis

4. Subsidi Angkutan Antarmoda untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

Dukungan penyelenggaraan Angkutan Antarmoda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4090 Tahun 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2023 terdapat 32 (tiga puluh dua) trayek yang beroperasi di tahun 2023, meliputi:

- a. Sebanyak 24 (dua puluh empat) trayek melayani pada 7 (tujuh) kawasan dari 10 kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP);
- b. Sebanyak 8 trayek melayani di luar kawasan DPP akan tetapi masuk dalam kawasan KSPN yang tidak dihitung pada perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Darat.

5. Kegiatan Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Mendukung Tol Laut

Kegiatan subsidi angkutan barang perintis merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah, Peraturan Presiden (PERPRES) 70 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (3TP), dalam menekan disparitas harga, atau satu harga pada seluruh wilayah Indonesia. terutama untuk harga barang kebutuhan pokok dan penting yang telah ditetapkan oleh kementerian perdagangan.

Kegiatan subsidi angkutan barang perintis merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Tol Laut sesuai dengan arahan presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan (3TP). Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama dengan koordinasi antar kementerian dan Lembaga terkait dalam mewujudkan Disparitas Harga pada wilayah 3T1P. Diharapkan dengan kehadiran Subsidi angkutan barang perintis ini akan mengurangi Disparitas yang terjadi pada wilayah 3T1P

Tujuan pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan barang perintis ini adalah dalam rangka mensukseskan program Presiden tentang kesetaraan satu harga pada seluruh wilayah Indonesia, sehingga Disparitas harga pada wilayah 3T1P dapat diminimalisir semaksimal mungkin, seluruh warga negara Indonesia dapat merasakan pembangunan yang merata.

Dalam pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan barang perintis sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Angkutan Jalan yakni penyiapan dan evaluasi di bidang angkutan barang, sehingga pengawasannya dilakukan melalui kegiatan Monitoring Subsidi Angkutan Barang dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Angkutan Barang Umum.

a. Identifikasi Masalah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya :

- 1) Masih ditemukan panjang lintasan eksisting angkutan barang perintis tidak sesuai dengan Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

- 2) Aplikasi Fleet Management System (FMS) masih dalam tahap pengembangan sehingga proses pengawasan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang perintis dilakukan secara manual
- 3) Perum DAMRI tidak mampu menyediakan kendaraan sesuai dengan SPM dikarenakan keterbatasan armada di wilayah 3T1P. Kendaraan yang bisa melalui jaringan lintas tersebut adalah kendaraan double gardan, sedangkan Perum Damri tidak memiliki moda tersebut.

Lokasi yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 10 provinsi pada tahun 2023, sesuai dengan tabel berikut :

No	Tanggal	Lokasi	Perusahaan
1.	10-13 Oktober 2023	Timika	• BPTD • PERUM DAMRI
2.	3-6 Oktober 2023	Merauke	• PERUM DAMRI • PT. SBL
3.	14-16 November 2023	Tarakan	• PERUM DAMRI • PT. PELINDO
4.	13-16 November 2023	Batam	• BPTD • PERUM DAMRI • PT. MITRA HARINDO • PT. HIJAU MONANG JAYA
5.	9-13 Oktober 2023	Banda Aceh (Blang Pidie)	• BPTD • PERUM DAMRI
6.	17-20 Oktober 2023	Banda Aceh (Blang Bintang)	• BPTD • PERUM DAMRI
7.	30 Agustus - 2 September 2023	Banyuwangi	• PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA • PT. TRANS WASTE MODA

No	Tanggal	Lokasi	Perusahaan
8.	13-17 November 2023	Pekanbaru	• PT. AWAL BROS BUMI PUSAKA • PT. ISKANDAR SARI ANDALAS • PT. PUTRO SINDO • PT. MAS ARTHA SARANA • PT. TRANS MULTI CARGO • PT. TAMAN BUKIT MAS • PT. PETRO ARTHA • PT. BERKAT KARUNIA PHALA • PT. IBRA HARISINDO BERJAYA • PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI • PT. GURINDAM SINAR BERKAH • PT/ SHALI RIAU LESTARI • PT. CAHAYA RIAU • PT. BUMI TRIPA LESTARI • PT. KIM MANDIRI ABADI
9.	16-19 Oktober 2023	Manado	• PT. SINAR PRATAMA CEMERLANG • PT. MULIA BAKTI • PT. SAGRAHA SATYA SAWAHITA • PT. HIJAU PRATAMA NUSANTARA
10.	14-16 Agustus 2023	Alor	• REJEKI RATU ISLAMI • BUNKER SERVICE INDONESIA

No	Tanggal	Lokasi	Perusahaan
11.	9-11 Agustus 2023	Makassar	- PT. CELEBES CIPTA PRATAMA - PT. MALOGA PRIMA REZEKY

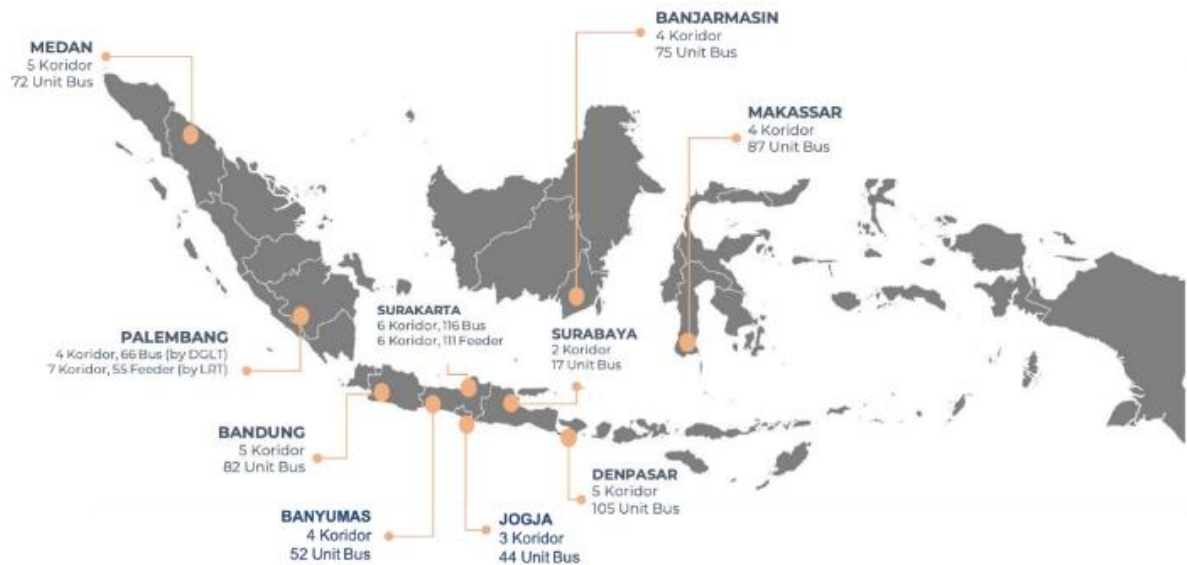
Sumber : Data Subdit AB, 2023

6. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan Dengan Skema Buy the Service (BTS)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 158, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Merujuk hal ini perlu sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Angkutan Massal Berbasis Jalan yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat serta memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan penumpang umum perkotaan. Dukungan Pemerintah Pusat hadir melalui program pemberian subsidi pengembangan transportasi perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS). Program Buy The Service (BTS) dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau *quality licensing*, sehingga operator wajib untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang mengedepankan pada 6 aspek yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Program Buy The Service (BTS) ini juga dikenal dengan nama "TEMAN BUS" yang merupakan akronim dari Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman. Program yang didukung oleh teknologi telematika yang andal dan berbasis non tunai ini telah dilaksanakan Tahun 2020 di 5 (lima) kota percontohan dan ditambahkan 5 (lima) kota baru sehingga menjadi 10 (sepuluh) kota di Tahun 2021. Lokasi pelaksanaan program Buy The Service (BTS) adalah:

- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Medan; | f. Makassar; |
| b. Palembang; | g. Banjarmasin; |
| c. Yogyakarta; | h. Bandung; |
| d. Surakarta; | i. Banyumas; |
| e. Denpasar; | j. Surabaya. |

Berikut ini adalah Profil Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan *Skema Buy The Service* (BTS):



Profil Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy the Service (BTS)

Pada Tahun 2023 Total bus Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan dengan Skema Buy The Service (BTS) sebanyak 716 bus, dan 111 MPU. Sedangkan jumlah koridor layanan sebanyak 49 koridor. Adapun rincian koridor layanan dapat dilihat jelas pada tabel dibawah ini:

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
1	Medan	PT. Medan Bus Transport	1	Pinang Baris - Lapangan Merdeka	Bus Besar	22.24
			2	Terminal Amplas - Lapangan Merdeka	Bus Besar	20.68
			3	Belawan - Lapangan Merdeka	Bus Sedang	49.48
			4	Medan Tuntungan - Lapangan Merdeka	Bus Sedang	36.75

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
			5	Tembung - Lapangan Merdeka	Bus Sedang	15.47
2	Palembang	PT. Trans Musi Palembang Jaya	1	Terminal Alang Alang Lebar - Halte Integrasi Bawah Ampera	Bus Besar	39
			2	Terminal Sako - Palembang Icon	Bus Sedang	35
			3	Palembang Icon - Terminal Plaju	Bus Sedang	23.6
			4	Alang-Alang Lebar - Talang Jambe	Bus Sedang	28
3	Yogyakarta	PT. Jogja Tugu Trans	1	Terminal Condong Catur - Terminal Pakem PP	Bus Sedang	37
			2	Terminal Condong Catur - Malioboro (via Terminal Jombor)	Bus Sedang	32
			3	Bandara Adisutjipto - Malioboro (via Terminal Prambanan)	Bus Sedang	36.4
4	Surakarta	PT. Bengawan Solo Trans	1	Bandara Adi Sumarmo - Terminal Palur	Bus Sedang Long	47.65
			2	Terminal Palur - Sub Terminal Kerten	Bus Sedang S	29.55

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
			3	Terminal Kartosuro - Taman Lansia	Bus Sedang P	37.89
			4	Terminal Kartosuro - Terminal Palur Via Terminal Tirtonadi	Bus Sedang P	42.00
			5	Terminal Kartosuro - Simpang Sidan	Bus Sedang S Baru	52.60
			6	Terminal Tirtonadi - Solo Baru	Bus Sedang P	21.04
		PT. Transport Global Mandiri	7	RSUD Ngipang - Pasar Klewer	Feeder	18.80
			8	Sub Terminal Tipe C Pelangi - Cemani (Lotte Grosir)	Feeder	23.10
			9	Sub Terminal Tipe C Pelangi - Sub Terminal Semanggi	Feeder	22.20
			10	Pasar Klewer - Terminal Palur	Feeder	15.50
			11	Pasar Klewer - Terminal Tirtonadi	Feeder	22.90
			12	Pasar Klewer - Gentan	Feeder	24.10

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
5	Denpasar	PT. Satria Trans Jaya	1	Terminal Pesiapan - Central Parkir Kuta	Bus Sedang	60.50
			2	Terminal Ubung - Bandara Ngurah Rai	Bus Sedang	46.30
			3	Pantai Matahari Terbit - Terminal Ubung	Bus Sedang	40.30
			4	GOR Ngurah Rai - Sentral Parkir <i>Monkey Forest</i>	Bus Sedang	57.40
			5	Sentral Parkir Kuta - Politeknik Negri Bali	Bus Sedang	61.20
6	Bandung	Perum DAMRI	1	Leuwipanjang - Soreang	Bus Besar	40.42
		PT. Big Bird Pusaka	2	Kota Baru Parahyangan - Alun-Alun Kota Bandung	Bus Sedang	44.48
			3	Baleendah - BEC	Bus Sedang	37.94
		Perum DAMRI	5	Dipatiukur - Jatinangor Via Tol	Bus Besar	72.02
			EV 4	Leuwipanjang - Dago	Medium Listrik	21.14
7	Surabaya	PT. Seduluran Bus Suroboyo	2	Kejawen Putih Tambak - UNESA	Bus Besar	42.76

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
		Perum DAMRI	EV 1	Gunung Anyar Timur - ITS - Kenjeran Park via MERR (non Tol)	Medium Listrik	28.00
8	Makassar	PT. Sinarjaya Megah Langgeng	1	Panakukkang Square - Pelabuhan Galesong	Bus Sedang	69.60
			2	Mall Panakkukang - Bandara Sultan Hasanuddin	Bus Sedang	52.30
			3	Kampus 2 PNUP - Kampus 2 PIP	Bus Sedang	43.30
			4	Kampus Teknik Unhas Gowa - Panakukkang Square	Bus Sedang	33.50
9	Banjarmasin	PT. Bagong Dekaka Makmur	1	Terminal Km 17 – Terminal Simpang Empat	Bus Sedang	41.69
			2	Terminal Km 17 – Halte Km 0	Bus Sedang	37.12
			3	Terminal Induk Km 6 - UMB	Bus Mikro	36.24
			4	Terminal Km 17 - Kantor Kecamatan Bati-Bati	Bus Sedang	47.66
10	Banyumas		1	Terminal Ajibarang - Pasar Pon	Bus Sedang	36.24

No	Kota	Operator	Koridor	Nama Koridor	Tipe	Panjang Koridor (KM)
		PT. Banyumas Raya Transportasi	2	Terminal Notog Patikraja - Terminal Baturraden	Bus Sedang	47.66
			3	Terminal Bulupitu Purwokerto - Terminal Kebondalem (Loop A)	Bus Sedang	31.72
				Terminal Bulupitu Purwokerto - Terminal Kebondalem (Loop B)	Bus Sedang	31.93

Sumber : Direktorat Angkutan Jalan

Tahapan Pelaksanaan Program Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Buy The Service (BTS) tahun 2023 terdiri dari :

- Tahap Pra Rencana yaitu Pemerintah daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan memperhatikan RPJMN dan RENSTRA;
- Tahap Perencanaan yaitu Persetujuan atas permohonan ditindaklanjuti dengan review studi oleh Direktorat Angkutan Jalan;
- Tahap Pra Pelaksanaan yaitu PPK Direktorat Angkutan Jalan melakukan proses pengadaan Operator, Manajemen Pengelola dan Penyedia Perangkat Pembayaran;
- Tahap Pelaksanaan yaitu Manajemen Pengelola melakukan survey final terhadap rute dan titik pemberhentian bus kemudian Operator mulai melakukan operasional bus.

Sedangkan Komponen Utama Program Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Buy The Service (BTS) tahun 2023 terdiri dari :

- Operator Subsidi Layanan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Buy The Service

- b. Pendampingan Manajemen Proyek Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan Skema Buy The Service
- c. Fleet Management System Operasional Angkutan Perkotaan Dengan Skema Buy The Service
- d. Jasa Rekonsiliasi dan Settlement (Payment Gateway)

Kegiatan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan Dengan Skema Buy The Service (BTS) di Tahun 2023 terdiri dari :

- a. Evaluasi Program Layanan Angkutan Umum Perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) merupakan Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program BTS yang telah berjalan selama 1 (satu) tahun yakni pada tahun 2023;
- b. Kegiatan Pembahasan Service Loan Agreement (SLA) merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum;
- c. Kegiatan Persiapan Handover program layanan angkutan umum perkotaan dengan Skema Buy The Service (BTS) dengan Pemerintah Daerah merupakan pemberian bimbingan Teknis untuk penyelenggaraan Operasional BTS terkait Kelembagaan, Operasional dan Monitoring serta evaluasi hingga Guideline pemberian subsidi melalui APBD.

Adapun dokumentasi kegiatan Buy The Service di tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Kegiatan Evaluasi BTS dengan Operator



Kegiatan Evaluasi BTS dengan Operator



Kegiatan Persiapan Handover dengan Pemerintah Daerah

II. SARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor Non-Statis (baba 2)

Alat Uji Berkala Non Statis merupakan salah satu bentuk mitigasi bagi Kabupaten/Kota yang belum terakreditasi sehingga dapat menggunakan Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non Statis untuk melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga tercapai kendaraan yang laik jalan.



Unit Kendaraan beserta Alat Uji Non-Statis

Tujuan:

- a. Menghadirkan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Yang Belum Memiliki Fasilitas Pengujian Atau Belum Terakreditasi Melalui Skema Kerjasama;
- b. Menunjang Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di BPTD;
- c. Menunjang Kegiatan Pengujian Tipe Kendaraan Konversi Listrik Di Daerah.

Manfaat:

Meningkatkan Pelayanan Untuk Memberikan Jaminan Kendaraan Yang Berkeselamatan Secara Teknis Melalui Pengujian Berkala Berupa Pengujian Persyaratan Teknis Dan Pengujian Laik Jalan Dengan Menggunakan Unit Pemeriksaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Non-Statistis.

Outcome:

- a. Pemerintah Melalui BPTD Dapat Menghadirkan Pelayanan Pengujian Berkala Dengan Menggunakan Unit Pemeriksaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Non Statistis Melalui Skema Kerjasama Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
- b. Meningkatkan Pelayanan Pengujian Berkala Di Kabupaten/ Kota;
- c. Meningkatkan Pelayanan Uji Tipe Kendaraan Konversi Listrik Di Daerah.

2. Penerbitan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)

Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e). BLU-e merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah masyarakat dan pengusaha dalam pelayanan uji kendaraan bermotor. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran bernomor AJ.502/33/7/D8JD/2020 tentang Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, sebagai tindak lanjut ditemukannya bukti lulus uji laik jalan kendaraan bermotor palsu di beberapa daerah. Terhitung 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dioperasikan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi, dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa kartu uji dan tanda uji.

3. Akreditasi UPUBKB

Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah Proses Pemberian Pengakuan Formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi yang merupakan

pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Adapun penilaian pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penilaian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Dari jumlah 514 Kabupaten/ Kota di Indonesia terdapat 471 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Adapun rincian hasil penilaian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Akreditasi A sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) Unit;
- b. Akreditasi B sebanyak 256 (Dua Ratus Lima Puluh Enam) Unit;
- c. Akreditasi B (Bersyarat) sebanyak 2 (Dua) Unit;
- d. Akreditasi C sebanyak 3 (Tiga) Unit;
- e. Tidak Akreditasi sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas);
- f. Tidak menyelenggarakan sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh).

4. Penerbitan SUT dan SRUT

Untuk mendukung keselamatan dan keamanan Transportasi Darat, setiap kendaraan bermotor perlu dilakukan pengujian terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat, dirakit atau diimpor secara massal dan dibuktikan dengan penerbitan Sertifikat Uji Tipe selanjutnya dapat diproduksi secara massal dibuktikan dengan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe, berikut Rekapitulasi Capaian Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT):

Jumlah Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) Number of Type Approval Certificate Tahun 2023															
No.	Uraian Description	Grafik Graph	Satuan Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Kendaraan khusus <i>Special - purpose vehicle</i>		Unit Units	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	1	0
2	Roda Tiga <i>Three-wheeler</i>		Unit Units	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3	Landasan <i>Whale-base</i>		Unit Units	5	2	5	1	2	9	4	2	3	1	5	10
4	Mobil Barang <i>Truck</i>		Unit Units	4	3	5	1	9	4	1	0	2	4	3	8
5	Mobil Bus <i>Bus</i>		Unit Units	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0
6	Mobil Penumpang <i>Passenger car</i>		Unit Units	26	22	12	10	31	25	24	27	38	17	22	19
7	Sepeda Motor <i>Motorcycle</i>		Unit Units	10	10	22	8	23	15	12	11	9	12	11	24
Jumlah/ Total				45	37	44	20	65	54	42	42	52	35	42	61

Tabel Penerbitan SUT Periode 2022

Data Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Number of Type Approval Registration Certificate Tahun 2023															
No.	Uraian Description	Grafik Graph	Satuan Unit	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Kendaraan khusus <i>Special - purpose vehicle</i>		Unit Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Roda Tiga <i>Three-wheeler</i>		Unit Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mobil Barang <i>Truck</i>		Unit Units	19.221	15.834	16.798	9.279	15.366	12.507	14.882	13.729	12.393	11.639	10.754	8.868
4	Mobil Bus <i>Bus</i>		Unit Units	4	273	204	486	674	276	328	388	445	476	502	751
5	Mobil Penumpang <i>Passenger car</i>		Unit Units	67.978	59.239	81.977	45.485	63.922	54.612	69.707	66.489	61.186	63.553	60.024	64.804
6	Sepeda Motor <i>Motorcycle</i>		Unit Units	631.377	577.398	632.352	380.474	547.800	523.233	533.170	551.237	518.659	532.138	588.251	463.385
Jumlah/ Total				718.580	652.744	731.331	435.724	627.762	590.628	618.087	631.843	592.683	607.806	659.532	537.808

Tabel Penerbitan SUT Periode 2022

III. SARANA TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Pembangunan Kapal Penyeberangan

Di Tahun 2023 Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan melalui Subdirektorat Sarana melakukan 1 (satu) unit pembangunan kapal yaitu:

a. KMP Bahtera Nusantara 03

KMP. Bahtera Nusantara 03 dibangun oleh galangan kapal PT. Karimun Anugrah Sejati Batam dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan anggaran dengan total sebanyak 96,5 miliar rupiah. Kapal tersebut akan dioperasikan di lintas Kepulauan Dompak – Matak – Penagi (Natuna). KMP. Bahtera Nusantara 03 berjenis kapal penumpang Ro-Ro (Roll on – Roll of) dimana bisa memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal dengan penggerakannya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri juga. Ukuran Kapal tersebut

memiliki Panjang keseluruhan 71,9 meter dengan lebar 14 meter dan tinggi 4,6 meter serta memiliki GT 1500 yang telah selesai pada tahun 2022.

Kegiatan Peresmian Kapal Penyeberangan Penumpang Ro – Ro 1500 GT lintas Tanjung Uban – Tambelan – Sintete (KMP. BAHTERA NUSANTARA 03) pada tanggal 01 s.d 05 Februari 2023 di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, Kepulauan Riau.



Konstruksi KMP Bahtera Nusantara 03





Peresmian KMP Bahtera Nusantara 03

2. Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Komersil dan Perintis

Pada tahun anggaran 2023 jumlah lintasan penyeberangan di Indonesia berjumlah 357 lintas yang terdiri dari 83 lintas komersial dan 247 lintas perintis. Adapun jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2023 berjumlah 427 unit kapal, dengan komposisi kapal perintis sebanyak 106 unit kapal dan kapal komersial sebanyak 321 unit kapal.

Subsidi operasional keperintisan angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan upaya pemerintah dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Indonesia terutama pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan serta mendukung kawasan pariwisata nasional.

Kegiatan subsidi keperintisan angkutan penyeberangan juga memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja rasio konektivitas transportasi darat, dimana layanan angkutan penyeberangan perintis turut melayani pada 61 Kawasan Prioritas Nasional (KSN) dari total 93 Kawasan Prioritas Nasional yang ditetapkan.



Gbr. KMP. Bamega lintas Pulau Laut - Sebuku



Gbr. KMP. Bontoharu lintas



Gbr. KMP

Kapal yang beroperasi di Lintasan Komersial dan Perintis

BAB VI

PENYEDIAAN PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

I. LALU LINTAS & KESELAMATAN JALAN

1. Perlengkapan Jalan

Perkembangan realisasi Jumlah Perlengkapan Jalan pada Tahun 2016 sampai dengan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

TAHUN	APIL L	WARNING LIGHT	MARKA	PAKU JALAN	RAMBU	RPP J	APJ	CERMIN TIKUNGAN	GUADRAIL	DELINATOR
	(unit)	(unit)	(m')	(buah)	(buah)	(buah)	(unit)	(buah)	(unit)	(unit)
2016	33	442	4.166.842	144.940	20.852	613	4.765	21	17.269	31.272
2017	51	599	3.253.149	87.224	38.996	480	5.581	52	12.535	33.044
2018	35	660	2.755.452	38.372	23.561	852	8.125	560	32.559	33.483
2019	19	592	2.555.787	64.352	23.933	309	5.434	528	26.876	40.197
2020	50	388	3.221.738	28.569	15.488	293	5.133	83	21.643	13.956
2021	34	473	2.494.491	50.574	19.585	794	5.212	98	21.878	18.008
2022	13	163	1.062.297	9.388	6.780	163	1.785	-	4.852	2.722
2023	68	237	1.428.712	30.083	12.930	258	8.574	-	7.368	4.274
Jumlah	303	3554	119.509.756	423.419	453.502	3762	44.609	1.342	137.612	176.956

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Jalan – 2023

2. Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan RASS (Rute Aman Selamat Sekolah) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Karena anak-anak sekolah khususnya yang baru duduk di Sekolah dasar masih sangat rentan dalam berlalu lintas khususnya pada saat menyeberang jalan di depan sekolah, ZoSS terdiri dari trotoar, warna jalan di depan sekolah biasanya warna merah dan terdapat tulisan ZoSS, rambu lalu lintas, markah jalan, dan lampu lalu lintas. Pada tahun 2023 terdapat beberapa wilayah pembangunan ZoSS dan RASS, antara lain:

a. Kalimantan Timur

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah
----	--------------	----------------

1.	SDN 016 BALIKPAPAN UTARA	Jl. Soekarno Hatta No.184, Karang Joang,Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
2.	SDN 029 BALIKPAPAN UTARA	Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
3.	SDN 003 WARU	Jl. Negara, Api-API, Kec. Waru, Kab.Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
4.	SDN 013 PENAJAM PASER UTARA	Jl. Penajam - Kuaro No.22, Giri Mukti, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,Kalimantan Timur
5.	SDN 009 PENAJAM PASER UTARA	Jl. A. Yani, Sotek, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
6.	SMKN 6 PENAJAM PASER UTARA	Semoi Dua, Kec. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7.	SDN 008 WARU	Jl. Penajam - Kuaro, Waru, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

ZoSS dan RASS Provinsi Kalimantan Timur



*ZoSS Berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.184, Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur*



ZoSS Beralamat di Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur



ZoSS Berlokasi di Jl. Negara, Api-Api, Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

II. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Terminal Penumpang

Jumlah Terminal Penumpang Tipe A tahun 2023 terdapat 128 terminal yang terdata di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	4	5	5	5	5	5	5
2	Sumatera Utara	2	2	6	6	6	6	6
3	Sumatera Barat	5	5	5	5	5	5	5
4	R i a u	3	3	4	4	4	4	4
5	Jambi	4	4	4	4	4	4	4
6	Bengkulu	1	1	2	2	2	2	2
7	Sumatera Selatan	5	5	7	7	7	7	7
8	Lampung	2	2	2	2	2	2	2
9	Kalimantan Timur	2	2	2	2	2	2	2
10	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	1	1

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	1	1
12	Kalimantan Barat	3	2	2	2	2	2	2
13	DKI Jakarta	4	3	2	3	3	2	3
14	Jawa Barat	11	11	15	14	14	14	14
15	Jawa Tengah	18	18	19	19	19	19	19
16	DI Yogyakarta	2	2	2	2	2	2	2
17	Jawa Timur	16	16	19	19	19	19	19
18	Bali	1	1	1	1	1	1	1
19	Sulawesi Utara	4	4	4	4	4	4	5
20	Sulawesi Selatan	3	3	4	5	5	5	5
21	Sulawesi Tengah	1	1	2	2	2	2	2
22	Sulawesi Tenggara	-	-	1	1	1	1	1
23	Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	3	3	3
24	Nusa Tenggara Timur	1	2	2	2	2	2	2
25	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
26	Papua	1	1	1	1	1	1	1
27	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	1	2	2	2	2	2	2
29	Babel	-	-	-	-	-	-	-
30	Banten	6	6	6	6	6	6	6
31	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33	Sulawesi Barat	2	2	2	2	2	2	2
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah/ Total		107	108	126	127	127	126	128

Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat – 2023

Data Perkembangan Terminal Penumpang Tipe A 2023

2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Jumlah UPPKB tahun 2023 terdapat 140 yang terdata di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aceh	2	2	2	2	2	2	2

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Sumatera Utara	13	13	13	13	13	12	13
3	Sumatera Barat	9	9	9	9	9	9	9
4	Riau	3	3	3	3	3	4	4
5	Jambi	4	4	4	4	4	4	4
6	Bengkulu	2	2	2	2	2	2	2
7	Sumatera Selatan	5	5	5	5	5	7	7
8	Lampung	3	3	3	3	3	3	3
9	Kalimantan Timur	1	1	1	3	3	3	5
10	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	-	3	4
11	Kalimantan Tengah	2	2	2	2	2	2	2
12	Kalimantan Barat	6	6	6	6	6	6	6
13	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Barat	8	8	8	8	8	7	7
15	Jawa Tengah	14	14	14	14	14	14	14
16	DI Yogyakarta	3	3	3	3	3	3	3
17	Jawa Timur	20	20	20	20	20	20	20
18	Bali	2	2	2	2	2	2	2
19	Sulawesi Utara	3	3	3	3	3	3	3
20	Sulawesi Selatan	12	12	12	12	12	12	12
21	Sulawesi Tengah	4	4	4	4	4	4	4
22	Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	1	1	1
23	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2	2	2
24	Nusa Tenggara Timur	4	4	4	4	4	4	4
25	Maluku	1	1	1	1	1	1	1
26	Papua	-	-	-	-	-	-	-
27	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	2	2	2	2	2	2	2
29	Babel	-	-	-	-	-	-	-
30	Banten	3	3	3	3	3	3	3

No.	Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31	Kepulauan Riau	-	-	-	3	3	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
33	Sulawesi Barat	3	3	3	3	3	3	3
34	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah/Total		134	134	134	136	136	137	140

Sumber : Direktorat Prasarana Perhubungan Darat – 2023

Data Perkembangan Terminal Penumpang Tipe A 2023

3. Pembangunan Terminal Barang Internasional

Pembangunan Terminal Barang Internasional di 4 (empat) Lokasi Pembangunan Lanjutan, antara lain:

- Terminal Barang Internasional Aruk, Provinsi Kalimantan Barat;
- Terminal Barang Internasional Nanga Badau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Terminal Barang Internasional Motaain (SBSN), Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- Terminal Barang Internasional Skouw, Provinsi Papua.

III. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

1. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan



Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Klademak dan Siompu (Selesai)

No	Provinsi	Lokasi
1	Bali	Pelabuhan Munjul (Selesai)
2	Sulawesi Tenggara	Pelabuhan Siompu (Selesai)
		Pelabuhan Kadatua (Selesai)

No	Provinsi	Lokasi
3	Maluku Utara	Pelabuhan Weda (Selesai)
4	Papua Barat	Pelabuhan Klademak (Selesai)
		Pelabuhan Batanta
		Pelabuhan Salawati
5	Sumatera Utara	Pelabuhan Pulau Telo
		Pelabuhan Teluk Dalam
6	Riau	Pelabuhan Sagu-Sagu Lukit
7	Kepulauan Riau	Pelabuhan Sedanau
8	Maluku	Pelabuhan Elat
		Pelabuhan Leti

Sumber : Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat – 2023

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan di 13 lokasi

2. Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan pada tahun 2023 di 17 (tujuh belas) lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Lokasi
1	Aceh	Pelabuhan Sinabang
		Pelabuhan Singkil
2	Sumatera Utara	Pelabuhan Gunung Sitoli
3	Sumatera Barat	Pelabuhan Teluk Bungus
		Pelabuhan Teluk Bungus Perairan (Selesai)
4	Riau	Pelabuhan Mengkapan
		Pelabuhan Dumai
5	Bengkulu	Pelabuhan Enggano
6	Sumatera Selatan	Pelabuhan Tanjung Api-Api

No	Provinsi	Lokasi
7	Jawa Timur	Pelabuhan Kalianget
8	Nusa Tenggara Timur	Pelabuhan Nangakeo
		Pelabuhan Kalabahi
		Pelabuhan Naikliu
		Pelabuhan Bakalang
		Pelabuhan Liang Bunyu (Selesai)
19	Sulawesi Tenggara	Pelabuhan Lasusua
20	Sulawesi Utara	Pelabuhan Pananaru
21	Maluku	Pelabuhan Dobo (Selesai)

Sumber : Direktorat TSDP – 2023

Daftar Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan

3. Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru

Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru di 1 (satu) lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Kegiatan
1	Lampung	Pelabuhan Mesuji

Sumber : Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat – 2023

Daftar Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru

4. Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan

Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan di 6 (enam) lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Kegiatan
1	Kalimantan Barat	Pelabuhan Silat Perigi Kiri (Selesai)
		Pelabuhan Silat Perigi Kanan (Selesai)
2	Kalimantan Tengah	Pelabuhan Kumai (Selesai)
		Pelabuhan Lupak (Selesai)
		Pelabuhan Lupak Dalam (Selesai)
3	Kalimantan Timur	Pelabuhan Tanjung Keramat

Sumber : Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat – 2023

Daftar Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan

5. Rehabilitasi Pelabuhan Sungai

Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Lanjutan pada tahun 2023 terdapat di 5 (lima) lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Kegiatan
1	Sumatera Selatan	Pelabuhan 7 Ulu (Selesai)
2	Kalimantan Barat	Pelabuhan Rasau Jaya (Selesai)
		Pelabuhan Teluk Batang (Selesai)
3	Kalimantan Selatan	Pelabuhan Pasar Lima (Selesai)
		Pelabuhan Pendalaman Baru (Selesai)

Sumber : Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat – 2023

Daftar Rehabilitasi Pelabuhan Sungai Lanjutan

6. Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan

Pembangunan Pelabuhan Danau Lanjutan di 4 lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Kegiatan
1	Sumatera Utara	Pelabuhan Onan Rungu (Selesai)
		Pelabuhan Sipinggian (Selesai)
2	Bali	Pelabuhan Kedisan (Selesai)
		Pelabuhan Desa Trunyan (Selesai)

Sumber : Direktorat TSDP – 2023.

Daftar Pembangunan Danau Lanjutan

7. Rehabilitasi Pelabuhan Danau

Rehabilitasi Pelabuhan Danau pada tahun 2023 terdapat di 1 (satu) lokasi, yaitu:

No	Provinsi	Kegiatan
1	Sulawesi Tengah	Pelabuhan Danau Lindu

Sumber : Direktorat Transportasi SDP Perhubungan Darat – 2023

Daftar Rehabilitasi Pelabuhan Danau

8. Pembangunan Halte Sungai

Pada tahun 2023 terdapat 15 (Lima Belas) unit pembangunan halte sungai dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jumlah Unit	Lokasi
1	Jambi	4 Unit	- Halte Sungai Teluk Majelis - Halte Sungai Makam Orang Kayo Hitam - Halte Desa Lumahan Kec. Senyerang - Halte Desa Kayu Aro (Dusun Tj Mawar)
2	Kalimantan Selatan	6 Unit	- Halte Sungai Kubah Basirih - Halte Sungai Depan Walikota - Halte Sungai Banua Anyar - Halte Sungai Sawaja 2 - Halte Sungai Rawana Hulu - Halte Sungai Teluk Haur
3	Kalimantan Tengah	1 Unit	- Halte Sungai Pasar Pendopo
4	Kalimantan Barat	2 Unit	- Halte Sungai DAS Kapuas Kab. Melawi - Halte Sungai DAS Kapuas Kab. Sambas
5	Kalimantan Timur	2 Unit	- Halte Desa Tungkup Desa Saka - Halte Sungai Pelawan Desa Pelawan

Sumber : Direktorat TSDP, Ditjen Hubdat – 2023

Pembangunan Halte Sungai

9. Pemasangan dan Pengadaan Rambu Sungai dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran)

Pembangunan SBNP satu paket dengan Pembangunan Pelabuhan, antara lain:

- a. Prov. Sulawesi Tenggara = 13 Unit;
- b. Prov. Jabar = 2 Unit.



Dokumentasi Pembangunan SBNP

Pada tahun 2023 terdapat pemasangan dan pengadaan Rambu sungai dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jumlah Unit
1	Jambi	70
2	Kalimantan Selatan	100
3	Jateng	23
4	Lampung	40
5	Sumsel	41
6	Sulteng	40

Sumber : Direktorat TSDP, Ditjen Hubdat – 2023

Pemasangan dan Pengadaan Rambu Sungai

BAB VII REGULASI

Sesuai dalam Pasal 124 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat memiliki tupoksi melalui Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi, evaluasi peraturan perundang-undangan serta perjanjian/kontrak/kesepakatan bersama, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, informasi publik, layanan pengaduan publik, peliputan dan dokumentasi kegiatan, serta kerja sama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Ditjen Perhubungan Darat melalui Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat berdasarkan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan, sosialisasi hukum, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta asistensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan subsektor transportasi darat.

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara terarah, terpadu, terencana, efektif dan efisien serta akuntabel. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksudnya agar supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan penyebarluasan diharapkan masyarakat mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Dalam penyebarluasan peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web Kementerian Perhubungan dan dapat diakses melalui website: <https://jdih.dephub.go.id>. Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers, dan cara lainnya.

Adapun Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 Tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 5 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2023 Tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 44 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) Atau 0% (nol Persen);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kostumisasi Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

I. PENATAUSAHAAN PNBP

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapatkan ijin penggunaan sebagian dana PNBP sebesar 50% dari target PNBP sebesar Rp. 1.260.064.117.050,- (satu triliun empat ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan pengelolaan PNBP terpusat sejak 1 Mei 2018 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.202/1/7/DRJD/2018 tanggal 16 April 2018 perihal Tata Cara Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP melalui Mekanisme Maksimum pencairan PNBP secara Terpusat sehingga semua penyetoran PNBP dilakukan pada Satker Penampung yaitu Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dengan adanya satker penampung maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi realisasi PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Hubdat.

Kegiatan rekonsiliasi realisasi PNBP dilakukan setiap bulan dengan mengundang Bendahara Penerimaan Satker/Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Hubdat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyamaan data PNBP, dimana data ini digunakan untuk rekonsiliasi dengan KPPN Mitra Kerja (KPPN Jakarta IV) dan KPPN Khusus Penerimaan (KP) dan hasil rekonsiliasi ini digunakan untuk pengajuan surat edaran maksimum pencairan (SE-MP) ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

1. Rekapitulasi Laporan PNBP

Secara umum Jenis Layanan PNBP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari 6 Jenis Jasa Layanan berdasarkan PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Yang Berlaku di Kementerian Perhubungan.



*Jenis Jasa Layanan PNB di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat*

Rekapitulasi Laporan PNB Akhir Tahun 2023 pada Satker-satker penghasil PNB kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

SUMBER KEGIATAN		REALISASI
Jasa Fungsional	Pendapatan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri	5.825.047.325
	Pendapatan Jasa Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi	6.395.000.000
	Pendapatan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	1.193.744.745.001
	Pendapatan Jasa Angkutan Jalan	64.878.379.230
	Pendapatan Jasa Analisis Dampak Lalu Lintas	3.635.100.000
	Pendapatan Jasa Kenavigasian	31.123.000
	Pendapatan Jasa Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan	4.579.101.890
	Jasa Angkutan Laut	2.000.000
		1.279.090.496.446
Jasa Non Fungsional	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	628.987.654
	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	545.357.969
	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.351.844.671
	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8.626.420.953
	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	124.000
	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	223.030.754
	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	4.536.770.718
	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	105.424.160
	Pendapatan Jasa Lainnya	14.180.780
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.800.000
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.648.803.872
	Pendapatan Denda Lainnya	18.874.264
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	218.870.629
	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.554.916.615
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	30.203.817.518
	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.642.793.577
		74.325.018.134
total		1.353.415.514.580

Realisasi PNB di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

II. PERBENDAHARAAN DAN AKUNTASI

1. Penetapan Status Hibah

- a. Pembinaan terhadap satker yang masih mengalami kendala dalam Penetapan Status dan Hibah BMN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan persamaan persepsi mengenai pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang akan ditetapkan statusnya dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan sosialisasi terhadap Satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terkait pelimpahan kewenangan pengusulan Penetapan Status Penggunaan sesuai dengan jumlah per usulan serta sosialisasi kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan teknis dari kementerian perhubungan mengenai kelengkapan data dukung guna proses persetujuan hibah kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan/Kementerian Keuangan.

- b. Menyusun Laporan Hasil Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Laporan Hasil Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN disusun dalam bentuk rekapitulasi total BMN yang telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan dan Hibah BMN serta berapa total yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penetapannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi posisi Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya serta Barang Milik negara yang masih proses Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaannya.

- c. Melakukan proses Penetapan status Penggunaan dan Hibah Barang Milik Negara pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selama tahun 2023 telah diusulkan Penetapan Status Penggunaan atas Barang Milik Negara sebagai berikut:

CAPAIAN PSP BERDASARKAN ITEM BMN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023

NO.	KODE SATKER	URAIAN SATKER	TOTAL BMN	SUDAH PSP		BELUM PSP		RANK
				JUMLAH	(%)	JUMLAH	(%)	
1	412735	Setditjen Hubdat	10.605	10.466	98,69	139	1,31	12
2	352599	Direktorat Angkutan Jalan	1.799	1.673	93,00	126	7,00	10
3	352598	Direktorat Lalu Lintas Jalan	21.134	5.962	28,21	15.172	71,79	36
4	352597	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1.745	1.704	97,65	41	2,35	4
5	352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	3.328	2.172	65,26	1.156	34,74	23
6	352600	Direktorat TSDP	1.310	1.293	98,70	17	1,30	3
7	025734	BPLJSKB	1.976	1.920	97,17	56	2,83	6
8	403841	BPTD Kelas II Aceh	12.543	10.862	86,60	1.681	13,40	25
9	403852	BPTD Kelas II Bali	10.988	10.885	99,06	103	0,94	8
10	690664	BPTD Kelas II NTB	5.843	69	1,18	5.774	98,82	33
11	403848	BPTD Kelas II Banten	7.297	7.032	96,37	265	3,63	16
12	403863	BPTD Kelas II Gorontalo	5.478	1.813	33,10	3.665	66,90	28
13	403845	BPTD Kelas II Jambi	30.110	30.099	99,96	11	0,04	1
14	403849	BPTD Kelas II Jawa Barat	16.876	13.126	77,78	3.750	22,22	29
15	403869	BPTD Kelas II Jawa Tengah	25.107	24.590	97,94	517	2,06	19
16	690668	BPTD Kelas III D.I Yogyakarta	4.854	185	3,81	4.669	96,19	31
17	403851	BPTD Kelas II Jawa Timur	12.310	9.491	77,10	2.819	22,90	27
18	403854	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	9.428	4.982	52,84	4.446	47,16	30
19	403855	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	5.636	5.448	96,66	188	3,34	14
20	403857	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	6.716	5.396	80,35	1.320	19,65	24
21	403858	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	3.356	3.345	99,67	11	0,33	2
22	690669	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	2.533	2.442	96,41	91	3,59	7
23	403844	BPTD Kelas II Riau	114.182	113.417	99,33	765	0,67	21
24	690663	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	246.461	10.041	4,07	236.420	95,93	41
25	403846	BPTD Kelas II Lampung	4.424	3.946	89,20	478	10,80	18
26	690666	BPTD Kelas III Bengkulu	4.522	4.469	98,83	53	1,17	5
27	403865	BPTD Kelas II Maluku	50.572	14.190	28,06	36.382	71,94	39
28	403866	BPTD Kelas II Maluku Utara	125.719	327	0,26	125.392	99,74	40
29	403853	BPTD Kelas II NTT	15.395	14.869	96,58	526	3,42	20
30	690665	BPTD Kelas II Papua	16.750	0	0,00	16.750	100,00	37
31	403867	BPTD Kelas II Papua Barat	27.236	303	1,11	26.933	98,89	38
32	403860	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	53.814	51.900	96,44	1.914	0,25	26
33	690670	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	5.753	5.620	97,69	133	2,31	11
34	403861	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	28.046	22.181	79,09	5.865	20,91	34
35	403859	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	18.859	5.137	27,24	13.722	72,76	35
36	403864	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	95.136	94.664	99,50	472	0,50	17
37	403847	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	64.087	58.621	91,47	5.466	8,53	32
38	690667	BPTD Kelas III Bangka Belitung	2.409	1.501	62,31	908	37,69	22
39	403842	BPTD Kelas II Sumatera Utara	13.463	13.252	98,43	211	1,57	15
40	403843	BPTD Kelas II Sumatera Barat	9.023	8.864	98,24	159	1,76	13
41	633001	KSOPP Danau Toba	730	627	85,89	103	14,11	9
TOTAL			1.097.553	578.884	52,74	518.669	47,26	

*Rekapitulasi Daftar Barang Milik Negara Yang Ditetapkan Status Penggunaan
Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023*

2. Penghapusan BMN

- a. Melakukan proses Penghapusan BMN terhadap hasil kegiatan Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Selama Tahun 2023 telah dilakukan penghapusan atas aset berupa kendaraan dinas sejumlah 601 Unit.

- b. Menyusun Laporan Penghapusan BMN secara aktual dan *up to date*

No	UAKPB	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Direktorat Angkutan Jalan	3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	600	Unit	708.385.000.000
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit	184.840.500

Daftar Penghapusan BMN (berupa kendaraan dinas)

3. Simak BMN

- a. Menyusun Laporan BMN Semester / Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Negara semester I, semester II, dan Tahunan. Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

- b. Melakukan pembinaan penyusunan Laporan BMN terhadap satker-satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Penyusunan Laporan BMN terhadap Satker-Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

4. Serah Terima Operasional

Kegiatan serah terima yang dilakukan selama TA. 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperlukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan terhadap serah terima operasional hasil kegiatan belanja barang/modal. Tugas dan tanggung jawab KPA/KPB yaitu membentuk tim internal inventarisasi BMN guna melakukan verifikasi dan inventarisasi/pendataan kembali BMN terhadap kesesuaian keberadaan fisik dan kondisi barang dengan yang tercatat di dalam daftar inventaris barang (aplikasi SIMAK-BMN serta menerbitkan Berita Acara Hasil Inventarisasi BMN Internal yang ditandatangani Tim Internal Inventaris BMN dan diketahui oleh KPA/KPB).

Melakukan penelitian administrasi dan teknis terhadap BMN yang akan dilakukan Serah Terima Operasional. Di tahun 2023 telah dilaksanakan penelitian administrasi dan teknis terhadap Barang Milik Negara yang akan diserahterimakan langsung ke lapangan (hasil pekerjaan satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat).



Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara

5. Pembinaan dan Evaluasi Hasil Audit

- a. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI TA. 2023

Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI bertujuan mempersiapkan dan memverifikasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan uji petik BPK-RI atas Laporan Keuangan serta mendampingi Satker-satker Ditjen Perhubungan Darat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK-RI sehingga informasi yang dibutuhkan BPK-RI dapat tersampaikan dengan benar. Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI Pada TA. 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 kali pada saat Pemeriksaan BPK-RI, pada daerah yang merupakan lokasi uji petik yang telah ditentukan oleh BPK-RI yaitu Maluku Utara, Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat.



Menghadiri Entry Meeting dan pendampingan dalam pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2022 Kementerian Perhubungan

b. Pemuktahiran Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Kegiatan Pemuktahiran Tindak Lanjut LHP BPK-RI dan LHA Itjen yang dilakukan selama TA. 2023 sebanyak 2 kali. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan memverifikasi data dukung dari Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat s.d. posisi Semester II TA. 2023;
- 2) Melakukan diskusi antara Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Tim PTL Inspektorat Jenderal terkait kendala dalam upaya penyelesaian LHA Itjen dan LHP BPK-RI seperti data dukung yang belum lengkap dan/atau temuan yang belum dapat diselesaikan.



Pemutakhiran Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

6. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan. Dalam Tahun 2023, Bagian Keuangan telah menyusun 3 Laporan Keuangan UAPPA/B E-1 berupa:

- a. Laporan Keuangan Tahunan (*Unaudited*) TA. 2022
- b. Laporan Keuangan Semester I TA. 2023
- c. Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2023

7. Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1), Bagian Keuangan telah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 dengan mengundang Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA/B-E1 pada TA. 2023 telah dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu:

- 1) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan (*Unaudited*) TA. 2022;
- 2) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I TA. 2023;
- 3) Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2023.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengecek kelengkapan data dukung dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Tahunan 2023 Tingkat UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

2. Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B-E1 dengan Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPA/B-E1;
3. Melakukan pengecekan nilai Neraca yang tercantum di Berita Acara Rekonsiliasi Tahunan 2023 masing-masing Satuan Kerja dengan laporan BMN UAPPB-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah dikonsolidasi;
4. Melakukan pengecekan nilai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang tercantum di Berita Acara Rekonsiliasi masing-masing Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan UAPPA-E;
5. Melakukan pengecekan nilai Laporan Barang Milik Negara UAPPB-E1 dengan Laporan Keuangan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah dikonsolidasi;
6. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) TA. 2022



Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I TA. 2023



Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2023

8. Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Penilaian PIPK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penilaian dilakukan terhadap 4 akun signifikan yaitu Persediaan, Aset Tidak Berwujud (ATB), Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan PNBP-LO. Penilaian PIPK dilakukan atas populasi dan/atau sampel kegiatan pelaporan keuangan periode Tahun 2023. Adapun satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang menjadi sample penilaian PIPK adalah Direktorat Sarana Transportasi Jalan, BPTD Kelas II Sumatera Selatan, BPTD Kelas II NTT, BPTD Kelas II Maluku, dan BPTD Kelas II Maluku Utara.

Kegiatan Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang dilakukan selama TA. 2023 sebanyak 6 kali dengan hasil kegiatan penilaian efektif dengan pengecualian. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian sehingga mendukung keandalan pelaporan keuangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Evaluasi Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Pengisian Tabel B.1 Risk Control Matrix dan Pembahasan Data Dukung Tabel A;
4. Evaluasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
5. Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling TA. 2023;

6. Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu dan Penyusunan Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAPPA Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023



Evaluasi Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)



Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2023



Pengisian Tabel B.1 Risk Control Matrix dan Pembahasan Data Dukung Tabel A



Evaluasi Pengumpulan Data Dukung Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)



Reviu Laporan Hasil Penilaian PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling TA. 2023

III. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

1. Pagu Anggaran

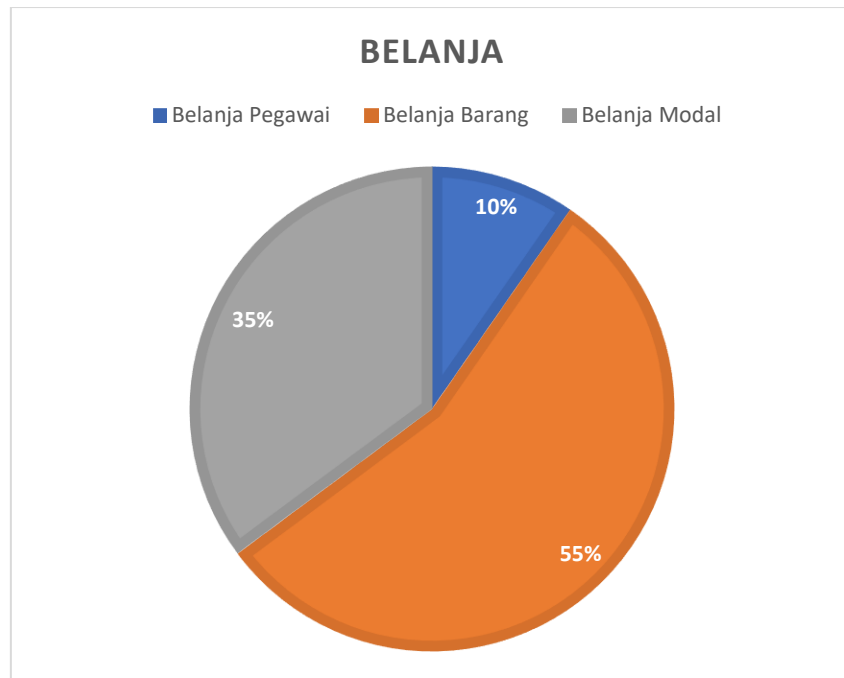
Total Pagu akhir DIPA TA. 2023 sebesar Rp5.811.375.020.000,-

a. Rincian per Sumber Dana :

RM	: Rp	4.598.285.408.000,-	(79,13%)
PNBP	: Rp	612.951.093.000,-	(10,55%)
SBSN	: Rp	526.373.458.000,-	(9,06%)
PHLN	: Rp	50.000.000.000,-	(0,86%)
BLU	: Rp	23.765.061.000,-	(0,41%)

b. Rincian per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai	: Rp.	561.082.214.000,-	(9,65%)
Belanja Barang	: Rp.	3.206.073.186.000,-	(55,17%)
Belanja Modal	: Rp.	2.044.219.620.000,-	(35,18%)



Komposisi Pagu Anggaran Per Jenis Belanja

2. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi penyerapan Anggaran DIPA TA.2023 dengan pagu sebesar Rp5.721.521.978.926,- posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.811.375.020.000,- (98,47%), terdiri dari :

a. Rincian per Sumber Dana :

NO	SUMBER DANA	PAGU	REALISASI	%
1	RM	4.598.285.408	4.574.859.787	99,49%
2	PNBP	612.951.093	586.122.500	95,62%
3	SBSN	526.373.458	500.720.403	95,13%
4	PHLN	50.000.000	44.771.095	89,54%
5	BLU	23.765.061	15.985.548	67,26%
	TOTAL	5.818.525.020	5.722.459.333	98,47%

b. Rincian per Jenis Belanja :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	561.082.214	560.902.287	99,97%
2	Belanja Barang	3.206.073.186	3.178.184.404	99,13%
3	Belanja Modal	2.044.219.620	1.983.372.642	97,02%
	Total	5.818.525.020	5.722.459.333	98,47%

Sumber : Sakti 2023

3. Kegiatan yang Dikontrakkan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a. Total rencana Kegiatan dikontrakkan : 784 Paket;
- b. Kegiatan Yang Menggunakan RPATA : 178 Paket.

4. Kegiatan yang Diblokir DIPA Awal Antara lain:
- a. BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung sebesar Rp5.000.000.000,- berupa kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai Mesuji (Termasuk Supervisi);
 - b. BPTD Wilayah VI Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21.000.000,- dengan rincian:
 - 1) Revitalisasi Terminal Tipe A Ciakar Sumedang sebesar Rp20.000.000.000,-;
 - 2) Ketatalaksanaan Operasional dan Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Berbasis Excellent Service Terminal Tipe A Sukabumi Rp1.000.000.000,-.

BAB IX

PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disusun berdasarkan hasil kegiatan secara obyektif dan berdasarkan fakta serta informasi yang sebenarnya selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Laporan Tahunan ini mencakup laporan kegiatan dan capaiannya.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini, diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan ini juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik, sehingga kualitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat semakin meningkat untuk tahun selanjutnya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih memerlukan penyempurnaan, dan bersifat terbuka untuk menerima masukan dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang.



Kementerian Perhubungan RI
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat